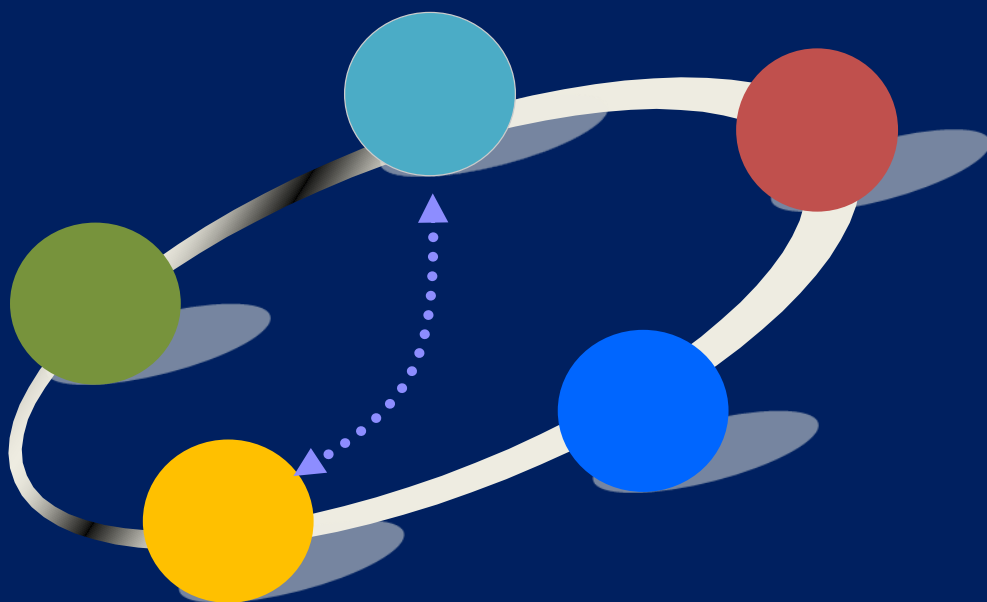




Pokok-Pokok Siklus APBN di Indonesia

Penyusunan Konsep Kebijakan dan Kapasitas Fiskal Sebagai Langkah Awal



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DIREKTORAT PENYUSUNAN APBN
JAKARTA, 2014**

Pokok-Pokok Siklus APBN Di Indonesia
Penyusunan Konsep Kebijakan dan Kapasitas Fiskal
Sebagai Langkah Awal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DIREKTORAT PENYUSUNAN APBN
JAKARTA, 2014

Pokok-Pokok Siklus APBN Di Indonesia
Penyusunan Konsep Kebijakan dan Kapasitas Fiskal
Sebagai Langkah Awal

ISBN 978-602-17675-2-8

Copyright @ 2014

Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

Disusun oleh Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran

Pengarah:
Askolani

Pemrakarsa dan Editor:
Purwiyanto
Parluhutan Hutahaeen
Kunta W. D. Nugraha

Kontributor:
Yonathan Setianto Hadi
Didik Kusnaini
Agung Widiadi
Heru Wibowo
Agus Kuswantoro
Wawan Sunarjo

Pelaksana Penulisan:
Koordinator: Agus Sudradjat
Pelaksana Teknis: Pudjiastuti, Hery Arif Listiyanto

Cover:
Muhendaryanto Apnihar

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	vii
Sambutan Menteri Keuangan Republik Indonesia	viii
Kata Pengantar Direktur Jenderal Anggaran	ix
Kata Pengantar Tim Penyusun	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Posisi APBN dalam Perundang-Undangan	1
1.2. Posisi Menteri Keuangan Dalam Pengelolaan APBN	3
1.3. Struktur APBN	4
1.4. Siklus APBN	7
 BAB II SIKLUS PENYUSUNAN APBN	 15
2.1. Arah Kebijakan Presiden	17
2.2. Penyusunan Kebijakan Dan Kapasitas Fiskal RAPBN (<i>Resource Envelope</i>).	20
a. Penyusunan Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Parameter APBN	21
b. Penyusunan Proyeksi Pendapatan Negara dan Hibah	24
c. Penyusunan Proyeksi Belanja Negara.....	27
d. Penyusunan Proyeksi Pembiayaan Anggaran	35
e. Penyusunan Postur RAPBN dalam Rangka Penyusunan Kapasitas Fiskal	38
f. Penyampaian Kapasitas Fiskal (<i>Resource Envelope</i>) kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas	42
g. Penyusunan Pagu Indikatif Belanja K/L	51
2.3. Pembicaraan Pendahuluan	59
2.4. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	69
2.5. Penyampaian dan Pembahasan RAPBN	74
2.6. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	83
 BAB III SIKLUS PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBN SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II	 85
3.1. Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II	85

3.2. Penyampaian dan Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II	89
BAB IV SIKLUS PENYUSUNAN APBN PERUBAHAN	94
4.1. Penyusunan dan Penyampaian Nota Keuangan, RAPBN-P serta RUU APBN-P	95
4.2. Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN	101
BAB V SIKLUS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT	108
5.1. Alur Penyusunan LKPP Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat..	108
5.2. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN	114
REFERENSI	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Struktur APBN (<i>I-account</i>)	5
Tabel 2.1 Penetapan Arah Kebijakan Tahun 2014	19
Tabel 2.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Parameter APBN beserta Pemangku Kepentingannya	23
Tabel 2.3 Jenis Pendapatan Negara dan Variabel Ekonomi Makro yang Mempengaruhinya	25
Tabel 2.4 Belanja Pemerintah Pusat, 2014	30
Tabel 2.5 Postur Dalam Rangka Penyusunan Kapasitas Fiskal	41
Tabel 2.6 Penyusunan Kapasitas Fiskal dan Kebijakan APBN	43
Tabel 2.7 Penyusunan Pagu Indikatif Belanja Kementerian Negara/Lembaga	56
Tabel 2.8 Pembicaraan Pendahuluan	64
Tabel 2.9 Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2014.....	72
Tabel 2.10 Penyampaian dan Pembahasan RUU APBN.....	78
Tabel 3.1 Penyusunan Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II	87
Tabel 3.2 Penyampaian dan Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II	91
Tabel 4.1 Penyusunan Nota Keuangan, RAPBN-P serta RUU APBN-P	99
Tabel 4.2 Jadwal Pembahasan RAPBN-P serta RUU APBN-P	103
Tabel 5.1 Jadwal Pembahasan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN	116

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).....	8
Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Siklus APBN	13
Gambar 2.1 Siklus Penyusunan APBN	16
Gambar 5.1 Alur Penyusunan LKPP	109

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|--------------|--|
| Lampiran I | Surat Menteri Keuangan Kepada Presiden tentang Arah dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Dalam Mendukung Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional |
| Lampiran II | Surat Menteri Keuangan Kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Resource Envelope Pagu Indikatif Belanja K/L RAPBN 2014 |
| Lampiran III | Surat Menteri Keuangan Kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pemutakhiran Resource Envelope Pagu Indikatif Belanja K/L RAPBN 2014 |
| Lampiran IV | Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 |
| Lampiran V | Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Revisi Pagu Indikatif Tahun 2014 |
| Lampiran VI | Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Revisi Pagu Indikatif Tahun 2014 |
| Lampiran VII | Amanat Presiden Tentang RUU APBN 2014 |

SAMBUTAN
Menteri Keuangan Republik Indonesia

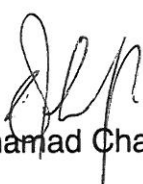
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa karena atas izin dan berkat-Nya kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk senantiasa memberikan bakti kita kepada negara dan masyarakat dengan bekerja sebagai pengelola keuangan negara yang baik. Semoga kontribusi kita bisa menjadi ibadah dan penyemangat untuk semakin memberikan upaya terbaik dalam mewujudkan pelaksanaan APBN yang terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dari sisi domestik, APBN merupakan alat Pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik kuantitas maupun kualitas. Kemampuan Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang tercermin dalam APBN juga menjadi indikator bagi investor dan calon investor untuk melihat daya tahan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman bahwa penyusunan APBN harus dilakukan melalui proses yang kredibel dan bertanggung jawab sehingga kepercayaan masyarakat di dalam negeri maupun internasional dapat terjaga.

Proses penyusunan APBN melibatkan banyak institusi, baik dari Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Bank Indonesia. Dari internal Pemerintah sebagai eksekutif negara, proses penyusunan APBN tidak hanya dilakukan oleh satu institusi Kementerian Keuangan, tetapi juga melibatkan Kementerian Perencanaan (Bappenas) dan BPS. Selain itu, penyusunan APBN juga terkait dengan agenda utama yang sangat ketat, kompleksitas dan komprehensifnya materi yang dibahas dan diputuskan. Oleh karena itu, pemahaman tentang siklus APBN menjadi sangat penting.

Sebagai upaya memberikan pemahaman memadai kepada masyarakat mengenai siklus APBN dan arti pentingnya, saya menyambut positif inisiasi Direktorat Jenderal Anggaran melalui Direktorat Penyusunan APBN, untuk menerbitkan buku ini. Semoga kehadiran buku ini di tengah masyarakat dapat menambah pemahaman tentang praktek pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab.

Jakarta, 27 Maret 2014


Muhammad Chatib Basri

KATA PENGANTAR
Direktur Jenderal Anggaran

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi dasar keuangan negara mengamanatkan bahwa APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Supaya fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi dapat secara efektif dilaksanakan melalui APBN sehingga amanat UUD 1945 dapat dicapai, maka penyusunannya harus dilakukan secara hati-hati dan terukur oleh pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk itu.

Melalui buku ini, diharapkan diperoleh gambaran secara rinci tentang setiap tahapan penyusunan APBN, peran serta, dan tanggung jawab strategis dari masing-masing stakeholder: dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pembahasan di DPR, penetapan, pelaksanaan, pelaporan dan pencatatan, serta pemeriksaan dan pertanggungjawabannya. Setiap tahapan tersebut melibatkan institusi-institusi yang memiliki tugas dan fungsi yang tipikal untuk mendukung tersusunnya suatu struktur APBN yang kredibel. Buku ini juga menjelaskan setiap jenis keluaran (*output*) dari masing-masing tahapan penyusunan untuk tersusunnya APBN.

Dari penjabaran siklus proses penyusunan APBN tersebut, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang proses tersusunnya APBN setiap tahun, dan tahapan-tahapan yang dilakukan Pemerintah dari sebelum terbentuknya RAPBN sampai dengan diajukan kepada DPR untuk dibahas dan ditetapkan menjadi UU APBN. Dari sisi pihak-pihak yang berkontribusi, diharapkan buku ini juga dapat memberikan gambaran lengkap mengenai proses bisnis yang selama ini dilakukan untuk selanjutnya dilakukan evaluasi, perbaikan dan koreksi jika terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki dari proses bisnis tersebut.

Kami memahami bahwa hasil dari setiap proses selalu menyisakan kekurangan dan ketidaksempurnaan. Demikian juga dengan proses penyusunan buku ini yang dapat berdampak pada hasil yang kurang sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang dapat membawa perbaikan dan penyempurnaan sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi dalam buku ini. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada para pencetus ide, penyusun dan semua pihak yang memberikan kontribusi dan dukungan sehingga buku ini dapat terbit. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dalam memahami proses dan siklus APBN di Indonesia.

Jakarta, 27 Maret 2014



Askolani

KATA PENGANTAR

Buku "Pokok-Pokok Siklus APBN di Indonesia", disusun dengan harapan agar pembaca dapat memahami bahwa APBN memiliki siklus yang kompleks dan komprehensif dimulai dari perencanaan dan penganggaran hingga pemeriksaan dan pertanggungjawaban serta memerlukan sinergi yang baik dan ketat dari berbagai pihak, baik internal pemerintah maupun antara eksekutif dan legislatif.

Lebih jauh lagi para pembaca diharapkan dapat memahami bagaimana rincian proses di setiap tahapan siklus APBN, yang melibatkan banyak institusi untuk saling berbagi kontribusi dengan kewenangan dan tanggung jawab yang masing-masing penting untuk menghasilkan *output* dari setiap tahapan siklus APBN. Kontribusi yang diberikan serta proses penyusunan yang melibatkan lebih dari satu institusi baik di internal Kementerian Keuangan maupun di Internal Pemerintah merupakan upaya agar APBN benar-benar menjadi alat yang representatif untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam buku ini, Tim Penyusun berupaya menguraikan rincian proses penyusunan APBN di setiap tahapan siklusnya dimulai dari penyusunan arah kebijakan Presiden sampai dengan pertanggungjawaban APBN oleh Pemerintah. Selain itu, diuraikan juga peran masing-masing institusi yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan *output* yang dihasilkan dari setiap tahapan.

Atas terbitnya buku ini, Tim Penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah aktif berperan dalam proses penyusunan hingga penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Askolani selaku Dirjen Anggaran atas arahan dan bimbingan beliau, Ibu Anandy Wati selaku Sekretaris Ditjen Anggaran atas dukungan dan akomodasinya. Selanjutnya, kami juga berterima kasih kepada pegawai dan pejabat di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN atas dukungan data, informasi, dan kontribusi pemikiran mereka sehingga buku ini dapat terbit.

Tim Penyusun menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, demikian juga dengan buku ini. Oleh karena itu, tim penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sehingga dapat memberikan perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan pada saat menyusun APBN dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara.

Jakarta, 27 Maret 2014

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Posisi APBN dalam Perundang-Undangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan Negara sebagai konsekuensi penyelenggaraan pemerintahan yang menimbulkan hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang.

Hal tersebut sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengamanatkan, “APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, APBN adalah Undang-undang. Selanjutnya, berdasarkan pasal 23 ayat (2) UUD 1945, sebagai undang-undang, Rancangan Undang-undang APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Namun, berdasarkan ayat (3) pasal yang sama, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. Selain DPR, organ legislatif yang berperan terhadap penyusunan dan pelaksanaan APBN adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang berdasarkan pasal 22D ayat 2 UUD 1945, memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan UU APBN dan berdasarkan ayat (3) pasal yang sama, dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN.

Fungsi APBN sebagai alat pengelolaan keuangan Negara diatur dalam Pasal 3 ayat (4) UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan, “APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi”. Berdasarkan penjelasannya dapat difahami bahwa fungsi otorisasi berarti APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, fungsi perencanaan menempatkan APBN sebagai

pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, dan fungsi pengawasan memberikan peran bagi APBN sebagai dasar untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan ketentuan yang telah ditetapkan. APBN juga harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian sebagai perwujudan fungsi alokasi. Kemudian, APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian sebagai implikasi dari fungsi distribusi dan stabilisasi.

Definisi APBN sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan undang-undang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Selain itu, berdasarkan pasal 2 ayat (1) PP Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, penyusunan APBN setiap tahun oleh Pemerintah dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. Lebih lanjut, dalam ayat (2) pasal yang sama, dinyatakan bahwa APBN harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab sesuai kaidah umum praktik penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Dalam rangka pengelolaan secara tertib dan bertanggung jawab, maka penyusunan APBN yang diawali oleh penyusunan rencana kerja dan anggaran K/L berpedoman kepada PP Nomor 90 tahun 2010, sementara dokumen pelaksanaan anggaran untuk Bendahara Umum Negara (Belanja Non K/L) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 tahun 2012 tentang Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi, dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.

Selanjutnya, sebagai bentuk pengendalian atas pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab, maka konstitusi mengamanatkan Menteri Keuangan untuk menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD yang tidak melebihi 3 (tiga) persen dari Produk Domestik Bruto. Hal ini sesuai

dengan Pasal 83 ayat (1) dan (2) UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan landasan-landasan hukum di atas, dapat dipresepsikan bahwa APBN merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pemerintah selaku eksekutif untuk mencapai tujuan bernegara. Oleh karena itu, dalam setiap tahapan siklusnya, APBN harus mencerminkan upaya pemerintah selaku pengelola keuangan Negara untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.

1.2. Posisi Menteri Keuangan Dalam Pengelolaan APBN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya pengelolaan dimaksud dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal (*Chief Financial Officer/CFO*) dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Penggunaan barang K/L yang dipimpinnya, serta Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selaku Pengelola Fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas, antara lain: (1) menyusun Kebijaksanaan Fiskal & Kerangka Ekonomi Makro, (2) menyusun Rancangan APBN dan Rancangan Perubahan APBN, (3) mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, (4) melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara; serta (5) menyusun laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sementara itu, tugas Menteri/Pimpinan K/L selaku Pengguna Anggaran, antara lain: (1) menyusun rancangan anggaran kementerian/lembaga yang dipimpinnya: (2) menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, (3) melaksanakan anggaran kementerian/lembaga, (4) mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, serta (5) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian/lembaga yang dipimpinnya.

1.3. Struktur APBN

Sejak tahun 2000, format dan struktur APBN Indonesia berubah dari T-Account menjadi *I-account*. Perubahan tersebut untuk menyesuaikan dengan standar *Government Finance Statistics* (GFS). Dengan format ini, Pendapatan disajikan pada urutan teratas yang kemudian dikurangi dengan belanja negara sehingga dapat diketahui surplus atau defisit. Setelah defisit, disajikan unsur-unsur Pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Penyesuaian format ini memberikan keuntungan sebagai berikut: (i) meningkatkan transparansi dalam penyusunan APBN, (ii) mempermudah pelaksanaan pengelolaan APBN oleh Pemerintah, (iii) memudahkan analisis perbandingan dengan APBN negara-negara lain yang juga menerapkan standar GFS, dan (iv) memudahkan pelaksanaan desentralisasi perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Format dan struktur *I-account* APBN secara singkat disajikan dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Struktur APBN (*I-account*)

A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	
a. Pajak Dalam Negeri	
1) Pajak Penghasilan	
- PPh Non-Migas	
- PPh Migas	
2) Pajak pertambahan nilai	
3) Pajak bumi dan bangunan	
4) Cukai	
5) Pajak lainnya	
b. Pajak Perdagangan Internasional	
1) Bea masuk	
2) Bea Keluar	
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	
a. Penerimaan SDA	
1) SDA Migas	
2) Non Migas	
b. Bagian Laba BUMN	
c. PNBP Lainnya	
d. Pendapatan BLU	
II. PENERIMAAN HIBAH	
B. BELANJA NEGARA	
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	
1. Belanja Pegawai	
2. Belanja Barang	
3. Belanja Modal	
4. Pembayaran Bunga Utang	
i. Utang Dalam Negeri	
ii. Utang Luar Negeri	
5. Subsidi	
a Subsidi Energi	
1) BBM, LPG & BBN	
2) Listrik	
b Subsidi Non Energi	
6. Belanja Hibah	
7. Bantuan Sosial	
8. Belanja Lain-Lain	
II. TRANSFER KE DAERAH	
1. Dana Perimbangan	
a. Dana Bagi Hasil	
b. Dana Alokasi Umum	
c. Dana Alokasi Khusus	
2. Dana Otonomi Khusus dan Peny.	
a. Dana Otonomi Khusus	
b. Dana Penyesuaian	
C. KESEIMBANGAN PRIMER	
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	
<i>% Defisit Terhadap PDB</i>	
E. PEMBIAYAAN (I + II)	
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	
1. Perbankan dalam negeri	
2. Non-perbankan dalam negeri	
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)	
a. Pinjaman Program	
b. Pinjaman Proyek Bruto	
2. Penerusan Pinjaman (SLA)	
3. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN	
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN	
<ul style="list-style-type: none"> - Produk Domestik Bruto (miliar Rupiah) - Pertumbuhan ekonomi (%) - Inflasi (%) y-o-y - Tkt bunga SPN 3 bulan (%) - Nilai tukar (Rp/US\$1) - Harga minyak (US\$/barel) - Lifting Minyak (ribu barel/hari) - Lifting Gas (MBOEPD) 	

Beberapa pengertian terkait dengan APBN adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas Fiskal (*Resource Envelope*) adalah kemampuan keuangan negara yang dihimpun dari pendapatan negara untuk mendanai anggaran belanja negara yang meliputi Belanja K/L dan Belanja Non K/L.
2. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan untuk Belanja K/L sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja K/L (renja K/L) dan Belanja non-K/L. Pagu indikatif ini mengindikasikan kebutuhan angka dasar bagi pendanaan sasaran kinerja dan kebijakan yang masih berlanjut dan indikasi jumlah tambahan untuk mendanai inisiatif baru. Pagu Indikatif ditetapkan dengan Surat Bersana (SB) Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas pada bulan Maret tahun sebelumnya.
3. Pagu Anggaran adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada K/L untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran K/L(RKA-K/L) dan kepada Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menyusun Rencana Dana Pengeluaran (RDP) BUN. Pagu Anggaran ditetapkan melalui surat Menteri Keuangan kepada seluruh K/L pada bulan Juni tahun sebelumnya.
4. Alokasi Anggaran adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada K/L dan BUN berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan Pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan DPR.
5. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) adalah rancangan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disusun dan disepakati oleh Pemerintah untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk ditetapkan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR dan ditetapkan paling lambat akhir bulan November tahun sebelumnya.
7. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) adalah rancangan perubahan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara sebagai akibat dari perubahan pada: (a) besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro; (b) pokok-pokok kebijakan fiskal; (c) keadaan yang menyebabkan harus

dilakukan pergeseran anggaran; dan (d) keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang diajukan ke DPR untuk ditetapkan.

8. APBNP adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara sebagai akibat dari perubahan pada: (a) besaran-besaran asumsi dasar ekonomi; makro (b) pokok-pokok kebijakan fiskal; (c) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran; dan (d) keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang disetujui oleh DPR.
9. Inisiatif Baru adalah usulan tambahan rencana Kinerja selain yang telah dicantumkan dalam prakiraan maju, yang berupa program, kegiatan, keluaran, dan/atau komponen. Usulan Inisiatif Baru dapat dilakukan pada tiga kesempatan dalam siklus perencanaan dan penganggaran, yaitu:
 - a. Sebelum Pagu Indikatif (pengusulan I) di bulan Januari/Februari;
 - b. Sebelum Pagu Anggaran (pengusulan II) di bulan Mei/Juni;
 - c. Sebelum Alokasi Anggaran (pengusulan III) di bulan Agustus/September.

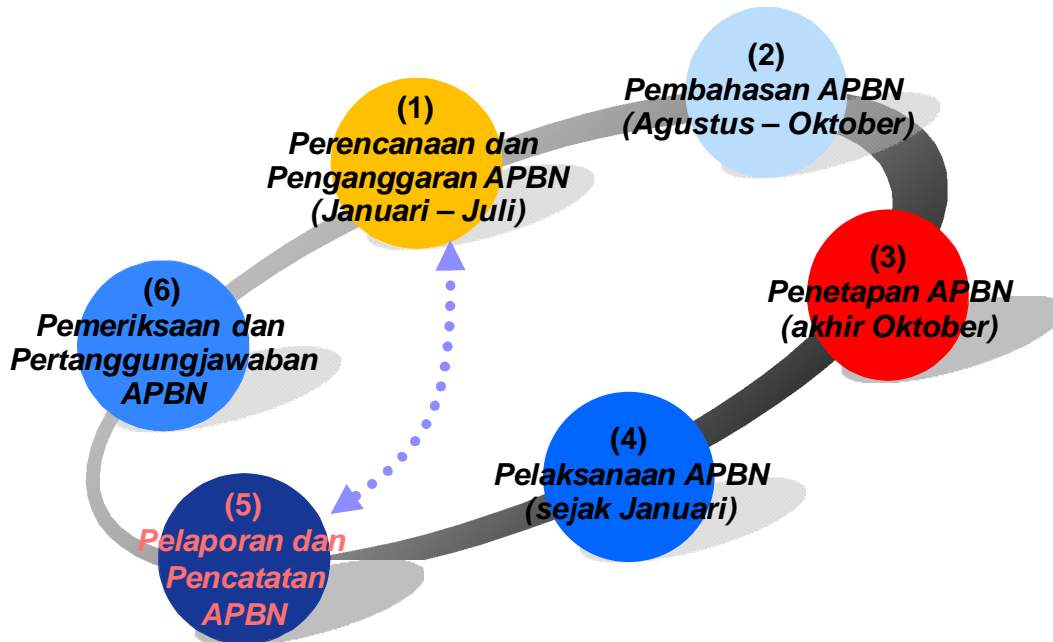
1.4. Siklus APBN

Terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam proses penyusunan RAPBN, antara lain siklus APBN, kondisi ekonomi domestik dan internasional yang tercermin dalam asumsi dasar ekonomi makro, berbagai kebijakan APBN dan pembangunan, parameter konsumsi komoditas bersubsidi, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara, resiko fiskal dan kinerja pelaksanaan APBN dari tahun ke tahun.

Siklus adalah putaran waktu yang berisi rangkaian kegiatan secara berulang dengan tetap dan teratur. Oleh karena itu, Siklus APBN dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang berawal dari perencanaan dan penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban APBN yang berulang dengan tetap dan teratur setiap tahun anggaran. Secara ringkas, penggambaran siklus APBN disajikan pada **Gambar 1.1.**

Gambar 1.1.

Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)



Siklus APBN diawali dengan tahapan kegiatan **perencanaan dan penganggaran APBN**. Terkait penyusunan rencana anggaran (kapasitas fiskal), Pemerintah, BPS, Bank Indonesia mempersiapkan asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh Pemerintah. Selain itu juga disiapkan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Dalam tahapan ini, terdapat dua kegiatan penting yaitu: perencanaan kegiatan (Perencanaan) dan perencanaan anggaran (Penganggaran). Dalam perencanaan, para pemangku kepentingan terutama Kementerian Negara/Lembaga (K/L) menjalankan perannya untuk mempersiapkan RKP/RKAKL yang mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan DPR. Setelah melalui pembahasan antara K/L selaku *chief of operation officer* (COO) dengan Menteri Keuangan selaku *chief financial officer* (CFO) dan Menteri Perencanaan, dihasilkan Rancangan Undang-Undang APBN yang bersama Nota Keuangan kemudian disampaikan kepada DPR. Setelah dilakukan **pembahasan** antara Pemerintah dan DPR, dengan mempertimbangkan masukan

DPD, DPR memberikan persetujuan dan pengesahan sehingga menjadi Undang-undang APBN, di mana tahapan kegiatan ini disebut **penetapan APBN**. Pada tahapan selanjutnya, **pelaksanaan APBN** dilakukan oleh K/L dan Bendahara Umum Negara dengan mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai alat pelaksanaan APBN. Bersamaan dengan tahapan pelaksanaan APBN, K/L dan Bendahara Umum Negara melakukan **pelaporan dan pencatatan** sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Atas LKPP tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan **pemeriksaan**, dan LKPP yang telah diaudit oleh BPK tersebut disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang **pertanggungjawaban pelaksanaan APBN** untuk dibahas dan disetujui.

Secara ringkas, kegiatan yang dilakukan dalam satu siklus APBN tahun tertentu meliputi:

Tahapan	Kegiatan	Output	Lingkup Pembahasan
1. Perumusan arahan Presiden	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identifikasi arahan Presiden dalam sidang kabinet ➤ Klasifikasi arahan presiden menurut tema/bidang ➤ Formulasi konsep usulan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Menteri Keuangan ke Presiden tentang usulan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional 	Internal Pemerintah
2. <i>Resource Envelope</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Review Kerangka Penganggaran Jangka Panjang (Long Term Budget)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Menteri Keuangan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang <i>resource envelope</i> 	Internal Pemerintah, dengan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan

	<p><i>Framework - LTBF)</i> dan Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (<i>Medium Term Budget Framework – MTBF</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Perumusan konsep awal kebijakan fiskal dan pokok-pokok KEM ➤ Perumusan usulan asumsi dasar ekonomi makro dan Parameter APBN ➤ Perumusan usulan besaran RAPBN ➤ Perumusan usulan besaran <i>resource envelope</i> pagu belanja negara 	<p>pagu belanja K/L</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Konsep Kebijakan fiskal dan makro RAPBN ➤ Draft Surat Menteri Keuangan kepada Presiden ➤ Konsep paparan Menteri Keuangan dalam sidang kabinet 	<p>Bappenas.</p> <p>BPS, Kementerian ESDM, BI dalam penyusunan asumsi dasar ekonomi makro</p>
3. Penyusunan Pagu Indikatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyampaian surat tentang kapasitas fiskal untuk pagu indikatif kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas ➤ Penyusunan usulan rancangan pagu indikatif 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas tentang Pagu Indikatif 	Internal Pemerintah
4. Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyiapan bahan penyusunan KEM dan PPKF RAPBN TA yang 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokumen KEM dan PPKF ➤ Dokumen RKP ➤ Paparan Menteri Keuangan ke DPR 	Internal Pemerintah Penanggung jawab: Kementerian

Kebijakan Fiskal (PPKF) (bersamaan dengan Rencana Kerja Pemerintah)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ direncanakan ➤ Penyiapan dokumen KEM dan PPKF untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan ➤ Penyusunan RKP (Keppres) ➤ Penyampaian RKP serta KEM dan PPKF kepada DPR 	➤ Kesepakatan Badan Anggaran tentang RKP, KEM dan PPKF.	Keuangan (BKF) Bappenas (Deputi Bidang Pendanaan dan Pembangunan)
5. Pembicaraan Pendahuluan			BKF, DJA, DJPK, dan Bappenas
6. Penyusunan RAPBN dan MTBF	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penganggaran ➤ Penyampaian dan pembahasan dalam sidang kabinet 	Dokumen Nota Keuangan RAPBN dan RUU APBN (Disampaikan oleh Presiden kepada DPR pada tanggal 16 Agustus)	Internal Pemerintah Penanggung Jawab: Kementerian Keuangan (dengan koordinator DJA)
7. Pembahasan RAPBN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembahasan RAPBN menjadi APBN ➤ RUU APBN menjadi UU APBN 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nota Keuangan APBN ➤ UU APBN (Ditetapkan akhir Oktober) 	Pemerintah dan DPR Penanggung Jawab: BKF, DJA dan DJPK
8. Penganggaran APBN		Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Internal Pemerintah Penanggung Jawab: DJA
9. Pelaksanaan APBN mulai 1 Januari TA yang direncanakan			Penanggung jawab: Masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran
10. Laporan Semester I dan Prognosis Semester II	➤ Penyusunan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II	Laporan Semester I dan Prognosis Semester II	Pemerintah dan DPR Penanggung jawab : DJA

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyampaian Laporan Semester I dan Prognosis Semester II kepada DPR ➤ Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II di DPR ➤ Pengesahan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II 		
11. Pembahasan RAPBN-P menjadi APBN-P	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Monitoring dan Evaluasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Realisasi APBN ➤ Penyusunan <i>exercise</i> dan penetapan postur RAPBN-P ➤ Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN-P ke DPR ➤ Pembahasan RAPBNP antara Pemerintah dengan DPR ➤ Pengesahan RUU APBNP menjadi UU APBNP 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nota Keuangan dan RUU APBNP ➤ UU APBNP 	Penanggung jawab: DJA dan BKF
12. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ➤ Penyampaian Laporan 	UU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan laporan keuangan yang diaudit	Pemerintah, BPK dan DPR Penanggung jawab: DJPB

	Keuangan Pemerintah Pusat yang diaudit dan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR ➤ Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat di DPR ➤ Pengesahan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.		
--	---	--	--

Pada prakteknya, siklus APBN tahun tertentu meliputi waktu lebih dari satu tahun sehingga saling beririsan antara APBN tahun tertentu dengan APBN tahun sebelum dan sesudahnya sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.2. Hal ini terjadi karena pada tahun anggaran berjalan, misalnya 2014, ditangani kegiatan atau tahapan dari siklus APBN untuk tiga tahun anggaran yang berbeda: (i) tahapan pemeriksaan dan pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya (2013), (ii) tahapan pelaksanaan APBN tahun berjalan (2014), dan (iii) tahapan perencanaan dan penganggaran serta penetapan APBN tahun anggaran berikutnya (2015) termasuk MTBF 2016 - 2018.

Gambar 1.2.
Keterkaitan Antar Siklus APBN



Di setiap tahapan siklus APBN, terdapat rangkaian aktivitas yang melibatkan masing-masing pemangku kepentingan pengelolaan APBN. Proses pengelolaan APBN juga dibatasi oleh jadwal atau *time frame* yang disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPR. Dari setiap rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan pada setiap jadwal yang telah ditetapkan tersebut dihasilkan keluaran (*output*) yang menjadi dasar penetapan *output* untuk setiap tahapan berikutnya sehingga menjadi APBN.

Pada pembahasan-pembahasan selanjutnya, dalam buku ini akan dijelaskan tahap demi tahap dari siklus pengelolaan APBN yang meliputi dasar hukum, pemangku kepentingan yang berkontribusi, *time frame*, bahan yang harus disiapkan serta *output* yang dihasilkan. Pembahasan juga akan mencakup aktivitas setelah APBN ditetapkan, yaitu penyampaian laporan semester dan prognosis, siklus penyusunan RAPBN Perubahan (RAPBN-P), dan siklus penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

BAB II

SIKLUS PENYUSUNAN APBN

Penyusunan RAPBN/APBN tahun tertentu, secara garis besar terdiri atas langkah-langkah: (1) *Review* Kerangka Penganggaran Jangka Panjang (*Long-term Budget Framework* – LTBF), Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (*Medium-term Budget Framework* – MTBF), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), (2) penyusunan konsep arahan Presiden yang kemudian akan menjadi konsep kebijakan fiskal (APBN), (3) perumusan usulan asumsi dasar ekonomi makro dan parameter APBN, dan (4) perumusan usulan besaran APBN (defisit, pendapatan, belanja, dan pembiayaan). Siklus penyusunan APBN pada tahap kegiatan perencanaan dan penganggaran sampai dengan penetapan APBN di setiap tahun anggaran secara ringkas diilustrasikan pada **Gambar 2.1**. Dalam Gambar tersebut, kegiatan-kegiatan yang dilakukan diilustrasikan dengan *output*-nya (misal, penyusunan “Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional” diilustrasikan sebagai Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional).

Siklus Penyusunan APBN



Gambar 2.1 menggambarkan bahwa penyusunan APBN tahun anggaran tertentu selambat-lambatnya sudah harus dimulai sejak satu tahun sebelumnya (contoh: penyusunan RAPBN 2014 mulai disiapkan sejak bulan Desember 2012) dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut: (i) diawali dengan review kebijakan dan besaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), *Long-term Budget Framework* (LTBF), dan *Medium-term Budget Framework* (MTBF) (ii) penetapan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional; (iii) Kementerian Keuangan menyusun konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan perkiraan kapasitas fiskal (*resource envelope*) untuk penyusunan Pagu Indikatif belanja K/L, dan kemudian bersama dengan Menteri Perencanaan menyusun Pagu Indikatif Belanja K/L yang kemudian dituangkan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai pedoman bagi K/L untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) K/L yang dalam proses penyusunannya dilakukan melalui tahap pertemuan tiga pihak (*trilateral meeting*) antara K/L, Kementerian Keuangan dan Kementerian

Perencanaan/Bappenas; (iv) Kemudian rancangan awal RKP ini beserta dengan pokok-pokok kebijakan fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro yang disusun oleh Kementerian Keuangan untuk kemudian dibahas bersama DPR dalam forum Pembicaraan Pendahuluan RAPBN; (v) hasil pembahasan tersebut bermuara pada penyusunan kebijakan fiskal dan Pagu Anggaran sebagai bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN beserta RUU-nya. Proses ini terus berlanjut pada rangkaian kegiatan selanjutnya sampai dengan penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan APBN (DIPA) setelah UU APBN Ditetapkan pada akhir bulan Oktober dan penyerahan DIPA oleh Presiden dilakukan pada bulan Desember.

Selanjutnya akan dibahas rincian aktivitas yang dilakukan pada setiap tahapan kegiatan, termasuk pemangku kepentingan yang terlibat, *timeframe*, dan *output* dari setiap aktivitas tersebut.

2.1. Arah Kebijakan Presiden

Penyusunan RAPBN untuk tahun direncanakan diawali dengan penetapan **Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional** oleh Presiden yang didasarkan pada hasil evaluasi kebijakan berjalan (sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga). Penetapan Arah Kebijakan ini dilakukan pada bulan Januari. Berdasarkan pasal 1 ayat 5 PP No.90 tahun 2010, Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga. Oleh karena itu, arah Kebijakan ini berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur. Penetapan Arah Kebijakan ini juga menjadi dasar awal dari penyusunan kebijakan fiskal dalam RAPBN untuk pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dengan DPR.

Penyusunan konsep arah kebijakan untuk tahun anggaran yang direncanakan dimulai sejak bulan November dua tahun sebelum tahun anggaran

berjalan. Misalnya, untuk arah kebijakan tahun anggaran 2014, maka penyusunan konsep arah kebijakan dimulai sejak bulan November 2012 sehingga dapat disampaikan oleh Presiden pada bulan Januari 2013. Dengan demikian, arahan tersebut didasarkan pada berbagai kondisi dan kebijakan yang terjadi di tahun 2012 dengan rencana di tahun 2013.

Menteri Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Anggaran memegang peranan penting dalam menyusun usulan konsep arah kebijakan tersebut. Kegiatan penyusunan konsep arah kebijakan diawali dengan inventarisasi berbagai arahan Presiden pada berbagai forum melalui berbagai dokumen risalah sidang kabinet, rapat terbatas, *retreat*, atau acara rapat pimpinan lainnya. Selanjutnya, rumusan arahan tersebut digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan dari penyusunan arah, prioritas, dan kebijakan tahun yang direncanakan dalam APBN-nya.

Berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan melalui inventarisasi dan klasifikasi arahan menurut tema dan bidang, kemudian diformulasikan konsep usulan arah kebijakan oleh Kementerian Keuangan (khususnya Direktorat Jenderal Anggaran). Konsep arah kebijakan Presiden untuk RAPBN yang merupakan bahan acuan untuk kebijakan umum RAPBN ini disampaikan sebagai usulan Menteri Keuangan kepada Presiden dalam sidang kabinet tentang persiapan penyusunan RAPBN tahun yang direncanakan. Tahapan penyusunan Arah Kebijakan beserta Pemangku Kepentingan dan *output* nya dideskripsikan dalam **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1.
Penetapan Arah Kebijakan Tahun 2014

No.	Kegiatan	Output	Keterangan
1.	Penyusunan Konsep Usulan Arah Presiden untuk RAPBN tahun t:	Usulan arahan Presiden, kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan RAPBN	Disampaikan kepada Menteri Keuangan
	a. Inventarisasi bahan arahan Presiden dari risalah sidang kabinet/rapat terbatas/retreat/ acara rapim lainnya	Hasil kesepakatan Konsep Arahan Presiden	Dipaparkan di Ditjen dalam Rapim DJA pada bulan November tahun t-2
	b. Klasifikasi arahan presiden menurut tema/bidang	Usulan tema RKP, Tema Kebijakan Fiskal, Strategi Kebijakan Fiskal dan Prioritas Aksi per Bidang	
	c. Formulasi konsep usulan arahan Presiden, kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional	Konsep usulan arahan Presiden RAPBN tahun t sebagai bahan acuan untuk Kebijakan umum RAPBN tahun t	Disampaikan Kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diusulkan dalam kesempatan sidang kabinet dan forum setingkat lainnya.
2.	Surat Menteri Keuangan tentang arahan kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional	Usulan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional.	Disampaikan kepada Presiden melalui Menko Perekonomian dan Wapres di bulan Januari
3.	Dengan mengakomodasi masukan dari <i>stakeholder</i> untuk arahan Presiden, hal tersebut merupakan draft kebijakan fiskal untuk RAPBN tahun yang direncanakan dan pertama kali dikomunikasikan dengan DPR dalam Pembicaraan Pendahuluan melalui KEM & PPKF.		

Contoh surat Menteri Keuangan kepada Presiden dan paparannya dalam sidang kabinet tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional disampaikan dalam **Lampiran I**.

2.2. Penyusunan Kebijakan Dan Kapasitas Fiskal RAPBN (*Resource Envelope*)

Output utama dari tahap ini adalah konsep surat Menteri Keuangan kepada Bappenas tentang resource envelope pagu indikatif K/L

Kapasitas fiskal (*resource envelope*) adalah proyeksi kemampuan keuangan negara yang dihimpun dari pendapatan negara untuk mendanai anggaran belanja negara. Setelah Presiden menetapkan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan, tahapan selanjutnya sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) PP No. 90 tahun 2010 adalah penyusunan perkiraan kapasitas fiskal (*resource envelope*) oleh Kementerian Keuangan untuk penyusunan Pagu Indikatif tahun anggaran yang direncanakan, yang harus dilakukan paling lambat pertengahan bulan Februari. Bersamaan dengan perkiraan kapasitas fiskal ini, juga dilakukan penyesuaian proyeksi RAPBN jangka menengah (ketika menyusun kapasitas fiskal 2014, dilakukan penyesuaian indikasi proyeksi RAPBN 2015-2016 (yang disusun ketika menyusun RAPBN 2013) dan penyusunan indikasi pagu tahun 2017). Dengan demikian, indikasi penganggaran jangka menengah tersebut akan selalu mengalami penyesuaian dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan kondisi yang diperkirakan mempengaruhinya.

Hal-hal tersebut dirangkum dalam sebuah postur RAPBN dalam rangka penyusunan pagu indikatif belanja K/L dan non K/L, yang akan ditindaklanjuti dengan surat dari Menteri Keuangan kepada Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas tentang kapasitas fiskal dalam rangka penyusunan pagu indikatif dan penerbitan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN mengenai pagu indikatif belanja K/L dan pagu indikatif belanja non K/L.

Penyusunan kapasitas fiskal ini dilakukan dengan memperhatikan dua komponen utama perencanaan, yaitu besaran *baseline* dan besaran *policy*

measures. Pada tahap awal perhitungan kapasitas fiskal dimulai dari penetapan asumsi dasar ekonomi makro dan beberapa parameter lainnya serta kinerja berbagai komponen APBN. Melalui tahap tersebut, dengan menggunakan metode perencanaan yang disepakati, akan dihasilkan besaran *baseline* dari berbagai komponen APBN. Tahap selanjutnya adalah identifikasi berbagai kebijakan APBN yang akan ditempuh, antara lain (1) kebijakan dari sisi belanja negara, (2) kebijakan defisit APBN, dan (3) kebijakan pendapatan dan pembiayaan anggaran. Selanjutnya, dua komponen utama perencanaan tersebut dikoordinasikan untuk menyusun proyeksi postur RAPBN yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan kapasitas fiskal (*resource envelope*) untuk penyusunan belanja negara. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam perhitungan kapasitas fiskal adalah: (i) kondisi ekonomi makro domestik dan internasional yang tercermin pada proyeksi asumsi dasar ekonomi makro dan beberapa parameter APBN untuk tahun anggaran yang direncanakan, (ii) potensi sumber-sumber pendapatan Negara dan hibah yang juga ditentukan oleh realisasi tahun-tahun sebelumnya dan kebijakan yang akan ditempuh, (iii) kebutuhan belanja Negara antara lain, untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan lainnya sekaligus kebijakan yang akan ditempuh, serta (iv) kemampuan pembiayaan anggaran dan kebijakan yang akan ditempuh.

Setelah dilakukan perhitungan awal yang menghasilkan besaran-besaran: (1) pendapatan negara *baseline* termasuk dampak turunannya terhadap belanja negara, (2) belanja negara *baseline* dan *policy measures* termasuk dampak turunannya terhadap belanja pendidikan, (3) perhitungan defisit dan (4) pembiayaan. Dengan demikian telah dihasilkan postur awal proyeksi RAPBN yang akan digunakan sebagai bahan awal untuk proses pembahasan selanjutnya.

a. Penyusunan Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Parameter APBN

Output dari tahapan ini adalah proyeksi asumsi dasar ekonomi makro yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan proyeksi Pendapatan Negara dan hibah, belanja negara (pusat KL/Non KL, dan transfer), dan proyeksi pembiayaan dalam proyeksi RAPBN.

Saat ini, asumsi dasar ekonomi makro terdiri atas 6 indikator utama yaitu (i) pertumbuhan ekonomi, (ii) inflasi, (iii) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, (iv) suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, (v) harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia's Crude Price/ICP*), dan (vi) *lifting* minyak Indonesia dan *lifting* gas. Selain asumsi dasar ekonomi makro, ditentukan juga parameter APBN seperti: (i) tingkat kemiskinan, (ii) tingkat pengangguran, (iii) volume konsumsi BBM, dan lain-lain.

Dalam penyusunan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro tahun anggaran yang direncanakan, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang diwakili oleh Direktorat Penyusunan APBN (Dit. P-APBN) dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (Dit. PNBP) melakukan pertemuan pendahuluan (*pre kick off meeting*) mengenai siklus diperlukannya asumsi dasar ekonomi makro dengan mengundang Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selanjutnya, BKF akan mengkoordinasikan penyusunan asumsi dasar ekonomi makro tersebut.

Sebagai ilustrasi, Jika tahun anggaran yang direncanakan adalah 2014, maka pertemuan tersebut dilaksanakan pada akhir November atau awal Desember tahun 2012. Pertemuan ini membahas mengenai: (i) Evaluasi realisasi asumsi dasar ekonomi makro APBN-P Tahun Anggaran 2012; (ii) Review asumsi dasar ekonomi makro APBN Tahun Anggaran 2013; (iii) Evaluasi asumsi dasar ekonomi makro Tahun Anggaran 2014 dalam Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (KPJM/Medium Term Budget Framework (MTBF)) RAPBN Tahun Anggaran 2012 dan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro Tahun Anggaran 2014, dan (iv) asumsi dasar ekonomi makro tahun 2015 - 2017. Dalam pembahasan tersebut juga dibahas latar belakang dari asumsi dasar ekonomi makro tersebut, baik terkait dengan kondisi berbagai indikator ekonomi makro domestik dan internasional maupun berbagai kebijakan terkait. Hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.

Dalam beberapa kasus, perumusan asumsi dasar ekonomi makro bisa bersamaan dengan proses RAPBNP yang dipercepat, sehingga bisa berlarut-larut penyelesaiannya karena ketetapan APBN-P tahun berjalan merupakan variable dari penyusunan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro tahun yang direncanakan. Selain itu, harus dibuat beberapa alternatif yang dituangkan dalam output berupa range, dan titik. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa *exercise* RAPBN dan MTBF terdiri dari banyak skenario. Namun demikian, angka hasil perhitungan kapasitas fiskal pada akhirnya akan ditetapkan dari hasil perhitungan yang paling konservatif, meskipun diperlukan beberapa antisipasi risiko.

Setelah ditentukan titik asumsi dasar ekonomi makro beserta parameternya, maka angka-angka asumsi dasar tersebut diinformasikan kepada masing-masing penanggung jawab penyusunan komponen RAPBN untuk dijadikan dasar penyusunan proyeksi Pendapatan Negara dan hibah, belanja negara (pusat KL/Non KL, dan transfer), dan proyeksi pembiayaan.

Selanjutnya, dalam **Tabel 2.2** dijelaskan mengenai asumsi-asumsi dasar ekonomi makro beserta beberapa parameter APBN yang dibahas dalam pertemuan tersebut serta pemangku kepentingan dari asumsi dasar ekonomi makro dan parameter tersebut.

Tabel 2.2.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Parameter APBN beserta Pemangku Kepentingannya

Asumsi dan Parameter	Pemangku Kepentingan
Asumsi	
Pertumbuhan Ekonomi	BKF, Bappenas, BPS, BI
Inflasi	BPS dan BI
Nilai Tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat	BI
Suku bunga SPN 3 bulan	BKF
Harga minyak mentah Indonesia (ICP)	Kementerian ESDM
<i>Lifting</i> minyak Indonesia dan <i>lifting</i> gas	Kementerian ESDM dan SKK Migas (d/h BP Migas)

Parameter	
Tingkat kemiskinan	BPS, Bappenas
Tingkat pengangguran	BPS, Bappenas
Volume Konsumsi BBM	Kementerian ESDM, BPH Migas
Alpha BBM (Rp/liter)	Kementerian ESDM
Growth Sales (%)	Kementerian ESDM
Energy Sales (TWH)	Kementerian ESDM
Losses (%)	Kementerian ESDM
Fuel Mix	Kementerian ESDM
Volume dan harga Beras raskin, rumah tangga sasaran (RTS) penerima	Perum Bulog, TNP2K, BPS
Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan besaran iuran per peserta	BPJS/Kementerian Kesehatan, TNP2K
Harga dan volume Pupuk bersubsidi	Kementerian Pertanian
Harga dan volume Benih bersubsidi	Kementerian Pertanian

b. Penyusunan Proyeksi Pendapatan Negara dan Hibah

Output dari tahapan ini adalah angka proyeksi pendapatan negara dan hibah yang digunakan dalam proyeksi RAPBN.

Menurut pasal 11 ayat (3) UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pendapatan Negara terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Dalam penjelasan pasal 11 ayat (3), disebutkan bahwa dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai. Sesuai dengan struktur pendapatan Negara dan hibah yang baru, penerimaan perpajakan terdiri atas Pajak Dalam Negeri berupa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pajak sehubungan perdagangan internasional yang meliputi bea masuk dan bea keluar. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan SDA nonmigas, bagian Pemerintah atas laba BUMN, penerimaan PNBP lainnya, serta penerimaan Badan Layanan Umum (BLU).

Sebagai pengelola fiskal Menteri Keuangan menugaskan unit-unit eselon 1 (satu) dibawahnya untuk bertanggungjawab atas pengelolaan pendapatan negara dan hibah. Direktorat Jenderal Pajak bertanggungjawab mengelola penerimaan perpajakan khususnya penerimaan pajak penghasilan non migas, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pajak bumi dan bangunan, serta pajak lainnya.

Secara umum penyusunan proyeksi pendapatan negara selain memperhatikan realisasi pendapatan negara tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan realisasi tahun berjalan juga memperhitungkan pengaruh asumsi dasar ekonomi makro yang telah disepakati (sesuai poin a di atas) dan realisasi asumsi dasar ekonomi makro tahun-tahun sebelumnya serta rencana kebijakan di bidang pendapatan negara.

Hampir semua jenis proyeksi pendapatan negara, khususnya penerimaan perpajakan sangat dipengaruhi oleh asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan. Hubungan masing-masing jenis pendapatan negara dengan asumsi dasar ekonomi makro disajikan pada **tabel 2.3** berikut.

Tabel 2.3.
Jenis Pendapatan Negara dan
Variabel Ekonomi Makro yang mempengaruhinya

Pendapatan Negara	Variabel Ekonomi Makro Penentu				
	Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Nilai Tukar	Harga Minyak Mentah	Lifting Minyak
1. Pajak Penghasilan non-Migas	√	√	√	-	-
2. Pajak Penghasilan Migas	-	-	√	√	√
3. Pajak Pertambahan Nilai	√	√	√	-	-
4. Pajak Bumi dan Bangunan	√	√	√	-	-
5. Cukai	√	-	-	-	-
6. Pajak lainnya	√	√	-	-	-
7. Bea Masuk	√	-	√	-	-

8. Bea Keluar	√	-	√	-	-
9. Penerimaan SDA Minyak Bumi	-	-	√	√	√
10. Penerimaan SDA Gas Bumi	-	-	√	√	√

Penyusunan proyeksi pendapatan negara dan hibah dilakukan oleh unit-unit yang bertanggungjawab atas masing-masing jenis pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk itu, setelah asumsi dasar ekonomi makro disepakati, pada pekan keempat bulan Desember 2012 sampai dengan pekan kedua bulan Januari 2013, Dit. P-APBN melakukan kegiatan dalam rangka penyusunan proyeksi pendapatan negara dan hibah dengan menyampaikan surat kepada unit-unit terkait untuk memperoleh proyeksi outlook APBN TA 2013 dan RAPBN Tahun Anggaran 2014 dan *medium term budget framework* (MTBF) 2015 – 2017 yang terdiri atas:

1. Proyeksi Penerimaan perpajakan termasuk kebijakan yang akan ditempuh kepada Badan Kebijakan Fiskal, yang akan diselaraskan dengan DJP dan DJBC;
2. Proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak termasuk kebijakan yang akan ditempuh kepada Dit. PNBP – DJA;
3. Proyeksi Pendapatan Hibah termasuk kebijakan yang akan ditempuh kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU);
4. Identifikasi usulan kebijakan dan parameter yang akan digunakan dan dampaknya terhadap besaran-besaran komponen APBN.

Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari berbagai unit tersebut dikompilasi oleh Dit. PAPBN dan dituangkan dalam bentuk tabel pendapatan negara dan hibah yang terdiri dari tabel penerimaan perpajakan, tabel penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan tabel penerimaan hibah. Tabel tersebut merupakan bagian dari struktur tabel postur RAPBN secara keseluruhan. Sebagai catatan, besaran proyeksi pendapatan dan hibah ini akan secara otomatis mempengaruhi belanja Negara khususnya Transfer ke Daerah yaitu: Dana Bagi

Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), dana Otonomi Khusus yang secara otomatis pula akan mempengaruhi anggaran pendidikan. Hal tersebut terjadi karena komponen transfer tersebut merupakan fungsi (ditentukan) dari pendapatan negara. Angka-angka pendapatan tersebut masih bisa berubah ketika ada kebijakan (*pollicy measures*), seperti naik ketika ada kebijakan menaikkan target penerimaan dan turun ketika ada kebijakan pemberian insentif perpajakan.

c. Penyusunan Proyeksi Belanja Negara

Output dari tahapan ini adalah angka proyeksi kebutuhan belanja Negara, kebijakan dan paramenternya yang direncanakan dalam RAPBN.

Selain melakukan proyeksi pendapatan negara dan hibah, pada waktu bersamaan, Dit.P-APBN juga mengkoordinasikan penyusunan usulan kebijakan dan *exercise* belanja negara pada pekan kesatu sampai dengan pekan ketiga bulan Januari. Dalam proses ini, terkait penyusunan proyeksi RAPBN 2014 dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja belanja negara tahun anggaran 2012 yang kemudian berdasarkan hasil evaluasi tersebut disusun prognosis tahun anggaran 2013 oleh Dit. P-APBN yang akan digunakan sebagai dasar acuan penyusunan proyeksi RAPBN 2014. Sama halnya dengan pendapatan negara, secara umum proyeksi belanja negara selain memperhatikan realisasi belanja negara tahun-tahun sebelumnya, juga memperhitungkan pengaruh asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan beserta risikonya, berbagai parameter belanja negara serta kebijakan-kebijakan yang diusulkan untuk ditempuh di bidang belanja Negara beserta risikonya.

Pada tahap awal, berdasarkan berbagai faktor penentunya Dit P-APBN menyusun proyeksi besaran belanja negara per jenis belanja, yaitu belanja pegawai (baik yang dianggarkan di K/L maupun non K/L), belanja barang (K/L), belanja modal (K/L), pembayaran bunga utang (non K/L), subsidi (non K/L), belanja hibah (non K/L), bantuan sosial (K/L dan non K/L) dan belanja lain-lain

(non K/L), serta dilengkapi dengan transfer ke daerah yang sebagian sudah mulai terindikasi ketika menyusun proyeksi pendapatan negara.

Belanja negara yang dihasilkan, dapat dikelompokkan menjadi belanja K/L (kementerian negara/lembaga) dan Belanja non K/L (pembayaran Bunga Utang, Subsidi, belanja pegawai (kontribusi sosial, Dana transito), Bantuan Sosial (Dana darurat/penanggulangan bencana alam), belanja lain-lain (Kebutuhan mendesak (*emergency*), Cadangan untuk mengantisipasi perubahan kebijakan (*policy measures*), transfer ke daerah, dan cadangan risiko fiskal. Belanja juga dapat dikelompokkan ke dalam belanja *nondiscretionary* (belanja wajib) seperti belanja pegawai, barang operasional, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, dan beberapa belanja lainnya, maupun belanja *discretionary* (tidak wajib) seperti bantuan sosial, belanja barang nonoperasional dan belanja modal. Dari kapasitas fiskal yang dihasilkan dilakukan exercise alokasi untuk: (1) Belanja *nondiscretionary* dan (2) Belanja *discretionary*. Proyeksi kapasitas fiskal yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Perencanaan utamanya menjelaskan mengenai kapasitas fiskal yang tersedia bagi pagu indikatif belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) yang meliputi angka baseline yang menampung kebutuhan untuk belanja operasional (belanja pegawai dan belanja barang operasional) serta biaya non-operasional dan potensi anggaran untuk insiatif baru beserta indikasi penggunaannya. Selanjutnya, dijelaskan pula jumlah ruang fiskal yang tersedia untuk kegiatan prioritas dengan kriteria: (i) memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang belum tercapai, dan (ii) inisiatif baru yang didasarkan pada arahan Presiden seperti hasil Sidang Kabinet atau memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Instruksi Presiden atau Keputusan Presiden. Selanjutnya tahapan penyusunan kapasitas fiskal dijelaskan sebagai berikut.

Proyeksi kebutuhan belanja per jenis (klasifikasi ekonomi) yang dapat merupakan kajian belanja K/L maupun Non-K/L, dilakukan dengan lebih dulu memberikan alokasi belanja untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat wajib (*nondiscretionary*) seperti belanja pegawai (gaji dan tunjangan serta kontribusi

social/iuran asuransi kesehatan dan pensiun), belanja barang operasional, subsidi, pembayaran bunga utang, serta memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi (kurang bayar) pada tahun-tahun sebelumnya (contoh : kurang bayar tunjangan profesi guru, kurang bayar subsidi).

Jumlah alokasi yang dihasilkan dari proses tersebut kemudian dibandingkan dengan sumber pendanaan yang tersedia melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Identifikasi sumber-sumber pendanaan dari tiap-tiap jenis belanja yang sumber pendanaannya sudah tersedia secara *earmark*, yaitu: PHLN, PNBP, BLU, SBSN.
2. Komponen belanja yang sumber pendanaannya belum terpenuhi dari tahap 1, akan dipenuhi dari rupiah murni (RM) yaitu kapasitas fiskal neto yang tersedia
3. Bila terdapat kebutuhan yang belum tersedia pendanaannya (dalam batasan defisit yang disepakati akan dipenuhi dari pendanaan yang diidentifikasi tahap selanjutnya.
4. Namun apabila setelah tahap 3 diselesaikan masih terdapat dana yang tersedia, maka akan diexercise untuk dialokasikan pada belanja prioritas, anggaran antisipasi krisis atau pengurangan defisit. Namun bila justru sebaliknya terdapat kekurangan maka akan dilakukan identifikasi sumber pendanaan melalui langkah-langkah: (a) pengurangan alokasi/realokasi belanja, (b) identifikasi sumber pendapatan tambahan, atau (c) identifikasi sumber pembiayaan tambahan, atau (d) kombinasi dari ketiganya

Selanjutnya proyeksi masing-masing jenis belanja tersebut dikompilasi dalam tabel potensi belanja alokasi pemerintah pusat. Tabel tersebut berisi informasi mengenai proyeksi total kebutuhan masing-masing jenis belanja baik yang merupakan bagian dari belanja K/L maupun Non-K/L, sehingga dari tabel tersebut kita dapat mengetahui besaran belanja per masing-masing jenis belanja, total belanja K/L maupun Non-K/L, serta Total proyeksi belanja pemerintah pusat dan total anggaran pendidikan. Sementara itu, transfer ke

daerah disajikan dalam tabel tersendiri. Tabel belanja pemerintah pusat tersebut merupakan gambaran kapasitas (potensi) fiskal untuk belanja negara.

Tabel 2.4.
Belanja Pemerintah Pusat, 2014

1. Belanja Pegawai
- KL
- RM
- PNBP
- Non KL
2. Belanja Barang
- KL
- Non KL
3. Belanja Modal
- KL
- Non KL
4. Pembayaran Bunga Utang
a. Dalam Negeri
b. Luar Negeri
5. Subsidi
a. Energi
b. Non Energi
6. Belanja Hibah
7. Bantuan Sosial
- KL
- Non KL
8. Belanja Lain-Lain

Kemudian, Dit. P-APBN melakukan koordinasi melalui rapat maupun surat dengan masing-masing pemangku kepentingan untuk membahas proyeksi kebutuhan Belanja, dan kebijakan serta Parameternya. Secara lebih rinci gambaran penyusunan proyeksi belanja K/L dan Non-K/L disajikan dalam uraian berikut.

1. Penyusunan Proyeksi Indikasi Kebutuhan belanja K/L

Output dari tahapan ini adalah angka proyeksi kebutuhan belanja K/L, kebijakan dan parameternya yang direncanakan dalam RAPBN.

APBN disusun dan direncanakan dengan mengacu kepada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun dan ditetapkan pemerintah beserta DPR setiap tahunnya. RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas pembangunan, kerangka ekonomi makro serta program-program Kementerian Negara/Lembaga (K/L), lintas K/L, dan lintas wilayah. Oleh karena itu, anggaran belanja K/L yang dialokasikan dalam APBN ditujukan untuk mendukung tercapainya prioritas-prioritas pembangunan dalam RKP yang tercermin dalam program K/L dimaksud.

Pada tahap ini, proses penyusunan proyeksi RAPBN telah memberikan indikasi (a) total belanja per jenis, (b) total belanja K/L, dan (c) total belanja non K/L. Langkah selanjutnya adalah merumuskan anggaran belanja *baseline* per K/L dengan mekanisme yang mirip dengan penyusunan proyeksi belanja total per jenis. Langkah ini menghasilkan indikasi belanja *baseline* per K/L dan total belanja *baseline* K/L, yang selanjutnya akan dihitung banding dengan potensi belanja K/L total. perhitungan banding tersebut akan memberikan info: (a) bila potensi belanja *baseline* masih kecil daripada potensi belanja K/L total, maka akan ada potensi untuk *new initiatives*, (b) bila potensi belanja *baseline* sama dengan potensi belanja K/L total, maka tidak ada potensi untuk *new initiatives* (c) bila potensi belanja *baseline* lebih besar daripada potensi belanja K/L total, maka akan ada potensi untuk pemotongan dan atau realokasi belanja *baseline* K/L. Dalam rangka menyusun proyeksi anggaran belanja K/L, Dit. P-APBN melakukan koordinasi dengan Koordinator penyusunan Pagu Indikatif K/L (Dit. Anggaran I, Dit. Anggaran II Dit. Anggaran III), Dit PNBP, Dit Harmonisasi Peraturan Penganggaran serta Dit. Sistem Penganggaran.

Pagu *baseline* belanja K/L merupakan alokasi anggaran belanja K/L yang menampung kebutuhan untuk belanja operasional (belanja pegawai dan

belanja barang operasional) seperti gaji dan tunjangan serta kontribusi social (iuran asuransi kesehatan dan pensiun), serta memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi (kurang bayar) pada tahun-tahun sebelumnya. Sumber pendanaan dari alokasi belanja K/L baseline adalah dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), PHLN, dan rupiah murni.

Selain itu, untuk mengklasifikasikan usulan kebijakan dan parameter yang akan ditempuh dalam tahun yang direncanakan terkait proyeksi masing-masing jenis belanja K/L, Dit PAPBN juga melakukan koordinasi dengan institusi di luar Ditjen Anggaran, di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, Bappenas, Ditjen Perbendaharaan, dan Badan Kebijakan Fiskal.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut, Dit.P-APBN menyusun *exercise* besaran Belanja KL per Jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan Bantuan Sosial.

Sebagaimana disampaikan pada pembahasan sebelumnya, proses penyusunan belanja K/L, diawali dengan penghitungan kebutuhan fiskal untuk menyusun besaran total belanja K/L di Direktorat Penyusunan APBN. Penyusunan besaran kebutuhan belanja K/L antara lain memperhitungkan realisasi belanja tahun sebelumnya, perubahan parameter, dan kebijakan yang diambil untuk tahun anggaran yang direncanakan misalnya: tingkat kenaikan gaji berkala PNS (belanja pegawai), penghematan belanja barang, belanja modal yang mendukung kualitas pembangunan infrastruktur, pelaksanaan Program Keluarga Harapan, (RTS dan *unit costnya*) dan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (RTS dan *unit costnya*) dan lain-lain.

Sementara itu, dalam waktu yang sama Direktorat Anggaran I, II, dan III menyiapkan data perkiraan kebutuhan dasar (*baseline*) belanja pada

masing-masing K/L sesuai bidang tugasnya. Kemudian, hasil perhitungan anggaran I, II, dan III tersebut digabung menjadi total kebutuhan *baseline* belanja K/L oleh koordinator pagu indikatif yang ditunjuk Dirjen Anggaran.

Selanjutnya, dilakukan pembahasan antara Direktorat P-APBN dengan Koordinator pagu indikatif. Dalam hal usulan dari Direktorat Anggaran I, II, dan III melebihi besaran kapasitas fiskal belanja K/L yang disusun oleh Dit. P-APBN, maka usulan tersebut harus disesuaikan sehingga tidak melebihi kapasitas fiskal. Namun jika kapasitas fiskal ternyata lebih besar dari usulan belanja K/L, maka usulan tersebut dijadikan sebagai angka dasar (*baseline*), sementara selisih lebih antara kapasitas fiskal dengan usulan belanja K/L menjadi potensi angka inisiatif baru (*new initiative*).

Besaran potensi *baseline* dan potensi *new initiative* tersebut merupakan diskusi dengan Bappenas untuk penyusunan pagu indikatif. Oleh karena itu, baik potensi *baseline* maupun potensi *new initiative* dapat mengalami penyesuaian dalam pagu indikatif-nya.

2. Penyusunan Proyeksi Indikasi Kebutuhan Dana Bendahara Umum Negara (belanja Non K/L)

Output dari tahapan ini adalah angka proyeksi kebutuhan belanja BUN (belanja Non K/L), kebijakan dan parameternya yang direncanakan dalam RAPBN.

Menteri Keuangan merupakan pejabat yang diberikan tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Negara. Pada awal tahun, Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menyusun indikasi kebutuhan dana pengeluaran Bendahara Umum Negara untuk tahun anggaran yang direncanakan dengan memperhatikan prakiraan maju dan rencana strategis yang telah disusun. Berdasarkan PP No.90 tahun 2010, yang dimaksud dengan belanja BUN atau belanja Non K/L adalah: pembayaran Bunga Utang, Subsidi, belanja pegawai (kontribusi sosial, Dana transito), Bantuan Sosial (Dana darurat/penanggulangan bencana alam), belanja lain-lain (Kebutuhan mendesak (*emergency*), Cadangan untuk mengantisipasi

perubahan kebijakan (*policy measures*), transfer ke daerah, dan cadangan risiko fiskal.

Belanja BUN juga dapat dikelompokkan ke dalam belanja *nondiscretionary* (wajib) seperti belanja subsidi dan pembayaran bunga utang serta belanja *discretionary* (tidak wajib) seperti sebagian alokasi belanja lain-lain.

Dalam *melaksanakan* fungsi bendahara umum Negara tersebut, Menteri Keuangan merupakan pengguna anggaran bendahara umum Negara yang menetapkan unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN). Berdasarkan PMK Nomor 247 tahun 2012 tentang Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi, dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara, unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan sebagai PPA belanja BUN adalah sebagai berikut:

1. DJPU ditetapkan sebagai PPA BUN Pengelolaan Utang (Bagian Anggaran 999.01) dan PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02);
2. DJPK sebagai PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah (Bagian Anggaran 999.05);
3. DJA ditetapkan sebagai PPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07) dan PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08)

Sedangkan PPA belanja BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999.99) ditetapkan sesuai dengan jenis transaksi khusus yang dikelolanya dengan rincian sebagai berikut:

1. BKF, antara lain untuk pengeluaran yang terkait dengan keperluan hubungan internasional dan pembayaran kontribusi fiskal pemerintah dalam bentuk dukungan kelayakan;
2. DJPb, antara lain untuk pengelolaan pembayaran belanja pensiun, belanja asuransi kesehatan veteran, belanja asuransi kesehatan

PNS/TNI/POLRI, dan belanja pembayaran utang *unfunded past service liability*.

Pada awal tahun anggaran berjalan, PPA BUN menyusun indikasi kebutuhan dana masing-masing Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang dapat direncanakan untuk tahun anggaran yang direncanakan. Indikasi kebutuhan dana tersebut disusun dengan mempertimbangkan Prakiraan Maju dan Rencana Strategis yang telah disusun. Indikasi kebutuhan dana ini digunakan sebagai dasar penyusunan indikasi kebutuhan dana pengeluaran bendahara umum Negara yang harus disampaikan oleh PPA BUN kepada Menteri Keuangan c.q. DJA paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Indikasi kebutuhan Bendahara Umum Negara tersebut menjadi salah satu bagian dari usulan belanja negara yang akan dilakukan *exercise* dan pembahasan dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal oleh Dit. P-APBN setelah berkoordinasi dengan Direktorat Anggaran III.

Selanjutnya Dit. P-APBN mengundang masing-masing PPA BUN untuk mengkonfirmasi dan membahas usulan indikasi anggaran belanja tersebut dan menyesuaikan dengan kapasitas fiskal belanja Non-KL yang sebelumnya telah disusun oleh Dit. P-APBN.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut, Dit. P-APBN menyusun *exercise* besaran Belanja BUN (non K/L) yang terdiri dari belanja pegawai (kontribusi sosial dan dana transito), Bantuan Sosial (Dana darurat/penanggulangan bencana alam), belanja lain-lain (Kebutuhan mendesak (*emergency*), Cadangan untuk mengantisipasi perubahan kebijakan (*policy measures*), serta transfer ke daerah.

d. Penyusunan Proyeksi Pembiayaan Anggaran

Output dari tahapan ini adalah angka proyeksi pembiayaan APBN, kebijakan dan parameternya yang direncanakan dalam RAPBN.

Proyeksi pembiayaan terdiri dari sumber penerimaan pembiayaan dan kebutuhan pengeluaran pembiayaan atau terdiri dari penerimaan pembayaran

dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan nonutang dan penerimaan pembiayaan utang. Penerimaan pembiayaan nonutang bersumber dari penerimaan cicilan pengembalian Rekening Dana Investasi (RDI/SLA), Sisa Anggaran Lebih, Rekening Kas Umum Negara (RKUN), Rekening Pembangunan Hutan (RPH), rekening cadangan reboisasi, rekening Pemerintah lainnya, privatisasi dan Hasil Pengelolaan Aset (HPA). Sedangkan penerimaan pembiayaan utang bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN) (neto), penarikan pinjaman luar negeri (bruto), dan pinjaman dalam negeri (neto). Sementara itu, pengeluaran pembiayaan bersumber dari pengeluaran utang dan pengeluaran nonutang. Pengeluaran pembiayaan nonutang digunakan untuk dana investasi Pemerintah dan Penyertaan Modal Negara (PMN), dana pengembangan pendidikan nasional, dan kewajiban penjaminan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan utang meliputi penerusan pinjaman, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Secara ringkas, jenis sumber pembiayaan dan kebutuhan pengeluaran pembiayaan dijelaskan dalam matriks berikut ini:

Penerimaan Pembiayaan		Pengeluaran Pembiayaan	
Nonutang	Utang	Nonutang	Utang
1. Penerimaan cicilan pengembalian Rekening Dana Investasi (RDI/SLA); 2. Sisa Anggaran Lebih; 3. Rekening Kas Umum Negara (RKUN); 4. Rekening Pembangunan Hutan (RPH); 5. Rekening Cadangan	1. Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN); 2. Penarikan pinjaman luar negeri; dan 3. Pinjaman Dalam Negeri.	1. Dana Investasi Pemerintah dan Penyertaan Modal Negara (PMN); 2. Dana pengembangan pendidikan nasional; dan kewajiban penjaminan.	1. Penerusan Pinjaman; dan 2. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

Reboisasi; 6. Rekening Pemerintah lainnya; dan 7. Privatisasi dan Hasil Pengelolaan Aset (HPA).			
--	--	--	--

Selain penyusunan proyeksi pendapatan, hibah, dan belanja, dalam proses penyusunan kapasitas fiskal juga memerlukan proyeksi pembiayaan anggaran yang secara total merupakan konsekuensi dari adanya defisit dan secara rinci merupakan konsekuensi dari posisi ketersediaan sumber-sumbernya. Oleh karena itu, pada pekan pertama dan kedua di bulan Februari, Dit. P-APBN melakukan penyusunan usulan kebijakan dan *exercise* Pembiayaan Anggaran RAPBN.

Seluruh Pos dalam Pembiayaan merupakan bagian dari anggaran BUN. Oleh karena itu, sama halnya dengan belanja BUN penyusunannya mengacu kepada PMK Nomor 247 tahun 2012 tentang Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi, dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara, unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan sebagai PPA pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. DJPU ditetapkan sebagai PPA BUN Pengelolaan Utang (Bagian Anggaran 999.01) dan PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02);
2. DJKN ditetapkan sebagai PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran 999.03);

Di samping itu, unit lainnya yang terkait dalam rangka penyusunan proyeksi pembiayaan anggaran ini adalah Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, Dan Direktorat Anggaran III di lingkungan DJA, BKF, DJPb, dan DJPK

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan proyeksi pembiayaan Negara ini meliputi:

- a. Identifikasi kebutuhan dan sumber pembiayaan;
- b. Koordinasi/rapat/surat dengan pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan usulan Kebijakan Pembiayaan Anggaran dan Parameternya;
- c. Menyusun *exercise* besaran Pembiayaan Anggaran; dan
- d. Konfirmasi hasil *exercise* SBN, pinjaman proyek, pinjaman program, SAL, HPA, penerusan pinjaman, dan cicilan pokok.

Selanjutnya, Dit PAPBN menyusun dan merangkum data proyeksi pembiayaan tersebut dalam supporting table pembiayaan negara.

e. Penyusunan Postur RAPBN dalam rangka Penyusunan Kapasitas Fiskal

Output dari tahapan ini adalah Postur RAPBN, kebijakan dan parameternya yang direncanakan dalam RAPBN.

Setelah memperoleh bahan mengenai proyeksi asumsi dasar ekonomi makro beserta parameternya, proyeksi pendapatan dan hibah, belanja pemerintah pusat dan bendahara umum Negara, serta pembiayaan, maka langkah selanjutnya, DJA dalam hal ini diwakili oleh Dit. P-APBN melakukan penyusunan postur RAPBN Tahun Anggaran 2014 diawali dengan merangkum semua proyeksi dari mulai pendapatan sampai dengan pembiayaan dalam sebuah postur I-Account. Penyusunan postur dalam tahap tersebut akan menghasilkan postur awal. Penyusunan postur tersebut bukan hanya hasil kompilasi dari hasil proyeksi yang ada pada masing-masing komponen perpajakan, PnBP maupun belanja, namun juga menyangkut pengelolaan berbagai formula internal postur, seperti formula dampak transfer ke daerah (dana bagi hasil, dana alokasi umum) dan formula dampak anggaran pendidikan, serta formula dampak terhadap deficit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan (SILPA/SIKPA).

Kemudian postur awal RAPBN tersebut dikoordinasikan dengan instansi terkait, yang meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan *exercise* postur RAPBN dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal pada tingkat eselon II pada pekan kedua Februari. Dalam tahap ini, dilakukan koordinasi antara masing-masing subdirektorat di lingkungan Dit. P-APBN dengan instansi terkait yang meliputi:
 - a. Konfirmasi mengenai defisit beserta kebijakannya dengan BKF;
 - b. Konfirmasi mengenai asumsi dasar ekonomi makro beserta parameternya berikut kebijakannya dengan BKF, BPS, Kementerian ESDM, dan Bappenas;
 - c. Konfirmasi mengenai pendapatan dan hibah beserta kebijakannya dengan Dit. PNBP, DJP, DJBC dan DJPU;
 - d. Konfirmasi mengenai belanja K/L beserta kebijakannya dengan Dit. Anggaran I, II, III;
 - e. Konfirmasi mengenai belanja Non K/L beserta kebijakannya dengan para PPA BUN; dan
 - f. Konfirmasi mengenai pembiayaan beserta kebijakannya dengan BKF, DJPK, DJPU dan DJPb.
2. Postur RAPBN yang dihasilkan dari *exercise* di Dit. PAPBN setelah melalui tahapan konfirmasi tersebut kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran pada rentang waktu yang sama, yaitu pekan kedua Februari. Pada tahap ini, Dirjen Anggaran melakukan harmonisasi kebijakan dan besaran APBN, usulan penggunaan SILPA/cara menutup SIKPA sehingga postur pada akhir tahap ini sudah tidak mengandung SILPA/SIKPA lagi.
3. Postur RAPBN hasil *exercise* dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal tersebut kemudian dibahas pada tingkat eselon I di pekan kedua Februari, dan sekali lagi Dit. P-APBN melakukan konfirmasi mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Konfirmasi mengenai defisit dengan BKF;
 - b. Konfirmasi mengenai asumsi dasar ekonomi makro dengan BKF;
 - c. Konfirmasi mengenai pendapatan dengan BKF, DJP dan DJBC;

- d. Konfirmasi mengenai belanja Negara dengan Dit. Anggaran I, Dit. Anggaran II, dan Dit. Anggaran III di lingkungan DJA; dan
- e. Konfirmasi mengenai pembiayaan dengan BKF, DJPU dan DJPb.

Pada tahap ini pembahasan masih mungkin menimbulkan perubahan kebijakan dan postur proyeksi RAPBN

4. Postur ini selanjutnya disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran kepada Menteri Keuangan untuk dibahas di dalam Rapat Pimpinan antar unit eselon I yang dipimpin oleh Menteri Keuangan. Dalam kesempatan rapat pimpinan ini, dibahas juga besaran defisit yang akan dicapai. Jika defisit ditetapkan diperbesar atau diperkecil, maka dilakukan *exercise* kembali sebelum dibahas pada sidang kabinet. Exercise kembali yang dilakukan bisa merubah sisi pendapatan, belanja, defisit maupun pembiayaan. Tabel di bawah ini menggambarkan secara ringkas postur hasil *exercise* dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal:

Tabel 2.5
Postur Dalam Rangka Penyusunan Kapasitas Fiskal

APBN 2014 (dalam triliun rupiah)	
Uraian	2014
	Surat Res.Env ke Bappenas
A. PENDAPATAN NEGARA	1,754,499.1
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1,752,649.2
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1,368,908.6
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	383,740.6
II. PENERIMAAN HIBAH	1,849.9
B. BELANJA NEGARA	1,876,991.3
I Belanja Pemerintah Pusat	1,270,424.5
1. Belanja K/L	547,103.3
2. Belanja Non KL	723,321.2
a.l - Subsidi BBM, LPG & BBN	256,537.9
II. TRANSFER KE DAERAH	606,566.8
1. Dana Perimbangan	503,481.1
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	103,085.8
Total Anggaran Pendidikan	375.4
Rasio Anggaran Pendidikan Total (%)	20.0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	201.9
D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(122,492.2)
% Defisit terhadap PDB	(1.19)
E. PEMBIAYAAN (I + II)	122,492.2
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	145,209.8
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	(22,717.6)
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN	(0.0)

5. Selanjutnya, Menteri Keuangan menyampaikan postur RAPBN kepada Presiden untuk dibahas pada sidang kabinet. Sekali lagi, besaran defisit ditentukan apakah diperbesar atau diperkecil. Jika telah ditentukan, maka Dit. P-APBN kembali melakukan *exercise* untuk penyusunan postur RAPBN.

Hasil Sidang Kabinet tentang postur merupakan dasar penyusunan surat Menteri Keuangan ke Bappenas

f. Penyampaian Kapasitas Fiskal (*Resource Envelope*) kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

Output dari tahapan ini dokumen surat Menteri Keuangan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai resource envelope pagu indikatif RAPBN.

Berdasarkan postur yang Dit. P-APBN menyiapkan konsep surat Direktur Jenderal Anggaran kepada Menteri Keuangan mengenai *Resource Envelope* Pagu Indikatif Belanja K/L RAPBN tahun anggaran yang direncanakan. Konsep surat tersebut disiapkan dan disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran kepada Menteri Keuangan beserta konsep surat Menteri Keuangan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas di pekan keempat Februari.

Selanjutnya, konsep surat Menteri Keuangan mengenai penyampaian *resource envelope* yang telah disiapkan disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas pada pekan kedua di bulan Maret. Dalam surat mengenai kapasitas fiskal tersebut dijelaskan secara tegas mengenai peruntukan pagu indikatif sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Selanjutnya, surat tersebut juga berisi lampiran yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional tahun anggaran yang direncanakan;
- b. Lampiran II : Proyeksi Resource Envelope RAPBN tahun anggaran yang direncanakan;
- c. Lampiran III : Baseline Belanja Kementerian Negara/Lembaga tahun anggaran yang direncanakan per Jenis Belanja;
- d. Lampiran IV : Proyeksi Anggaran Pendidikan tahun anggaran yang direncanakan;
- e. Lampiran V : Pinjaman Luar Negeri Kementerian Negara/Lembaga tahun anggaran yang direncanakan;
- f. Lampiran VI : Rencana Penarikan Hibah Luar Negeri ;

- g. Lampiran VII : Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (PBS);
- h. Lampiran VIII : Pagu Penggunaan PNB/BLU Kementerian Negara/Lembaga tahun anggaran yang direncanakan; dan
- i. Lampiran IX : Kontrak Tahun Jamak.

Dalam rangka penyusunan surat kapasitas fiskal Menteri Keuangan kepada Menteri PPN, Dit. P-APBN juga berkoordinasi dengan Direktorat terkait di lingkungan DJA terutama: (i) Dit. PNB/BLU untuk keandalan data-data pada Lampiran I, II, dan III; (ii) Direktorat Anggaran I, II, dan III untuk keandalan data-data pada Lampiran I, II, III, IV, V, VI, dan IX; (iv) Direktorat Harmonisasi dan Peraturan Penganggaran (Dit. HPP) dan Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) terkait data-data pada Lampiran I. Untuk RAPBN tahun 2014, surat Menteri Keuangan yang disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas tertanggal 13 Maret 2013.

Contoh surat Menteri Keuangan Kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai *resource envelope* dapat dilihat pada **Lampiran II**.

Secara ringkas, proses kegiatan penyusunan kapasitas fiskal dan kebijakan APBN dideskripsikan dalam **Tabel 2.6**. Dari tabel tersebut dapat dilihat uraian kegiatan penyusunan kapasitas fiskal, pemangku kepentingan, jadwal kegiatan, serta keluaran (*output*) yang dihasilkan dari setiap kegiatan.

Tabel 2.6.
Penyusunan Kapasitas Fiskal dan Kebijakan APBN

No.	Uraian	Pemangku Kepentingan	Output	Keterangan
1.	Pertemuan awal (<i>Pre Kick off Meeting</i>) diskusi tentang asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2014 a. Evaluasi realisasi	Ditjen Anggaran c.q Dit.P-APBN dan Dit PNB/BLU, mengundang Biro Pusat Statistik, Bank	Berita Acara Kesepakatan Konsep awal asumsi dasar ekonomi makro RAPBN Tahun Anggaran 2014	Akhir November atau awal Desember 2012

	<p>asumsi dasar ekonomi makro APBN-P Tahun Anggaran 2012</p> <p>b. Review asumsi dasar ekonomi makro APBN Tahun Anggaran 2013</p> <p>c. Proyeksi asumsi dasar ekonomi makro tahun Tahun Anggaran 2014</p>	Indonesia, Bappenas, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian ESDM		
2.	Permintaan pendapat tentang asumsi dasar ekonomi makro 2014 dan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro 2015-2017 dari Direktorat Penyusunan APBN ke pemangku kepentingan	<p>Ditjen Anggaran yang diwakili oleh Dit.P-APBN menyampaikan surat permintaan asumsi dasar ekonomi makro kepada</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Badan Pusat Statistik, ➤ Bank Indonesia, Bappenas, dan ➤ Badan Kebijakan Fiskal 	<p>Asumsi Dasar Ekonomi makro 2014-2017</p> <p>Titik asumsi dasar ekonomi makro beserta parameternya sebagai dasar penyusunan proyeksi Pendapatan Negara dan Hibah, belanja K/L dan Non K/L, dan proyeksi pembiayaan.</p>	Minggu ke-1 Desember 2012
3.	<p>Penyampaian asumsi dasar ekonomi makro yang disepakati dan Permintaan Proyeksi RAPBN 2014 dan Kerangka Anggaran Jangka Menengah (MTBF) 2015-2017:</p> <p>a. Proyeksi Penerimaan Perpajakan</p> <p>b. Proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak</p> <p>c. Proyeksi Pendapatan Hibah</p>	<p>Ditjen Anggaran yang diwakili oleh Dit. P-APBN selaku koordinator meminta proyeksi kepada:</p> <p>Badan Kebijakan Fiskal</p> <p>Dit. PNBP</p> <p>DJPU</p>	<p>a. Proyeksi besaran penerimaan perpajakan</p> <p>b. Proyeksi penerimaan Negara bukan pajak</p> <p>c. Proyeksi Pendapatan Hibah</p>	Minggu ke-4 Desember 2012 s.d Minggu ke-2 Januari 2013

4.	<p>Penyusunan konsep kebijakan dan proyeksi belanja Negara per jenis belanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Belanja Pegawai (K/L dan Non K/L); ➤ Belanja Barang (K/L); ➤ Belanja Modal (K/L); ➤ Pembayaran Bunga Utang (non K/L); ➤ Belanja Subsidi (non K/L); ➤ Belanja Hibah (non K/L); ➤ Bantuan Sosial (K/L dan non K/L); ➤ Belanja Lain-lain (non K/L); dan ➤ Transfer ke Daerah 	Dit. P-APBN	Proyeksi belanja Negara per jenis belanja.	Minggu ke-4 Desember 2012 s.d Minggu ke-2 Januari 2013
5.	Penyusunan tabel belanja pemerintah pusat.	Dit. P-APBN (Sdit 2, sdit 3 dan sdit 4)	Total proyeksi belanja pemerintah pusat berdasarkan masing-masing jenis belanja, baik bagian dari belanja K/L maupun non K/L.	Minggu ke-4 Desember 2012 s.d Minggu ke-2 Januari 2013
6.	Penyusunan tabel Transfer ke Daerah	Dit. PAPBN (Sdit 4)	Total proyeksi Transfer ke Daerah.	Minggu ke-4 Desember 2012 s.d Minggu ke-2 Januari 2013
7.	Penyusunan tabel pendapatan negara	Dit. PAPBN (Sdit 1)	Total proyeksi Pendapatan negara.	Minggu ke-4 Desember 2012 s.d Minggu ke-2 Januari 2013

8.	Penyusunan tabel kapasitas awal Pembiayaan anggaran	Dit. PAPBN (Sdit 5)	Total proyeksi pembiayaan anggaran.	Minggu ke-4 Desember 2012 s.d Minggu ke-2 Januari 2013
9.	Penyusunan postur awal	Dit. PAPBN (Sdit 1)	Proyeksi awal postur APBN	Minggu ke-4 Desember 2012 s.d Minggu ke-2 Januari 2013
10.	<p>Penyusunan Proyeksi Indikasi Kebutuhan Dana Bendahara Umum Negara (Belanja Non K/L)</p> <p>a. Proyeksi belanja Non K/L, yang meliputi : belanja pegawai non K/L, Pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain</p> <p>b. Penyusunan indikasi kebutuhan dana masing-masing Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengelolaan Utang (BA 999.01) dan Pengelolaan Hibah (BA 999.02) ➤ Transfer Ke Daerah (BA 999.05) ➤ Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) ➤ Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) 	<p>Masing-masing penanggung jawab penyusunan belanja Non K/L di Dit. P-APBN</p> <p>Masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran (PPA):</p> <p>DJPU</p> <p>DJPK DJA</p> <p>DJA BKF dan Ditjen. Perbendaharaan</p>	<p>Besaran belanja non K/L berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan kebijakan yang diambil untuk tahun anggaran yang direncanakan.</p> <p>Indikasi kebutuhan dana masing-masing BA BUN dengan memperhatikan Prakiraan Maju dan Rencana Strategis</p> <p>Indikasi anggaran belanja BA BUN berdasarkan pembahasan</p>	<p>Awal tahun t-1</p> <p>Minggu ke-1 s.d ke-3 Januari</p>

	<p>➤ Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99)</p> <p>c. Konfirmasi dan pembahasan usulan indikasi anggaran belanja BA BUN dan menyesuaikan dengan kapasitas fiskal</p> <p>d. Penyusunan <i>exercise</i> besaran Belanja BUN (Non K/L)</p>	<p>Dit. P-APBN mengundang masing-masing PPA</p> <p>Dit. P-APBN</p>	<p><i>Exercise</i> besaran belanja BUN (Non K/L) yang terdiri dari belanja pegawai (kontribusi sosial dan dana transito), Bantuan Sosial (Dana darurat/penanggulangan bencana alam), belanja lain-lain (Kebutuhan mendesak, cadangan untuk mengantisipasi perubahan kebijakan, serta transfer ke daerah</p>	<p>Minggu ke-1 s.d ke-3 Januari</p>
11.	<p>Penyusunan Proyeksi Indikasi Kebutuhan Belanja K/L</p> <p>a. Penghitungan kapasitas fiskal untuk besaran total belanja K/L</p> <p>b. Koordinasi dengan Koordinator pagu Indikatif K/L</p> <p>Perumusan kebijakan dan parameter yang mempengaruhi proyeksi masing-masing jenis belanja K/L</p> <p>c. Penyusunan <i>exercise</i> besaran belanja K/L per jenis belanja</p>	<p>Dit. P-APBN Sdit 2 dan sdit 3</p> <p>Dit. P-APBN berkoordinasi dengan Dit. Anggaran I, II, III, Dit. PNBP, Dit. HPP dan DSP</p> <p>Dit. P-APBN</p>	<p>Besaran belanja K/L berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan kebijakan yang diambil untuk tahun anggaran yang direncanakan.</p> <p>Sebagaimana yg disusun pada poin 5</p> <p>Proyeksi Indikasi Kebutuhan Belanja K/L</p> <p>Dengan membandingkan angka Dit PAPBN dengan angka Koordinator Pagu Indikatif</p> <p><i>Exercise</i> besaran belanja K/L per jenis belanja yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang, belanja</p>	<p>Minggu ke-1 s.d ke-3 Januari</p>

			modal dan Bantuan Sosial	
12.	Penetapan awal defisit	Dit. PAPBN	Proyeksi awal besaran defisit	Minggu ke-1 s.d ke-3 Januari
13.	<p>Penyusunan Usulan Kebijakan dan proyeksi lanjutan (setelah penetapan defisit) penghitungan Pembiayaan Anggaran RAPBN tahun t</p> <p>a. Identifikasi kebutuhan dan sumber pembiayaan</p> <p>b. Koordinasi/rapat/surat dengan pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan usulan Kebijakan Pembiayaan Anggaran dan Parameternya</p> <p>c. Menyusun <i>exercise</i> besaran Pembiayaan Anggaran</p> <p>d. Konfirmasi hasil <i>exercise</i> SBN, pinjaman proyek, pinjaman program, SAL, HPA, penerusan pinjaman dan cicilan pokok.</p> <p>e. Menyusun dan merangkum data proyeksi pembiayaan tersebut dalam <i>supporting table</i> pembiayaan negara.</p>	<p>Ditjen Anggaran, Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pengelolaan Utang, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara, dan unit terkait lainnya</p> <p>Dit. P-APBN</p> <p>Dit. P-APBN</p> <p>Dit. P-APBN</p>	<p>Konsep usulan Kebijakan dan proyeksi penghitungan Pembiayaan Anggaran RAPBN 2014</p> <p>Hasil <i>exercise</i> besaran pembiayaan Anggaran</p> <p><i>Supporting table</i> pembiayaan negara.</p>	Minggu ke 4 Januari s.d. Minggu ke 2 Februari

14.	DJA mengkoordinasikan penyusunan postur RAPBN 2014 dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal dan kerangka anggaran jangka menengah (MTBF) 2015-2017 dengan instansi terkait		Ditjen Anggaran yang diwakili oleh Dit. P-APBN selaku koordinator	Proyeksi dan <i>exercise</i> postur RAPBN	
a.	Penyusunan proyeksi penghitungan Postur <i>RAPBN</i> dalam rangka penyusunan Kapasitas fiskal (dengan Eselon II) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Konfirmasi mengenai besaran defisit dan kebijakan-kebijakannya ➤ Konfirmasi mengenai asumsi dasar ekonomi makro beserta parameternya berikut kebijakan-kebijakannya ➤ Konfirmasi mengenai pendapatan dan hibah beserta kebijakan-kebijakannya ➤ Konfirmasi mengenai belanja negara dan kebijakan-kebijakannya ➤ Konfirmasi 		Badan Kebijakan Fiskal BKF, BPS, Kementerian ESDM, Bappenas Dit. PNBP, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan Ditjen. Pengelolaan Utang Dit. Anggaran I, II, dan III Ditjen	Proyeksi dan besaran defisit untuk postur RAPBN beserta kebijakannya Proyeksi asumsi dasar ekonomi makro untuk postur RAPBN beserta kebijakannya Proyeksi dan besaran pendapatan untuk postur RAPBN beserta kebijakannya Proyeksi dan besaran belanja negara untuk postur RAPBN beserta kebijakannya Proyeksi pembiayaan	Minggu ke-4 Januari s.d. Minggu ke-1 Februari

		mengenai pembiayaan dan kebijakan-kebijakannya	Pengelolaan Utang dan Ditjen Kekayaan Negara	untuk postur RAPBN beserta kebijakannya	
	b.	Penyampaian Postur RAPBN ke Dirjen Anggaran beserta kebijakannya	Dit. P-APBN menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran	Postur RAPBN dalam rangka penyusunan <i>Resource Envelope</i> dan anggaran jangka menengah (MTBF) 2015-2017 beserta kebijakannya	Minggu ke-2 Februari
	c.	<p>Pembahasan proyeksi penghitungan Postur RAPBN dalam rangka penyusunan Kapasitas fiskal (dengan Eselon I):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Konfirmasi mengenai defisit ➤ Konfirmasi mengenai asumsi dasar ekonomi makro ➤ Konfirmasi mengenai pendapatan dan hibah ➤ Konfirmasi mengenai belanja Negara ➤ Konfirmasi mengenai pembiayaan 	<p>Ditjen Anggaran diwakili oleh Dit. P-APBN selaku koordinator</p> <p>Badan Kebijakan Fiskal</p> <p>Badan Kebijakan Fiskal dan Badan Pusat Statistik</p> <p>Dit. PNB, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan Ditjen Pengelolaan Utang</p> <p>Dit. Anggaran I, II, dan III</p> <p>Ditjen Pengelolaan Utang dan Ditjen Kekayaan Negara</p>	Konsep kapasitas fiskal untuk pagu indikatif RAPBN 2014 dan MTBF 2015-2017	Minggu ke-2 Februari
	d.	Penyampaian postur untuk dibahas dalam Rapat pimpinan antar unit eselon I	Dit. Jend. Anggaran	Kesepakatan mengenai defisit dan postur APBN	

		yang dipimpin oleh Menteri Keuangan			
	e.	Penyampaian postur untuk dibahas pada sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden.	Menteri Keuangan	Kesepakatan mengenai defisit dan postur APBN.	
15.	DJA menyampaikan kepada Menteri Keuangan:		Dit. P-APBN berkoordinasi dengan Dit. PNBP, Dit. A1, Dit. A2, Dit. A3, Dit. HPP, Dit. DSP untuk memastikan keandalan data pada surat mengenai kapasitas fiskal beserta Lampiran.	Konsep surat Menteri Keuangan mengenai kapasitas fiskal untuk pagu indikatif RAPBN 2014 dan MTBF 2015-2017 beserta Lampiran.	Minggu ke-4 Februari
16.	Menteri Keuangan menyampaikan paparan tentang postur dalam Sidang Kabinet				Dapat dilakukan beberapa kali
17.	Proses penyesuaian dengan hasil sidang kabinet		Dit. P-APBN	Postur hasil <i>exercise</i> berdasarkan hasil sidang kabinet.	Pekan kedua Maret

Dalam perkembangannya postur kapasitas fiskal untuk K/L dan lain-lain dapat mengalami perubahan dalam sidang kabinet.

g. Penyusunan Pagu Indikatif Belanja K/L

Output dari tahapan ini adalah surat bersama Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pagu Indikatif K/L.

Setelah disampaikan surat Menteri Keuangan kepada Menteri PPN mengenai kapasitas fiskal dan kebijakan APBN, maka kegiatan selanjutnya yang harus dilakukan sesuai amanat PP 90 tahun 2010 adalah penyusunan Pagu Indikatif masing-masing K/L oleh Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan, dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan pemenuhan prioritas pembangunan nasional. Berdasarkan definisi dalam PP 90 tahun 2010, Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Kegiatan dalam rangka penyusunan pagu indikatif diawali sejak pekan kedua atau ketiga Januari dengan dilakukannya *roadshow* kepada unit di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga. Dari *roadshow* ini diharapkan diperoleh keluaran berupa usulan program dan belanja prioritas Kementerian/Lembaga yang dapat diusulkan termasuk untuk inisiatif baru (*new initiative*). Kegiatan ini diselesaikan pada pekan kesatu Februari dengan pemangku kepentingan Direktorat Anggaran I, II, III, Direktorat P-APBN, dan Direktorat Sistem Penganggaran.

Dalam periode bulan Januari dan berakhir pada pekan pertama Februari, DJA melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga. Kegiatan ini memperhatikan prasyarat dari prioritas pembangunan nasional dan kemungkinan terdapatnya inisiatif baru dengan melakukan *reviu* atas *baseline* Kementerian/Lembaga. Kegiatan ini dilakukan oleh Direktorat Sistem Penanggaran, Direktorat Anggaran I, II, III, Dit. APK, Dit. PA dan Direktorat P-APBN dengan keluaran berupa *baseline* belanja Kementerian/Lembaga operasional dan nonoperasional.

Setelah melakukan monitoring dan evaluasi, kegiatan selanjutnya adalah penyusunan usulan rancangan pagu indikatif belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam bulan Februari sampai dengan Maret. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dit. Anggaran I, II, III dan Dit. P-APBN dengan beberapa

Kementerian Negara/Lembaga. Dari kegiatan ini dihasilkan konsep rancangan pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga.

Dalam rangka penyusunan usulan rancangan pagu indikatif ini, DJA juga melakukan koordinasi dengan Bappenas untuk mencapai kesimpulan hasil koordinasi tentang pagu indikatif RAPBN tahun anggaran yang direncanakan. Koordinasi ini dilakukan pada pekan kedua dan ketiga Februari dimana DJA diwakili oleh Dit. P-APBN dan Dit. Sistem Penganggaran.

Selanjutnya, diselenggarakan rapat pimpinan Kementerian Negara/Lembaga membahas *resource envelope* untuk pagu indikatif dan rancangan kebijakan RAPBN tahun anggaran yang direncanakan. Rapat pimpinan dilaksanakan pada pekan kedua Februari dan melibatkan Dit. P-APBN, Dit. PNBP, Dit. Anggaran I, II, III, Dit. HPP dan Dit. Sistem Penganggaran. Keluarannya berupa keputusan rapat pimpinan tentang *resource envelope* untuk pagu indikatif dan rancangan kebijakan RAPBN tahun anggaran yang direncanakan. Dalam rapim ini dilakukan penyusunan bahan paparan Menteri Keuangan oleh Dit. P-APBN serta penyusunan draft Surat Bersama dengan Bappenas tentang Pagu Indikatif RAPBN tahun yang direncanakan. Penyusunan draft Surat Bersama juga melibatkan Dit. P-APBN, Dit. PNBP, Dit. Anggaran I, II, III, Dit. HPP dan Dit. Sistem Penganggaran.

Keputusan rapim berupa *resource envelope* untuk pagu indikatif dan rancangan RAPBN tahun anggaran yang direncanakan kemudian disampaikan Menteri Keuangan kepada Menteri Koordinator Perekonomian dan Wakil Presiden. Kegiatan ini menghasilkan keluaran berupa paparan Menteri Keuangan dan dijadwalkan dilaksanakan pada pekan ketiga Februari. Bahan paparan Menteri Keuangan disiapkan oleh Dit. P-APBN yang melakukan koordinasi dengan Dit. PNBP, Dit. Anggaran I, II, III, Dit. Sistem Penganggaran, Setjen, BKF, DJPU, dan DJPK.

Sidang Kabinet untuk membahas *resource envelope* untuk pagu indikatif rancangan kebijakan RAPBN 2014 dilakukan pada pekan keempat Februari. Penanggung jawab kegiatan ini sama dengan sidang kabinet terbatas, yaitu Dit.

P-APBN dan Pushaka. Keluaran dari kegiatan ini adalah Keputusan mengenai *resource envelope* dan kebijakan untuk pagu indikatif dan rancangan kebijakan RAPBN tahun anggaran yang direncanakan.

Setelah Menteri Keuangan menyampaikan surat tentang *resource envelope* untuk pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga dan rancangan kebijakan belanja Pemerintah Pusat RAPBN tahun anggaran yang direncanakan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas pada pekan kedua Maret, dilaksanakan rapat koordinasi pembangunan pemerintah pusat (Rakorbangpus) pada akhir Maret. Penanggung Jawab kegiatan ini adalah Bappenas. Dalam Rakorbangpus ini Dit. P-APBN menyiapkan bahan paparan Menteri Keuangan berupa arahan mengenai kebijakan Pemerintah Pusat dan Dit Anggaran 1, 2, 3 menyiapkan bahan paparan Direktur Jenderal Anggaran tentang kebijakan belanja Kementerian/Lembaga.

Langkah selanjutnya adalah penetapan Pagu Indikatif RAPBN tahun anggaran yang direncanakan melalui Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang untuk RAPBN TA 2014 dilakukan pada tanggal 5 April 2013. Pagu indikatif ini dirinci menurut organisasi, program, kegiatan, dan indikasi pendanaan untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden. Surat yang ditandatangani Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan mengenai Pagu Indikatif yang sudah ditetapkan tersebut disertai dengan prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam rancangan awal RKP dan disampaikan kepada Kementerian/Lembaga. Contoh Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan mengenai Pagu Indikatif dapat dilihat pada: **Lampiran IV**.

Setelah penetapan Surat Bersama, diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikoordinir oleh Bappenas di Bulan April. Pada kesempatan ini, Menteri Keuangan memberikan arahan tentang Kebijakan Belanja Negara. Bahan paparan Menteri Keuangan tersebut disiapkan oleh Dit P-APBN.

Selanjutnya, Menyusuli penetapan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP, dilakukan trilateral meeting antara Kementerian Negara PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran/DJA) dan K/L. Trilateral meeting dilakukan untuk menyelaraskan program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif K/L untuk Tahun Anggaran yang direncanakan, dan diharapkan dapat dilakukan konsolidasi dan koordinasi sejak awal sehingga sasaran-sasaran pembangunan dalam koridor kebijakan fiskal dapat diwujudkan.

Materi yang dibahas dalam trilateral meeting adalah prioritas nasional, program dan kegiatan prioritas serta pendanaannya. Pembahasan akan mencakup pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang akan dituangkan dalam RKP, konsistensi kebijakan yang ada dalam dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran (antara RPJMN, RKP, Renja K/L dan RKA-K/L), dan komitmen bersama atas penyempurnaan yang perlu dilakukan terhadap Rancangan Awal RKP.

Salah satu peran Bappenas dalam trilateral meeting adalah penyampaian kepada K/L mengenai prioritas pembangunan nasional. Prioritas pembangunan nasional dirinci ke dalam program dan kegiatan prioritas serta target sasaran yang hendak dicapai ke masing-masing K/L sesuai tugas dan fungsinya yang mengacu pada RPJMN.

Kementerian Keuangan akan menyampaikan kebijakan penganggaran dengan mengacu pada kaidah penganggaran, efektifitas dan efisiensi pendanaan bagi program dan kegiatan K/L untuk jangka menengah sesuai dengan kebutuhan pendanaan K/L. Peran lain adalah menyempurnakan kebijakan anggaran yang terbagi kedalam jenis belanja dan satuan biaya yang dianggap perlu untuk disesuaikan dengan masukan yang diperoleh dalam trilateral meeting.

Selanjutnya, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan Renja-K/L kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan untuk bahan

penyempurnaan rancangan awal RKP dan penyusunan rincian pagu menurut unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan sebagai bagian dari bahan pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN yang merupakan tahapan penyusunan APBN yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. **Tabel 2.7** mengikhtisarkan setiap tahapan yang dilakukan dalam proses penyusunan pagu indikatif.

Tabel 2.7.
Penyusunan Pagu Indikatif Belanja Kementerian Negara/Lembaga

No.	Uraian	Unit Terkait	Output	Keterangan
1.	DJA menyampaikan kepada Menteri Keuangan: a. Konsep <i>resource envelope</i> untuk pagu indikatif RAPBN 2014 dan MTBF 2015-2017 b. konsep surat Menteri Keuangan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas	Dit. P-APBN, Dit. PNPB, Dit. A1, Dit. A2, Dit. A3, Dit. HPP, Dit. DSP.	Konsep <i>resource envelope</i> untuk pagu indikatif RAPBN 2014 dan MTBF 2015-2017	Minggu ke- 1 Februari
2.	Road show (Kemenkeu dan K/L)	Dit A1, Dit. A2, Dit. A3, Dit. P-APBN, Dit. DSP, beberapa K/L	Usulan program dan belanja prioritas K/L (untuk <i>new initiative</i>)	Minggu ke 2-3 Januari Diselesaikan pada Minggu ke-1 Februari
3.	Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran K/L (prasyarat : prioritas pembangunan nasional dan kemungkinan <i>new initiatives</i>) → <i>review baseline</i> K/L	Dit. DSP, Dit. A1, Dit. A2, Dit. A3, Dit. APK, Dit. PA, Dit. PAPBN	Konsep <i>Baseline</i> belanja K/L (operasional dan non-operasional)	Januari - Februari Diselesaikan pada Minggu ke-1 Februari
4.	Penyusunan usulan rancangan pagu Indikatif Belanja K/L	Dit A1, Dit. A2, Dit. A3, Dit. P-APBN, beberapa K/L	Konsep rancangan pagu Indikatif Belanja K/L	Februari-Maret

5.	DJA berkoordinasi dengan Bappenas dalam penyusunan pagu indikatif RAPBN 2014	Dit. P-APBN, Dit. DSP, Bappenas	Hasil koordinasi tentang pagu indikatif RAPBN 2014	Minggu ke 2 - 3 Februari
6.	Rapat Pimpinan Kemenkeu membahas untuk pagu indikatif dan rancangan kebijakan RAPBN 2014	Dit. P-APBN, Dit. PNBP, Dit. A1, Dit. A2, Dit. A3, Dit. HPP, Dit. DSP.	Keputusan rapim tentang <i>resource envelope</i> untuk pagu indikatif dan rancangan kebijakan RAPBN 2014	Minggu ke-2 Februari
	a. Penyusunan paparan Menteri Keuangan dalam rangka pembahasan <i>resource envelope</i> di sidang kabinet, rakorbangpus, dan musrenbangnas.	Dit. P-APBN	Paparan Menteri Keuangan tentang <i>resource envelope</i> untuk pagu indikatif dan rancangan kebijakan RAPBN 2014	Minggu ke-2 Februari
	b. Penyusunan draft Surat Bersama dengan Bappenas tentang Pagu Indikatif RAPBN 2014	Dit. P-APBN, Dit. PNBP, Dit. A1, Dit. A2, Dit. A3, Dit. HPP, Dit. DSP.		Minggu ke-2 Februari
7.	Kemenkeu menyampaikan untuk pagu indikatif dan rancangan kebijakan RAPBN 2014 kepada Menko Perekonomian dan Wakil Presiden	DJA (Dit. P-APBN, Dit. PNBP, Dit. A1, Dit. A2, Dit. A3, Dit. Dit. DSP), Setjen, BKF, DJPU, DJPK	Paparan Menkeu	Minggu ke-3 Februari
8.	Sidang Kabinet membahas <i>resource envelope</i> untuk pagu indikatif rancangan kebijakan RAPBN 2014 (menyusun paparan Menteri Keuangan)	Dit. P-APBN, Pushaka	Keputusan mengenai <i>resource envelope</i> dan kebijakan untuk pagu indikatif dan rancangan kebijakan RAPBN 2014	Minggu ke-4 Februari

9.	Menteri Keuangan menyampaikan surat tentang <i>resources envelope</i> untuk pagu indikatif belanja K/L dan rancangan kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2014 kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas	DJA (Dit. P-APBN, Dit. PNBP, Dit. A1, Dit. A2, Dit. A3, Dit. Dit. DSP), Setjen	Surat tentang <i>resources envelope</i> untuk pagu indikatif belanja K/L rancangan kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2014	Minggu ke-2 Maret Untuk tahun 2014 dilaksanakan pada 13 Maret 2013
10.	Rapat koordinasi Pembangunan Pemerintah Pusat (Rakorbangpus) a. Menkeu memberikan arahan tentang kebijakan Pemerintah Pusat b. Dirjen Anggaran memberikan arahan tentang Kebijakan Belanja K/L	Bappenas Dit.P-APBN Dit. Anggaran I, II, III	Arahan Menkeu Bahan paparan Menkeu berupa Arahan mengenai kebijakan Pemerintah Pusat Bahan paparan arahan Dirjen Anggaran mengenai Kebijakan Belanja K/L	Akhir Maret Untuk tahun 2014 dilaksanakan pada 8 April 2013
11.	Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menetapkan SB Pagu Indikatif RAPBN 2014 yang dirinci menurut organisasi, program, kegiatan, dan indikasi pendanaan untuk mendukung Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden <u>Dasar hukum</u> : Pasal 8 ayat (4) PP Nomor 90 Tahun 2010	Kemenkeu, Bappenas	SB Pagu Indikatif RAPBN 2014 beserta prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam rancangan awal RKP	Maret Untuk Tahun 2014 dilaksanakan pada 5 April 2013
12.	Pagu Indikatif beserta prioritas pembangunan nasional dalam rancangan RKP yang sudah ditetapkan disampaikan kepada K/L	Kemenkeu Bappenas		April

13.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) ➤ Menkeu memberikan arahan tentang Kebijakan Belanja Negara	Bappenas Disiapkan oleh Dit. P-APBN	Bahan paparan arahan Menteri Keuangan tentang Kebijakan Belanja Negara	➤ April
14.	Trilateral Meeting	Bappenas Kemenkeu DJA (A1, A2, A3) K/L	Dokumen hasil trilateral meeting	➤ April
15.	K/L menyampaikan Renja K/L kepada Bappenas dan Kemenkeu	Bappenas Kemenkeu	Dokumen Renja K/L	➤ April

2.3. Pembicaraan Pendahuluan

Output yang dihasilkan dari tahapan ini adalah kesepakatan pemerintah dan DPR tentang RKP dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN.

Berdasarkan Renja-K/L dari Kementerian dan Lembaga dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) PP No.20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Presiden kemudian menetapkan Keputusan Presiden tentang RKP. Keppres RKP kemudian disampaikan kepada DPR pada pertengahan bulan Mei untuk digunakan sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPR. Hal ini diatur dalam Pasal 151 ayat (2) Tata Tertib DPR RI dan Pasal 7 ayat (1) PP No.20 tahun 2004.

Di sisi lain, pada periode bulan Februari-Maret, Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dengan koordinator BKF menyiapkan dokumen Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) dan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) 2014. Dalam rangka penyusunan dokumen PPKF tersebut Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Dit PAPBN menyiapkan sumbangan bahan penyusunan PPKF kepada BKF yang berisi kebijakan-kebijakan pokok penyusunan APBN. Selanjutnya pemerintah

menyampaikan PPKF dan KEM kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Selanjutnya, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas PPKF dan KEM yang diajukan oleh Pemerintah dalam forum pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran yang direncanakan. Pembicaraan pendahuluan ini dilaksanakan dalam rapat paripurna pada tanggal 20 Mei atau sehari sebelumnya jika tanggal tersebut jatuh pada hari libur. Berdasarkan pembahasan KEM dan PPKF, Pemerintah bersama DPR-RI memutuskan kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 152 ayat 1 Tata Tertib DPR, yang menyebutkan bahwa pokok-pokok pembicaraan pendahuluan rancangan APBN dalam rapat paripurna meliputi:

- a. PPKF dan KEM tahun anggaran berikutnya;
- b. Kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian /lembaga dalam penyusunan usulan anggaran; dan
- c. Rincian unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan.

Atas PPKF dan KEM ini, dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada pekan ketiga Mei, Fraksi-fraksi di DPR memberikan pandangannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 152 ayat (4) Tata Tertib DPR RI. Pemerintah selanjutnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap pandangan Fraksi atas PPKF dan KEM RAPBN tahun anggaran yang direncanakan. Dokumen tanggapan pemerintah tersebut disiapkan oleh Kementerian Keuangan dengan koordinator BKF. Dalam menyusun tanggapan tersebut DJA dalam hal ini Dit PAPBN menyumbangkan jawaban atas pandangan DPR tersebut khususnya terkait belanja negara. Tanggapan ini disampaikan Pemerintah dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada pekan keempat Mei.

Selanjutnya, pada pekan pertama bulan Juni, dilaksanakan rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah dengan agenda: (i) Penyampaian RKP, (ii) Penyampaian PPKF dan KEM, dan (iii) Pembentukan Panitia Kerja (Panja). Panja-panja yang dibentuk terdiri dari:

- a. Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan (ketua wakil Pemerintah: Kepala BKF);
- b. Panja RKP dan Prioritas Anggaran (ketua wakil Pemerintah: Deputi Pendanaan);
- c. Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN (ketua wakil Pemerintah: Dirjen Anggaran); dan
- d. Panja Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN (ketua wakil Pemerintah: Dirjen Perimbangan Keuangan).

Kegiatan ini memiliki landasan hukum berdasarkan pasal 158 UU No.27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) dan Pasal 65 dan 66 Tata Tertib DPR RI.

Pembahasan dilanjutkan dengan rapat kerja Komisi I sampai dengan Komisi XI dengan mitra kerjanya untuk membahas rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) pada pekan pertama sampai dengan pekan kedua di bulan Juni. Pada waktu yang bersamaan, diselenggarakan rapat Kerja Komisi VII dan Komisi XI dengan mitra kerjanya membahas asumsi dasar RAPBN 2014. Hasil pembahasan ini disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi.

Selanjutnya, pada pekan kedua sampai dengan keempat Juni, diadakan rapat panja-panja dengan jadwal untuk RAPBN Tahun Anggaran 2014 (sebagai contoh) sebagai berikut:

- a. Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN Tahun Anggaran 2014 tanggal 18 – 21 Juni 2013;
- b. Panja RKP 2014 dan Prioritas Anggaran Tahun Anggaran 2014 tanggal 18 – 21 Juni 2013;
- c. Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN Tahun Anggaran 2014 tanggal 25 – 28 Juni 2013; dan
- d. Panja Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN Tahun Anggaran 2014 tanggal 25 – 28 Juni 2013.

Dalam kegiatan ini Dit. PAPBN menyiapkan bahan paparan Dirjen Anggaran pada pembahasan di panja kebijakan belanja pemerintah pusat. Hasil rapat panja-panja ini dibahas dalam rapat Tim Perumus Panja, yang dijadwalkan pada pekan terakhir bulan Juni 2013 untuk Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN TA 2014 serta Panja RKP Tahun 2014 dan Prioritas Anggaran Tahun 2014. Sedangkan untuk hasil dari Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN TA 2014 dan Panja Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN TA 2014 dibahas dalam rapat Tim Perumus Panja pada pekan pertama bulan Juli 2013.

Selanjutnya dilakukan rapat pembahasan komisi I-XI dengan mitra kerjanya untuk menyempurnakan alokasi anggaran menurut fungsi, program, kegiatan Kementerian negara/Lembaga sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran yang dijadwalkan pada pekan pertama di bulan Juli. Komisi-komisi DPR RI dengan bidang tugas adalah sebagai berikut:

1. Komisi I membidangi Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, serta Komunikasi dan Informatika;
2. Komisi II membidangi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, serta Pertanahan dan Reforma Agraria;
3. Komisi III membidangi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan;
4. Komisi IV membidangi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan;
5. Komisi V membidangi Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, serta Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
6. Komisi VI membidangi Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN serta Standarisasi Nasional;
7. Komisi VII membidangi Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi serta Lingkungan Hidup;
8. Komisi VIII membidangi Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan;

9. Komisi IX membidangi Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan serta Kesehatan;
10. Komisi X membidangi Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, serta Perpustakaan; dan
11. Komisi XI membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Perbankan.

Setelah dilakukan penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan kegiatan K/L, kemudian diselenggarakan rapat internal Badan Anggaran, yang untuk RAPBN 2014 dijadwalkan pada tanggal 8 Juli 2013. Dalam rapat internal Badan Anggaran ini dilakukan sinkronisasi hasil Panitia Kerja.

Setelah itu, disampaikan hasil sinkronisasi oleh Komisi dengan Mitra Kerjanya kepada Badan Anggaran dan Menteri Keuangan untuk bahan penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2014 dan Nota Keuangannya. Kegiatan ini dijadwalkan pada pekan kedua di bulan Juli.

Setelah masing-masing panja menyampaikan laporan hasil pembahasan, Badan Anggaran kemudian melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur BI dengan agenda pengesahan hasil Panitia Kerja. Rapat Kerja ini dijadwalkan pada akhir Juni, yang untuk RAPBN Tahun Anggaran 2014 dijadwalkan tanggal 10 Juli 2013.

Tahap akhir dari pembicaraan pendahuluan ini adalah Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan tentang RKP dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2014 di Badan Anggaran yang selanjutnya akan digunakan Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN Tahun Anggaran 2014.

Siklus pembicaraan pendahuluan pembahasan RKP dan rancangan APBN tahun anggaran yang direncanakan dapat diilustrasikan dalam **Tabel 2.8**.

Tabel 2.8.
Pembicaraan Pendahuluan

No	Uraian	Penanggung Jawab	Output	Keterangan
1.	Penyiapan sumbangan bahan penyusunan PPKF dan KEM RAPBN TA 2014 berupa kebijakan-kebijakan pokok penyusunan APBN.	DJA c.q Dit. P-APBN disampaikan kepada BKF, DJA, DJPU, DJPK	Sumbangan bahan penyusunan PPKF dan KEM RAPBN TA 2014	Februari s.d Maret 2013
2.	Penyiapan dokumen Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro RAPBN TA 2014 untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan.	BKF	Dokumen Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro RAPBN TA 2014.	Februari s.d Maret 2013
3.	Sidang kabinet tentang PPKF dan KEM	Kementerian Keuangan (DJA, BKF) dan Bappenas	Hasil sidang kabinet tentang PPKF dan KEM	Februari s.d Maret 2013
4.	Penyusunan Keputusan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran dengan DPR	Kementerian Keuangan (DJA, BKF) dan Bappenas	Keppres tentang RKP	
5.	Pemerintah menyampaikan Keppres tentang RKP Tahun Anggaran 2014 kepada DPR-RI	Menteri Keuangan c.q BKF dan DJA	Keppres tentang RKP	Selamat-lambatnya pertengahan Mei 2013

6.	Rapat Paripurna DPR RI Pemerintah menyampaikan bahan kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN TA 2014 yang meliputi: 1. Kerangka Ekonomi Makro & Pokok-pokok Kebijakan Fiskal TA 2014; 2. Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran K/L TA 2014; dan 3. Rincian anggaran berdasarkan unit organisasi, fungsi, program dan kegiatan TA 2014.	Menteri Keuangan (BKF dan DJA) Bertindak sebagai penanggung jawab bahan:BKF		20 Mei 2013
7.	Rapat Kerja dengan DPD DPD memberikan pertimbangan terhadap KEM dan PPKF RAPBN TA 2014	Penanggung jawab bahan : BKF	Hasil pertimbangan DPD terhadap KEM dan PPKF RAPBN TA 2014	Mei 2013
8.	Rapat Paripurna DPR RI Pandangan Fraksi-fraksi atas materi yang disampaikan Pemerintah tentang pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2014	Menteri Keuangan (BKF dan DJA)	Pandangan Fraksi-fraksi tentang pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan	23 Mei 2013
9.	Penyiapan dokumen tanggapan pemerintah atas pertanyaan DPR.	BKF Catatan: Dit.P-APBN membuat sumbangan bahan ke BKF	Dokumen tanggapan pemerintah atas pertanyaan DPR	Sebelum tanggal 28 Mei 2013.
10.	Rapat Paripurna DPR RI Tanggapan Pemerintah	Menteri Keuangan, Menteri		28 Mei 2013

	terhadap Pandangan Fraksi	PPN/Kepala Bappenas Gubernur BI		
11.	Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia 1. Penyampaian pokok-pokok RKP, Kerangka Ekonomi Makro & Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN TA 2014; 2. Pembentukan Panja: a. Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN TA 2014; b. Panja RKP dan Prioritas Anggaran Tahun 2014; c. Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN TA 2014; d. Panja Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN TA 2014.	Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Gubernur BI BKF bertindak selaku penanggung jawab koordinator penyiapan bahan rapat kerja	Hasil Raker	3 Juni 2013
12.	Rapat Kerja Komisi VII dan Komisi XI dengan Mitra Kerjanya Pembahasan asumsi dasar RAPBN TA 2014	Masing-masing komisi terkait dengan mitra kerjanya	Hasil Raker Komisi VII membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup membahas asumsi dasar ekonomi makro antara lain terkait dengan ICP, lifting minyak dan gas. Komisi XI	4 – 10 Juni 2013

			membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Perbankan membahas asumsi dasar ekonomi makro antara lain terkait, pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga SPN 3 bulan, dan nilai tukar Rupiah terhadap USD.	
13.	Raker Komisi I – XI dengan mitra Kerjanya Pembahasan RKA-K/L & RKP K/L TA 2014 (hasilnya disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi)	Masing-masing komisi terkait dengan mitra kerjanya		4 – 14 Juni 2013
14.	Rapat Panja-panja 1. Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN TA 2014; 2. Panja RKP Tahun 2014 dan Prioritas Anggaran Tahun 2014.	Anggota Panja A Anggota Panja RKP	Hasil Rapat Panja Hasil Rapat Panja	18 – 21 Juni 2013 18 – 21 Juni 2013
15.	Rapat Tim Perumus Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan	Tim Perumus	Hasil rapat Tim Perumus	24 Juni 2013
16.	Rapat Panja-panja 1. Panja Kebijakan Belanja	Panja B	Hasil Rapat Panja	25 – 28 Juni 2013

	<p>Pemerintah Pusat RAPBN TA 2014;</p> <p>2. Panja Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN TA 2014.</p>	Panja C	Dit. PAPBN, DJA menyiapkan bahan paparan DJA (pertengahan Juni)	
17.	Rapat Tim Perumus Panja Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah	Tim Perumus	Hasil rapat Tim Perumus	1 Juli 2013
18.	<p>Rapat Kerja Komisi I-XI dengan Mitra Kerjanya</p> <p>Menyempurnakan alokasi anggaran menurut fungsi, program, kegiatan K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran</p>	Komisi I – XI dengan mitra kerjanya	Penyempurnakan alokasi anggaran	1 – 5 Juli 2013
19.	<p>Rapat Internal Badan Anggaran</p> <p>Sinkronisasi hasil panja-panja</p>	Badan Anggaran		8 Juli 2013
20.	Penyampaian hasil sinkronisasi oleh Komisi dengan Mitra Kerjanya kepada Badan Anggaran & Menteri Keuangan untuk bahan penyusunan RUU APBN TA 2014 & Nota Keuangannya	Badan Anggaran Menteri Keuangan	Hasil sinkronisasi	9 Juli 2013
21.	<p>Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas & Gubernur BI</p> <p>Penyampaian laporan & pengesahan hasil Panja-panja</p>	Badan Anggaran Menteri Keuangan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur BI	<p>Hasil pembahasan tentang RKP & Pembicaraan Pendahuluan Badan Anggaran</p> <p>BKF bertindak selaku penanggung jawab koordinator penyiapan bahan</p>	10 Juli 2013

			tayangan paparan Menteri Keuangan	
22.	Rapat Paripurna Penyampaian laporan hasil pembahasan tentang RKP dan Pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2014	Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Gubernur BI	BKF bertindak sebagai penanggung jawab koordinator penyiapan bahan pidato Menteri Keuangan	12 Juli 2013

2.4. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Output dari tahapan ini adalah buku himpunan RKA-K/L dan Buku Nota Keuangan serta RUU APBN 2014

Setelah dihasilkan pengesahan RKP dan Rancangan kebijakan APBN dari pembicaraan pendahuluan, Menteri Keuangan menyampaikan Surat Edaran mengenai **pagu Anggaran** Kementerian Negara/Lembaga. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) PP No.90 tahun 2010, Menteri Keuangan menetapkan Pagu anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dengan berpedoman pada kapasitas fiskal, besaran pagu indikatif, Renja-K/L dan hasil evaluasi kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Pagu Anggaran ini disampaikan kepada setiap Kementerian Negara/Lembaga paling lambat akhir bulan Juni dan dirinci paling sedikit menurut: (a) unit organisasi; dan (b) program. Sementara itu, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L berdasarkan: (a) Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; (b) Renja K/L; (c) RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN; dan (d) standar biaya. RKA-K/L yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga termasuk menampung usulan inisiatif baru. Setelah ditelaah dalam forum penelaahan antara Kementerian

Negara/Lembaga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan, RKA-K/L menjadi bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN.

Penelaahan RKA-K/L, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 10 ayat (4) PP 90 tahun 2010, dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Anggaran I, II, dan III Direktorat Jenderal Anggaran. Proses penelaahan dilakukan secara terintegrasi, meliputi: (a) kelayakan anggaran terhadap sasaran Kinerja yang direncanakan; dan (b) konsistensi sasaran Kinerja Kementerian/Lembaga dengan RKP. Kegiatan penelaahan RKA-K/L diselesaikan paling lambat akhir bulan Juli. RKA-K/L hasil penelaahan kemudian dihimpun oleh Kementerian Keuangan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Nota Keuangan, Rancangan APBN, Rancangan Undang-Undang tentang APBN, dan dokumen pendukung pembahasan Rancangan APBN.

Sementara itu, proses penyusunan rancangan APBN dibarengi dengan kegiatan penulisan draft Nota Keuangan dan RAPBN beserta RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan. Institusi di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjadi pemangku kepentingan utama dalam kegiatan ini adalah DJA (untuk penulisan belanja pemerintah pusat), BKF (untuk penulisan asumsi makro, pendapatan dan subsidi), DJPK (untuk penulisan belanja ke daerah, serta DJPU dan DJKN (untuk pembiayaan). Proses penulisan draft dilakukan pekan kesatu bulan Juni sampai dengan minggu keempat bulan Juli dan keluaran yang dihasilkan berupa draft Nota Keuangan dan Rancangan APBN. Bersamaan dengan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, DJA, BKF, DJPK, dan DJPU menyusun Postur RAPBN pada pekan kesatu sampai dengan pekan kedua bulan Juni. Keluaran yang dihasilkan berupa draft postur RAPBN.

Pada pekan kedua bulan Juni, diselenggarakan rapat pimpinan Kementerian Keuangan untuk membahas dan menetapkan Postur RAPBN 2014 dan Pagu Anggaran. Keluaran dari kegiatan yang dikoordinasikan oleh DJA, BKF, DJPK dan DJPU ini berupa hasil pembahasan Postur RAPBN dan pagu anggaran. Hasil pembahasan ini kemudian dibahas dalam Sidang Kabinet Terbatas. Kegiatan

dimana DJA sebagai penanggungjawabnya ini, dijadwalkan diselenggarakan pada pekan ketiga bulan Juni dengan keluaran berupa hasil sidang kabinet.

Dalam rangka penyusunan draft Nota Keuangan RAPBN tahun anggaran yang direncanakan, pada pekan keempat sampai dengan kelima bulan Juni, DJA c.q Dit. PAPBN mengoordinasikan masukan-masukan dari instansi terkait seperti BKF, DJPK, dan DJPU. Keluaran dari aktivitas ini berupa draft awal hasil penggabungan Nota Keuangan RAPBN. Kemudian, Dit. PAPBN menyusun draft penggabungan menjadi draft buku Nota Keuangan dan RUU APBN tahun anggaran yang kemudian disampaikan ke Eselon I terkait yaitu BKF, DJPK, dan DJPU untuk koreksi ulang dan penyempurnaan. Kegiatan ini dijadwalkan pada pekan kesatu dan kedua Juli dengan keluaran berupa koreksi draft. Selanjutnya Draft final buku Nota Keuangan dan RUU APBN disampaikan ke Menteri Keuangan untuk dikoreksi. Penyampaian ini dilakukan pada pekan ketiga Juli.

Sementara itu, penyusunan himpunan RKA-K/L sebagai bahan penyusunan Nota Keuangan, Rancangan Undang-Undang APBN, Rancangan APBN, dan dokumen pendukung pembahasan RAPBN dilakukan pada pekan kedua dan ketiga Juli. DJA menjadi penanggung jawab kegiatan ini dengan keluaran berupa himpunan RKA-K/L tahun anggaran yang direncanakan, dalam hal ini Himpunan RKA-K/L 2014.

Setelah Menteri Keuangan memberikan koreksi terhadap draft buku Nota Keuangan dan RUU APBN 2014, DJA melakukan finalisasi pada pekan keempat dan kelima Juli dan menghasilkan keluaran berupa Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2014. Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2014 ini kemudian dibahas dalam sidang kabinet paripurna dalam rangka pengesahan RAPBN 2014. Kegiatan ini dijadwalkan pada pekan kelima Juli dengan keluaran berupa hasil sidang kabinet pengesahan RUU APBN 2014.

Selanjutnya, DJA berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk melakukan pencetakan Buku Himpunan RKA-KL 2014 dan Buku Nota Keuangan serta RUU APBN 2014. Kegiatan ini menghasilkan keluaran berupa buku himpunan RKA-K/L 2014 dan Buku Nota Keuangan serta RUU APBN 2014.

Kegiatan ini dijadwalkan pada pekan kelima sampai dengan pekan kesatu Agustus. Bersama dengan proses penyusunan bahan RAPBN dan Nota Keuangan, DJA juga menyiapkan penyusunan advertorial RAPBN. Sebelum disampaikan kepada DPR, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan dokumen Nota Keuangan dan RUU APBN 2014 ke Sekretariat Negara untuk mendapatkan Amanat Presiden (Ampres). Pada pekan ketiga Agustus, Kementerian Keuangan c.q Sekretariat Jenderal menyampaikan buku Nota Keuangan dan RAPBN 2014 beserta Himpunan RKA-K/L 2014 ke DPR. **Tabel 2.9** mengilustrasikan secara ringkas proses penyusunan buku Nota Keuangan dan RAPBN 2014 serta Himpunan RKA-K/L 2014.

Tabel 2.9.
Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2014

No.	Uraian	Unit Terkait	Output	Keterangan
1.	Penulisan draft Nota Keuangan dan RAPBN beserta RUU APBN 2014	DJA, BKF, DJPK, DJPU, DJKN	Draft Nota Keuangan dan RAPBN	Minggu ke-1 Juni s.d Minggu ke-4 Juli
2.	Rapim pembahasan dan penetapan postur RAPBN 2014 dan <i>resources envelope</i> Pagu Anggaran	DJA, BKF, DJPK, DJPU	Hasil pembahasan postur RAPBN 2014 dan <i>resource envelope</i> pagu anggaran	Minggu ke-2 Juni
3.	Penyusunan Postur RAPBN 2014	DJA, BKF, DJPK, DJPU	Draft Postur RAPBN	Minggu ke-1 s.d ke-2 Juni
4.	Sidang Kabinet Terbatas Pembahasan Postur RAPBN 2014 dan Pagu Anggaran K/L	DJA	Hasil Sidang Kabinet Postur RAPBN 2014 dan Pagu Anggaran K/L	Minggu ke-3 Juni

5.	Penyampaian masukan Draft NK RAPBN 2014 dari Unit Eselon I terkait ke DJA untuk Penggabungan	DJA, BKF, DJPK, DJPU	Draft Penggabungan	Minggu ke-4 s.d ke-5 Juni
6.	Penyampaian draft Buku NK dan RUU RAPBN 2014 ke Eselon I terkait untuk koreksi ulang dan penyempurnaan	DJA	Koreksi draft	Minggu ke-1 s.d ke-2 Juli
7.	Penyampaian draft (final) Buku NK dan RUU APBN 2014 ke MK untuk koreksi	DJA	Koreksi Draft	Minggu ke-3 Juli
8.	Penyusunan Himpunan RKA-KL 2014	DJA	Himpunan RKA-KL 2014	Minggu ke-2 s.d ke-3 Juli
9.	Finalisasi Buku NK dan RUU APBN 2014 hasil koreksi MK	DJA	NK dan RUU APBN 2014	Minggu ke-4 s.d ke-5 Juli
10.	Sidang Kabinet Paripurna Pengesahan RAPBN 2014	DJA	Hasil Sidang Kabinet	Minggu ke-5 Juli
11.	Pencetakan Buku Himpunan RKA-KL 2014	DJA, Set.Jend. Kemenkeu	Buku Himpunan RKA-KL 2014	Minggu ke-5 Juli s.d Minggu ke-1 Agustus
12.	a. Pencetakan Buku NK dan RUU APBN 2014 ; b. Penyampaian Pidato Presiden beserta lampiran Pidato Presiden c. Penyampaian Buku NK dan RUU APBN 2014 kepada Sekretariat Negara untuk memperoleh Amanat Presiden (Ampres)	DJA, Set.Jend. Kemenkeu	Buku Nota Keuangan, RUU APBN, Pidato Presiden beserta lampirannya	Minggu ke-5 Juli s.d Minggu ke-1 Agustus
13.	Penyampaian Buku NK & RAPBN 2014 dan Himpunan RKA-KL 2014 ke DPR	Set.Jend		Minggu ke-3 Agustus

2.5. Penyampaian Dan Pembahasan RAPBN

Output dari kegiatan ini adalah laporan hasil pembahasan RAPBN tingkat I badan anggaran.

Pembahasan RAPBN antara Pemerintah dengan DPR diawali dengan pidato Presiden menyampaikan RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya. Untuk Nota Keuangan dan RUU APBN 2014, Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato pada pekan ketiga Agustus dalam rapat Paripurna DPR RI.

Dalam pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan ini, Pimpinan DPR menyampaikan pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) rencana pembahasan RUU APBN. DPD menyampaikan pertimbangan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Pertimbangan tertulis DPD selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPR. Hal ini sesuai dengan Pasal 154 dan Pasal 156 ayat 1 Tata Tertib DPR dan Pasal 256 dan Pasal 257 ayat (3) UU No.27 Tahun 2009.

Setelah mempelajari Nota Keuangan dan RUU APBN yang disampaikan oleh Presiden, masing-masing Fraksi memberikan pandangan umum atas RUU APBN beserta Nota Keuangannya. Pandangan umum Fraksi-fraksi ini meliputi pendapat dan tanggapan masing-masing Fraksi atas asumsi dasar ekonomi makro, target pendapatan serta rencana kebijakannya, alokasi belanja termasuk belanja subsidi dan anggaran pendidikan serta pembiayaan serta rencana kebijakannya. Pandangan umum ini disampaikan dalam rapat paripurna pada pekan keempat Agustus.

Terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi tersebut, DJA menyiapkan tanggapan pemerintah. Dalam proses penyiapan ini, DJA menyampaikan surat kepada instansi-instansi terkait yang bidang atau programnya menjadi obyek pandangan umum dari Fraksi untuk meminta sumbangan jawaban banggar. Misalnya, terkait iklim investasi dan usaha, maka sumber jawaban berasal dari Kementerian Keuangan, Menteri Perekonomian, dan Kementerian Perdagangan. Atau jika mengenai anggaran pendidikan, maka sumber jawaban berasal dari

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Bappenas, Menko Perekonomian dan DJAPK. Tanggapan Pemerintah ini dikompilasi sehingga menjadi dokumen resmi berupa laporan tanggapan pemerintah yang disampaikan pada rapat paripurna DPR RI pada pekan kelima Agustus.

Pembahasan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI dengan pemerintah (Menteri Keuangan, Kepala BPS dan Gubernur Bank Indonesia pada pekan kelima. Penanggung jawab rapat kerja ini dari pihak Kementerian Keuangan adalah DJA, BKF, dan DJPK. Agenda rapat kerja ini berupa Penyampaian pokok-pokok RUU APBN 2014 dan Pembentukan Panitia Kerja (Panja) yang terdiri dari: (i) Panja Asumsi dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RUU APBN 2014; (ii) Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU APBN 2014; (iii) Panja Transfer ke Daerah RUU APBN 2014; dan (iv) Panja Perumus Draft RUU APBN 2014.

Pembahasan antara Pemerintah dengan DPR mengenai RUU APBN juga dilakukan secara lebih khusus, di antaranya pembahasan mengenai asumsi dasar dalam RUU APBN 2014 dalam rapat kerja Komisi VII khususnya terkait asumsi lifting minyak dan volume subsidi, dan Komisi XI dengan mitra kerjanya. Rapat kerja ini dijadwalkan pada pekan kelima Agustus yang menghasilkan keluaran berupa hasil rapat kerja komisi. BKF menjadi penanggung jawab dari pihak Kementerian Keuangan dalam rapat kerja ini.

Rapat kerja juga dilakukan secara insentif antara Komisi I sampai dengan XI dengan masing-masing mitra kerjanya pada pekan kelima Agustus sampai dengan pekan kesatu September. Penanggung jawab dari pihak Kementerian Keuangan adalah Sekretariat Jenderal. Rapat Kerja ini membahas:

- a. Pembahasan RKA-K/L 2014 yang disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi;
- b. Pembahasan usulan program-program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus berdasarkan kriteria teknis dari Komisi; dan
- c. Pembahasan SLA dan pembiayaan anggaran lainnya.

Selain dibahas dalam rapat komisi, RUU APBN juga dibahas secara khusus dalam rapat Panitia Kerja (Panja). Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RUU APBN 2014 diselenggarakan pada pekan ketiga September. Penanggung jawab dari pihak Kementerian Keuangan adalah BKF.

Selanjutnya, Badan Anggaran mengadakan rapat internal untuk membahas postur RAPBN 2014, juga, pada pekan pertama Oktober. Dalam kegiatan rapat ini, tidak ada pihak pemerintah yang terlibat.

Setelah dibahas dalam rapat internal Badan Anggaran, Menteri Keuangan melakukan rapat dengan Badan Anggaran untuk menetapkan postur sementara RAPBN 2014 yang dijadwalkan pada pekan pertama Oktober. DJA dan BKF menjadi penanggung jawab wakil Pemerintah dalam Rapat Kerja yang keluarannya berupa postur sementara RAPBN 2014 hasil Raker.

Selanjutnya, pada pekan pertama Oktober juga dilakukan pembahasan Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU APBN 2014 dan Panja Transfer ke Daerah. Wakil dari Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab dalam rapat kedua Panja ini adalah DJA dan DJPK. Keluaran dari rapat Panja ini berupa laporan panja tentang belanja Pemerintah Pusat RUU APBN 2014 dan Transfer ke daerah. Kemudian pada pekan kedua Oktober, Tim Perumus memulai rapat untuk merumuskan Draft RUU APBN 2014. Instansi yang mewakili Menteri Keuangan untuk menjadi penanggung jawab pada tahapan ini adalah DJA. Rapat ini menghasilkan keluaran berupa laporan panja perumus dan RUU APBN hasil pembahasan panja Perumus.

Dalam proses penyusunan RUU APBN, DPR dapat memberikan usulan sesuai dengan hak *budget* yang dimilikinya. Oleh karena itu, RKA-K/L sebagai bahan penyusunan RUU APBN dapat dilakukan penyesuaian. Penyesuaian RKA-K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran dilakukan dalam rapat kerja masing-masing Komisi dengan mitra kerjanya. Rapat kerja ini diadakan pada pekan kedua sampai dengan ketiga Oktober dengan keluaran berupa usulan untuk penyesuaian RKA-K/L sesuai hasil Rapat Kerja Komisi.

Setelah seluruh panitia kerja dan Tim Perumus Draft RUU APBN melakukan pembahasan secara intensif, proses selanjutnya adalah melakukan sinkronisasi hasil pembahasan masing-masing panitia kerja dan Tim Perumus Tersebut dalam rapat internal Badan Anggaran. Dalam rapat ini juga disampaikan hasil penyesuaian RKA-K/L oleh Komisi bersama mitra kerjanya kepada Badan Anggaran dan Menteri Keuangan untuk ditetapkan. Rapat internal Badan Anggaran dijadwalkan pada pekan ketiga Oktober.

Dalam waktu yang hampir bersamaan juga dijadwalkan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan pemerintah (Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas), dan Gubernur Bank Indonesia. Keluaran dari rapat kerja ini berupa kesepakatan atas hasil pembahasan sebagai berikut:

- a. Penyampaian Laporan Pengesahan hasil Panja-Panja dan Tim Perumus Draft RUU;
- b. Pendapat akhir mini Fraksi sebagai sikap akhir;
- c. Pendapat Pemerintah; dan
- d. Pengambilan Keputusan untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II.

Dari hasil rapat kerja tersebut, masing-masing perwakilan Komisi yang menjadi anggota Badan Anggaran menyampaikan hasil pembahasan Badan Anggaran segera pada pekan keempat Oktober juga. Penyampaian anggota Badan Anggaran ini dilakukan kepada Komisi yang bersangkutan secara tertulis.

Tahapan penyampaian dan pembahasan RUU APBN oleh DPR bersama Pemerintah diakhiri oleh rapat paripurna pada pekan keempat Oktober. Keluaran rapat paripurna berupa hasil kesepakatan dari pembahasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Tingkat I Badan Anggaran;
- b. Pernyataan Persetujuan/penolakan dari setiap Fraksi secara Lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna; dan
- c. Penyampaian Pendapat Akhir Pemerintah.

Tahapan penyampaian dan pembahasan RUU APBN secara ringkas diilustrasikan pada **tabel 2.10**. Setelah proses penyampaian dan pembahasan, maka tahapan selanjutnya adalah penyusunan dan penetapan Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Tabel 2.10.
Penyampaian dan Pembahasan RUU APBN

No.	Uraian	Penanggung Jawab	Bahan yang Disiapkan	Output	Keterangan
1.	Rapat Paripurna DPR RI Presiden menyampaikan RUU APBN TA 2014 beserta Nota Keuangannya	DJA	Pidato Presiden (koordinator:Dit. PAPBN, DJA berkoordinasi dengan set.jend)		16 Agustus
2.	Rapat Kerja Dengan DPD DPD memberikan pertimbangan kepada DPR terhadap RUU APBN 2014 dan NK (UU No.27 tahun 2009, pasal 256)	DJA	Bahan paparan	Pertimbangan DPD atas NK dan RAPBN.	Paling lambat 14 hari sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden
3.	Rapat Paripurna DPR RI Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN TA 2014 beserta Nota Keuangannya	DJA		Pemandangan Umum dan Pertanyaan DPR	Minggu ke - 4 Agustus

4.	Rapat Paripurna DPR RI Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN TA 2014 beserta Nota Keuangannya	DJA	Jawaban tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum fraksi-fraksi	Laporan jawaban Tanggapan Pemerintah (Pidato Menteri Keuangan dan Lampiran)	Minggu ke-5 Agustus
5.	Rapat Kerja Badan Anggaran dg Pemerintah (Menkeu dan Bappenas), BPS dan Gub BI 1. Penyampaian Pokok-pokok RUU APBN 2014 2. Pembentukan Panja: a) Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RUU APBN 2014 b) Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU APBN 2014 c) Panja Transfer ke Daerah RUU APBN 2014 d) Panja Perumus RUU APBN 2014	DJA, BKF, DJPK	Paparan Menteri Keuangan tentang Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN TA 2014 - Paparan Menteri Keuangan - Draft awal kesimpulan - Konsep surat pengukuhan anggota Panja dari Pemerintah (berkoordinasi dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Setjend Kemenkeu).	Agenda pembahasan, dan jadwal -	Minggu ke-5 Agustus
6.	Raker Komisi VII dan Komisi XI dg Mitra	BKF	Paparan Menteri Keuangan	Laporan atau Berita Acara Pembahasan	Minggu ke-5 Agustus s.d Minggu ke-1

	Kerjanya Pembahasan Asumsi Dasar dalam RUU APBN 2014		tentang asumsi dan parameter RAPBN TA 2014	raker tentang asumsi dan parameter	September
7.	Raker Komisi I – XI dg Mitra Kerjanya 1. Pembahasan RKA K/L 2014 (disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk dinsinkronisasikan) . 2. Pembahasan usulan program ² yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi. 3. Pembahasan SLA dan pembiayaan anggaran lainnya.	Sekretariat Jenderal masing-masing K/L		Hasil Raker Komisi	Minggu ke-5 Agustus s.d Minggu ke-1 September
8.	Rapat Panja Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RUU APBN 2014	BKF, DJPU	Bahan paparan untuk panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan oleh Kepala BKF	Postur sementara APBN 2014, termasuk ruang fiskal untuk inisiatif baru III.	Minggu ke-3 September
9.	Rapat Internal Badan Anggaran Postur sementara APBN 2014	-		Hasil Rapat Banggar	Minggu ke-3 September

10.	Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan Penetapan Postur Sementara APBN 2014	DJA, BKF	Bahan paparan Menteri Keuangan	Hasil Raker (keepakatan postur sementara APBN 2014)	Minggu ke-1 Oktober
11.	Rapat Panja Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU APBN 2014	Para pemangku kepentingan Bagian Anggaran (BA) K/L, BA-BUN	Bahan paparan DJA dan masing-masing pemangku kepentingan.	Hasil rapat Panja-panja (keepakatan Panja mengenai Belanja Pemerintah Pusat)	Minggu ke-1 Oktober
12	Panja Transfer ke Daerah RUU APBN 2014	DJPK	Bahan paparan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan	Kesepakatan Panja mengenai Transfer ke Daerah	Minggu ke-1 Oktober
13.	Rapat Panja Perumus Perumusan RUU APBN 2014	Setjend. Kemenkeu, DJA	RUU, pembahasan, dll	Hasil Rapat Panja	Minggu ke-1 Oktober
14.	Raker Komisi dengan Mitra Kerjanya Penyesuaian RKA K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (selama 7 hari kerja untuk disampaikan kembali ke Badan Anggaran untuk ditetapkan)			Hasil Raker Komisi	Minggu ke-2 Oktober
15.	Rapat Internal Badan Anggaran 1. Sinkronisasi hasil Panja-Panja dan Tim Perumus Draft RUU	-		-	Minggu ke-2 Oktober

	2. Penyampaian hasil penyesuaian RKA K/L oleh Komisi dengan Mitra Kerjanya kepada Badan Anggaran dan Menkeu untuk ditetapkan				
16.	Rapat Kerja Badan Anggaran dg Menkeu dan Meneg. PPN/Kepala Bappenas dan Gub BI 1. Penyampaian Laporan Pengesahan hasil Panja-Panja dan Tim Perumus Draft RUU 2. Pendapat akhir mini Fraksi atas sikap akhir 3. Pendapat Pemerintah 4. Pengambilan Keputusan untuk dilanjutkan ke Tk. II	DJA	➤ Tanggapan Menteri Keuangan ➤ Lapran Panja yang ditandatangani oleh ketua Panja-Panja ➤ Kesimpulan Badan Anggaran yang ditandatangani oleh pimpinan Badan Anggaran, Menteri Keuangan dan diparaf pimpinan Panja-Panja	Hasil Raker	Minggu ke-3 Oktober
17.	Anggota Badan Anggaran dari Komisi menyampaikan hasil Pembahasan Badan Anggaran kepada Komisi yang bersangkutan secara tertulis	-		-	Minggu ke-4 Oktober

18.	Rapat Paripurna 1. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Tingkat I Badan Anggaran 2. Pernyataan Persetujuan/penolakan dari setiap Fraksi secara Lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna 3. Penyampaian Pendapat Akhir Pemerintah	DJA	Konsep Pidatp Menteri Keuangan	Hasil Rapat Paripurna	Minggu ke-4 Oktober
19.	Penyelesaian UU APBN	Setjend. Kemenkeu		UU APBN beserta nomornya	

2.6. Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Output yang dihasilkan dari tahapan ini adalah Kegiatan ini menghasilkan ketetapan atas RUU APBN menjadi APBN dan RKAKL.

Setelah RUU APBN dibahas antara Pemerintah dengan DPR yang diakhiri dengan rapat kerja antara Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia pada pekan pertama di bulan Oktober, maka hasil pembahasan ini dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. Sebelum menetapkan RUU APBN, rapat paripurna ini didahului dengan:

- Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;
- Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
- Pendapat akhir pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan disertai lampiran berupa Laporan kesepakatan Badan Anggaran dan pendapat akhir Pemerintah.

Hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan Rancangan APBN dan RUU tentang APBN yang berupa Laporan Panitia Kerja (ditandatangani oleh Pimpinan Panitia Kerja Banggar dan Direktur Jenderal) selaku coordinator panja dari pemerintah, dan Kesimpulan Badan Anggaran (ditandatangani oleh pimpinan Banggar, Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah) dengan disertai lampiran angka dasar belanja Kementerian Negara/Lembaga (ditandatangani Direktur Jenderal Anggaran). Selain itu, hasil penetapan RKA-K/L disampaikan kepada Menteri Keuangan, dengan terlebih dahulu disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan komisi terkait.

Setelah UU APBN dan RKA-K/L ditetapkan, maka Menteri Keuangan menerbitkan surat kepada Kementerian negara/Lembaga sesuai dengan berita acara hasil kesepakatan pembahasan RAPBN antara Pemerintah dengan DPR. Surat ini menjadi dasar alokasi anggaran untuk Kementerian/Lembaga sebagai batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian negara/Lembaga. Selanjutnya, dilakukan forum penelaahan RKA-K/L khususnya yang mengalami perubahan oleh DJA dengan Dit, Anggaran I, II, dan III sebagai penanggung jawab. Penelaahan ini untuk memastikan kesesuaian antara RKA-K/L dengan alokasi anggaran hasil kesepakatan dengan DPR.

RKA-K/L hasil penelaahan tersebut, kemudian dihimpun oleh Kementerian Keuangan c.q DJA untuk dijadikan bahan penyusunan Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. Penyusunan dan penetapan Keppres ini dijadwalkan pada pekan kedua Oktober sampai dengan pekan ketiga November. Berdasarkan Keputusan Presiden yang ditetapkan dan RKA-K/L, Kementerian negara/Lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Paling lambat tanggal 31 Desember, Menteri Keuangan harus sudah mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran untuk menjadi dasar bagi Kementerian negara/Lembaga melaksanakan kegiatan/programnya.

BAB III

SIKLUS PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBN SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II

Output dari kegiatan ini adalah laporan realisasi pelaksanaan APBN semester I dan prognosis semester II.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945, APBN harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga dalam pelaksanaannya, penggunaan anggaran harus dipantau dan diawasi agar tujuan pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan amanat UUD 1945 dapat tercapai. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan APBN, maka Pemerintah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran dalam periode semester pertama tahun anggaran berjalan kepada DPR sebagai representasi rakyat Indonesia, beserta perkiraan realisasi pelaksanaan APBN dalam semester kedua tahun anggaran berjalan yang disebut dengan prognosis.

Penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya, dalam ayat (2) pasal 27 UU No.17 tahun 2003 diatur mengenai ketentuan bahwa laporan realisasi semester I dan prognosis ini harus disampaikan selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran berjalan yang kemudian dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah Pusat. Pada bab ini akan dibahas siklus penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis semester II tahun anggaran berjalan.

3.1. Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II

Secara periodik, DJA c.q Dit. P-APBN menerima laporan realisasi pelaksanaan APBN dari DJPb yang dikompilasi dalam dokumen yang dikenal sebagai Buku Merah. Laporan ini secara berkala mencakup realisasi sampai dengan

tanggal 7, 15, 22, dan 28 setiap bulan dalam tahun anggaran berjalan. Kemudian, laporan-laporan yang secara berkala diterima ini oleh Dit.P-APBN ditabulasikan dalam bentuk laporan realisasi dan *exercise*. Mulai akhir Mei, Dit. P-APBN menyiapkan penyusunan draft dokumen laporan semester I dan prognosis semester II. Proses penyampaian Laporan Semester I dan Prognosis Semester II dilakukan pada pekan pertama Juni dengan dilakukannya rapat koordinasi antar Unit Eselon II DJA.

Setelah dibahas dalam rapat koordinasi antar unit Eselon II DJA, pada pekan pertama bulan Juni, dilakukan rapat pimpinan DJA untuk berkoordinasi dengan unit Eselon I. Rapim ini membahas perkiraan realisasi semester I dan Prognosis Semester II dan Perkiraan Realisasi APBN tahun anggaran berjalan.

Pembahasan ini dilanjutkan dalam rapat pimpinan Kementerian Keuangan yang dijadwalkan pada pekan pertama Juni, dengan pokok-pokok pembicaraan:

- a. Penetapan angka perkiraan realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN;
- b. Penetapan Angka Perkiraan Realisasi APBN; dan
- c. Penyampaian draft final dokumen Laporan Perkiraan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN tahun anggaran berjalan oleh DJA c.q Dit P-APBN ke seluruh Eselon I Kementerian Keuangan.

Pada pekan kedua Juni, Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan menyampaikan masukan terkait draft dokumen Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II kepada DJA. Selanjutnya, DJA c.q Dit. P-APBN meneliti, memeriksa dan mengakomodasi masukan dari unit Eselon I Kementerian Keuangan. Oleh Dit. P-APBN, masukan dari unit Eselon I tersebut dikompilasi menjadi draft final dokumen Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II.

Draft final dokumen Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan pada pekan ketiga Juni. Setelah Menteri Keuangan menyampaikan koreksi pada pekan ketiga Juni, draft kemudian diperbaiki oleh Dit.P-APBN untuk mengakomodasi hasil koreksi dari

Menteri Keuangan tersebut. Draft ini kemudian dibahas pada sidang Kabinet pada pekan keempat Juni untuk ditetapkan. Dalam sidang kabinet ini, tidak tertutup kemungkinan terdapat masukan dan hal-hal lain untuk dikoreksi kembali. Tim Koreksi kemudian menyempurnakan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN tahun anggaran berjalan pada pekan keempat Juni. Setelah proses penetapan dari sidang kabinet, Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN tahun anggaran berjalan dicetak pada pekan keempat Juni. Untuk selanjutnya, disampaikan kepada DPR pada awal Juli. **Tabel 3.1** mengilustrasikan jadwal penyusunan laporan realisasi semester I dan prognosis semester II.

Tabel 3.1.
Penyusunan Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II

No.	Uraian	Penanggung Jawab	Output	Keterangan
1.	Penyampaian laporan realisasi sampai dengan tanggal 7,15, 22, dan 28 setiap bulan	DJPb	Buku Merah realisasi bulanan	Disampaikan secara berkala setiap bulan
2.	Pentabulasian laporan realisasi bulanan APBN	DJA	<i>Exercise</i> hasil tabulasi	Dilakukan setiap menerima penyampaian Buku Merah
3.	Penyusunan draft dokumen Laporan Realisasi pelaksanaan APBN semester I dan Prognosis semester II	Dit. P-APBN, DJA	Draft Laporan Realisasi semester I dan Prognosis semester II	Minggu ke -4 Mei
4.	Rapat Koordinasi antar Unit Eselon II DJA	DJA	Perkiraan realisasi semester I dan Prognosis semester II	Minggu ke-1 Juni

5.	Rapim DJA Koordinasi antar Unit Eselon I : a. Perkiraan realisasi semester I dan Prognosis Semester II. b. Perkiraan realisasi APBN/RAPBN-P.	DJA	Perkiraan realisasi semester I dan Prognosis semester II serta Perkiraan realisasi hasil Rapim	Minggu ke-1 Juni
6.	Rapim Kementerian Keuangan: a. Penetapan Angka Perkiraan Realisasi Semester I dan Prognosis Sem II APBN. b. Penetapan Angka Perkiraan Realisasi APBN. c. Penyampaian Draft Final dokumen Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN ke seluruh Eselon I Kementerian Keuangan.	DJA	Draft Final Laporan Realisasi Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II APBN ke seluruh Eselon I Kementerian Keuangan	Minggu ke-1 Juni
7.	Penyampaian Draft dokumen final Laporan realisasi Semester I dan Prognosis Semester II dari unit Eselon I Kementerian Keuangan ke DJA .	Unit Eselon I Kementerian Keuangan ke DJA	Perbaikan Laporan realisasi Semester I dan Prognosis Semester II mengakomodasi masukan dari unit Eselon I lain.	Minggu ke-2 Juni
8.	Penyampaian Draft dokumen final Laporan realisasi	DJA	Hasil koreksi dari Menteri Keuangan	Minggu ke-3 Juni

	Semester I dan Prognosis Semester II ke Menteri Keuangan			
9.	Hasil koreksi Menteri Keuangan atas draft final Laporan realisasi Semester I dan Prognosis Semester II	Dari Menteri Keuangan ke DJA	Draft final perbaikan setelah mengakomodasi koreksi dari Menteri Keuangan	Minggu ke-3 Juni
10.	Sidang Kabinet penetapan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN	DJA	Penetapan Perkiraan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN	Minggu ke-4 Juni
11.	Koreksi draft Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN	Tim Koreksi	Laporan realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN (sambil menunggu realisasi per akhir Juni)	Awal Juli
12.	Pencetakan buku Laporan Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II	Setjen Kementerian Keuangan	Buku Laporan Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II	Minggu ke-4 Juni
13.	Penyampaian Buku Laporan Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II APBN ke DPR	Setjend Kementerian Keuangan		Pekan ke-1 Juli

3.2. Penyampaian dan Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II

Setelah Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II pelaksanaan APBN dicetak dalam bentuk buku, Pemerintah menyampaikan buku ini

kepada DPR pada pekan pertama di bulan Juli. Untuk selanjutnya, berdasarkan amanat pasal 27 ayat (2) UU No.17 tahun 2003, dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah. Pembahasan ini diawali dengan rapat kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Rapat Panitia Kerja Perumus Kesimpulan, Rapat Internal Badan Anggaran, dan diakhiri dengan rapat kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia mengenai laporan dan pengesahan hasil pembahasan Panitia Kerja Perumus.

Pembahasan antara Pemerintah dengan DPR ini hanya dilakukan pada tataran Badan Anggaran dan tidak dibahas dalam rapat paripurna. Selain itu, dalam pembahasan ini, Pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan dan tidak melibatkan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Namun demikian, rapat pembahasan ini melibatkan Gubernur Bank Indonesia. Untuk pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II pelaksanaan APBN, Menteri Keuangan didampingi oleh DJA dan DJPb.

Rapat kerja antara Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dilaksanakan pada pekan pertama Juli. Pada rapat kerja ini, Menteri Keuangan menyampaikan pokok-pokok Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA anggaran berjalan, dalam hal ini tahun anggaran 2013. Kemudian, rapat kerja menentukan pembentukan Panitia Kerja Perumus Kesimpulan Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN. Keluaran dari tahapan ini berupa laporan Menteri Keuangan atas pokok-pokok Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II beserta terbentuknya Panitia Perumus Kesimpulan Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN.

Setelah dibentuk Panitia Kerja Perumus, pada pekan pertama di bulan Juli, dilaksanakan pembahasan materi Panitia Kerja Perumus Kesimpulan Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN tahun anggaran berjalan. Pada kesempatan ini, DPD menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan APBN kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Pengawasan oleh DPD atas pelaksanaan APBN ini berdasarkan Pasal 22 D ayat (3) UUD 1945. Keluaran dari kegiatan ini berupa materi hasil

pembahasan Panja Perumus Kesimpulan dengan mengakomodasi masukan dari DPD.

Pada pekan kedua Juli, pembahasan dilakukan dalam rapat internal Badan Anggaran. Dalam rapat internal ini Panitia Kerja Perumus Kesimpulan menyampaikan laporan hasil pembahasan Panja terkait Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013 kepada Badan Anggaran.

Hasil pembahasan rapat internal kemudian dibahas dalam rapat kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan pada pekan kedua Juli. Panitia Kerja Perumus Kesimpulan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN menyampaikan laporan mengenai hasil pembahasannya. Kemudian, dalam rapat kerja ini, Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013 disahkan. **Tabel 3.2** mengilustrasikan jadwal Penyampaian dan Pembahasan laporan realisasi pelaksanaan APBN semester I dan prognosis semester II.

Tabel 3.2.

Penyampaian dan Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II

No.	Uraian	Penanggung Jawab	Bahan yang disiapkan	Output	Keterangan
1.	Pemerintah menyampaikan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA 2013	DJA			Pekan ke-1 Juli
2.	Raker Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur BI 1. Menteri Keuangan	DJA	- Paparan Menteri Keuangan - Draft awal kesimpulan	1. Laporan Menteri Keuangan atas pokok-pokok Laporan	Pekan ke-1 Juli

	<p>menyampaikan pokok-pokok Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA 2013</p> <p>2. Pembentukan Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN TA 2013</p>		<p>- Konsep surat pengukuhan anggota Panja dari Pemerintah (berkoordinasi dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Setjend Kemenkeu).</p>	<p>Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II</p> <p>2. Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN</p>	
3.	DPD menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan APBN kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti	Set Banggar		Laporan hasil pengawasan DPD	Pekan ke-1 Juli
4.	Rapat Panitia Kerja Perumus Kesimpulan Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN	DJA	Draft final kesimpulan panitia kerja.	hasil pembahasan Panja Perumus Kesimpulan dengan mengakomodasi masukan dari DPD	Pekan ke-1 Juli
5.	Rapat internal Banggar	Banggar		Laporan Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA 2013	Pekan ke-2 Juli

6.	Rapat Kerja Badan Anggaran dg Menkeu & Gub. Bank Indonesia	DJA		Laporan dan pengesahan hasil pembahasan Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA 2013	Pekan ke-2 Juli
----	--	-----	--	---	-----------------

BAB IV

SIKLUS PENYUSUNAN APBN PERUBAHAN

Output dari kegiatan ini adalah dokumen Nota Keuangan dan Undang-undang APBN Perubahan.

Perubahan atau penyesuaian terhadap APBN dimungkinkan untuk dilakukan berdasarkan UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Perubahan APBN dilakukan bila terjadi: (i) Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN; (ii) Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; (iii) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan (iv) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SAL) tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran pada tahun yang berjalan. Kemungkinan perubahan APBN dan hal-hal yang menjadi syarat dilakukannya perubahan APBN tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (3).

Selain itu, Pasal 161 UU No.27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, diatur juga mengenai perubahan APBN tahun anggaran berjalan. Dalam hal terjadi perubahan asumsi ekonomi makro dan/atau perubahan postur APBN yang sangat signifikan, Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Perubahan asumsi ekonomi makro yang sangat signifikan berupa prognosis:

- a. Penurunan pertumbuhan ekonomi, minimal 1% di bawah asumsi yang telah ditetapkan; dan/atau
- b. Deviasi asumsi ekonomi makro lainnya minimal 10% dari asumsi yang telah ditetapkan; kecuali lifting dengan deviasi paling rendah 5%.

Sementara itu, perubahan postur APBN yang sangat signifikan berupa prognosis:

- a. Penurunan penerimaan perpajakan minimal 10% (sepuluh persen) dari pagu yang telah ditetapkan;

- b. Kenaikan atau penurunan belanja kementerian/lembaga minimal 10% (sepuluh persen) dari pagu yang telah ditetapkan;
- c. Kebutuhan belanja yang bersifat mendesak dan belum tersedia pagu anggarannya; dan/atau
- d. Kenaikan defisit minimal 10% (sepuluh persen) dari rasio defisit APBN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang telah ditetapkan.

Pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang perubahan APBN dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran dan komisi terkait dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam masa sidang, setelah rancangan undang-undang tentang perubahan APBN diajukan oleh Pemerintah kepada DPR.

Proses pembahasan RUU perubahan APBN sama dengan APBN induk, namun tidak melalui tahap pandangan umum fraksi dan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi. Proses ini melalui tahapan penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan (APBN-P), Rapat Kerja Panitia Anggaran dengan Menteri Keuangan dan Gubernur BI, Rapat Kerja Komisi dengan Mitra Kerjanya, Rapat Kerja Komisi VII dan Komisi XI, Rapat Panitia Kerja, dan diakhiri dengan Rapat Paripurna DPR RI.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (5) UU No.17 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perubahan APBN tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.

4.1. Penyusunan Dan Penyampaian Nota Keuangan, RAPBN-P Serta RUU APBN-P

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan APBN, sejak dimulainya pelaksanaan tahun anggaran, DJA melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi atas realisasi indikator ekonomi makro terkait dengan asumsi dasar ekonomi makro dan realisasi APBN tahun anggaran berjalan. Kegiatan ini menghasilkan keluaran

berupa laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBN. Dari kegiatan ini, dapat diketahui kemungkinan terdapatnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi realisasi pelaksanaan APBN sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 ayat (3) UU No.17 tahun 2003.

Dalam kondisi normal, untuk memonitor faktor-faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi APBN, maka sejak APBN mulai dilaksanakan dilakukan monitoring pelaksanaan APBN dan *exercise* perkiraan realisasinya. Terkait kegiatan tersebut, dilakukan koordinasi mengenai *outlook* asumsi dasar ekonomi Makro tahun anggaran berjalan. DJA menjadi penanggung jawab koordinasi ini yang akan menghasilkan keluaran berupa draft postur APBN-P.

Karena APBN 2014 disusun berdasarkan perkiraan realisasi APBN 2013, maka bila pada akhir tahun 2013 terdapat perbedaan yang signifikan antara realisasi dengan perkiraan realisasinya, maka harus segera dilakukan reviu terhadap besaran APBN 2014. Hal tersebut dapat menjadi iindikasi bahwa RAPBN perubahan 2014 harus disampaikan ke DPR lebih awal dari jadwal normal.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi tersebut, secara periodik diadakan rapat di lingkungan DJA terkait kebijakan yang akan diambil. Dalam rapat yang diselenggarakan selama pekan keempat sampai dengan kelima Maret ini dihasilkan keluaran berupa kesepakatan terkait kemungkinan penyesuaian APBN untuk tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan *outlook* asumsi dasar ekonomi Makro yang diperoleh dari hasil koordinasi tersebut, dilakukan penyusunan *exercise* dan penetapan postur APBN-P 2013. *Exercise* ini bertujuan untuk menyusun draft APBN-P dengan berbagai skenario kebijakan. Kegiatan ini dilakukan oleh DJA c.q Dit. P-APBN sepanjang bulan Maret sampai dengan bulan April ketika draft RAPBN-P siap diajukan ke DPR.

Skenario ini diperlukan untuk mengendalikan APBN, sehingga menjadi lebih realistis misalnya ketika situasi pertumbuhan ekonomi diperkirakan tidak mencapai target, maka target penerimaan dari perpajakan sulit untuk dicapai. Kondisi belanja yang lebih besar dari pendapatan ini dapat memperbesar defisit APBN yang untuk menutupnya, maka harus ditetapkan sumber-sumber pendanaan. Sehubungan

dengan keterbatasan penggunaan Sisa Anggaran Lebih dan pembiayaan melalui penjualan barang milik Negara, maka sisa defisit harus ditutup dengan menerbitkan surat utang atau melakukan pemotongan belanja.

Berkenaan dengan dampak APBN terhadap ketahanan fiskal, bahkan perekonomian Indonesia, maka proses penyusunan *exercise* dan penetapan postur APBN-P harus dilakukan secermat mungkin. Penyusunan *exercise* ini dilakukan dengan memperhatikan besaran target defisit yang tetap memungkinkan untuk memberi ruang bagi program-program pembangunan dan pengentasan kemiskinan namun tetap pada besaran yang mampu diserap pembiayaan APBN sehingga tidak membebani generasi yang akan datang.

Selama pekan kesatu bulan Mei, pembahasan postur APBN kemudian dilakukan dalam rapat koordinasi antar Unit Eselon II DJA. Dari hasil rapat koordinasi ini, banyak terdapat masukan yang memungkinkan postur APBN yang telah disusun oleh Dit. P-APBN berubah, terutama jika terdapat kebijakan atau perubahan asumsi dasar ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, dan keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini juga menghasilkan keluaran berupa draft postur RAPBN-P.

Selain penyusunan postur RAPBN-P, Dit.P-APBN juga menyiapkan draft Nota Keuangan draft RUU RAPBN-P yang akan dibahas pada Rapat Pimpinan DJA dalam rangka koordinasi antar unit Eselon I. Rapim ini dilakukan pada pekan kesatu sampai kedua bulan Mei untuk membahas draft RUU RAPBN-P sehingga dicapai kesepakatan mengenai draft postur hasil pembicaraan Rapim antar unit Eselon I.

Pada jadwal yang hampir bersamaan pula, yaitu pekan kedua bulan Mei, diselenggarakan rapat pimpinan Kementerian Keuangan yang menghasilkan keluaran berupa hasil kesepakatan. Pada kesempatan ini juga, DJA selaku penanggung jawab menyampaikan draft Nota Keuangan dan RUU APBN-P ke seluruh Eselon I Kementerian Keuangan terkait seperti BKF, DJPK, dan DJPU. Masukan dari unit Eselon I ini dijadwalkan diterima juga pada pekan kedua bulan

Mei. Oleh DJA c.q Dit. P-APBN, masukan ini diakomodasi dalam bentuk perbaikan draft Nota Keuangan dan RAPBN-P beserta RUU-nya beserta draft bahan rapim.

Draft Nota Keuangan dan RAPBN-P beserta RUU-nya yang telah diperbaiki dengan mengakomodasi masukan dari unit Eselon I lain kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dikoreksi pada pekan kedua bulai Mei. Setelah Menteri Keuangan menyampaikan koreksi, pada pekan ketiga Mei, draft Nota Keuangan dan RAPBN-P beserta RUU-nya diperbaiki dan dilengkapi sesuai dengan hal-hal terdapat dalam koreksi Menteri Keuangan. Selanjutnya, DJA, BKF, DJPK, dan DJPU menyiapkan draft bahan sidang kabinet.

Sidang kabinet pengambilan keputusan terkait APBN-P dijadwalkan pada pekan ketiga bulan Mei. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Pusat Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) dengan keluaran berupa keputusan sidang kabinet

Berdasarkan masukan yang diperoleh sampai dengan sidang kabinet, maka sebagai penanggung jawab, DJA c.q Dit. P-APBN melakukan kegiatan penulisan Nota Keuangan dan RAPBN-P tahun anggaran berjalan beserta RUU APBN-P. Penulisan ini dilakukan selama pekan ketiga bulan Mei dengan keluaran berupa Nota Keuangan dan RAPBN-P 2013 serta RUU APBN-P 2013. Selanjutnya, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan RUU APBN-P ke Sekretariat Negara untuk memperoleh Ampres dan dilanjutkan ke DPR yang dijadwalkan pada pekan ketiga bulan Juni. Selanjutnya, dalam tenggat waktu yang sama, Sekretariat Jenderal menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN-P ke DPR untuk dilakukan pembahasan.

Tabel 4.1 mengikhtisarkan tahapan kegiatan penyusunan Nota Keuangan, RAPBN-P beserta RUU-nya.

Tabel 4.1.
Penyusunan Nota Keuangan, RAPBN-P serta RUU APBN-P

No.	Uraian	Penanggung Jawab	Bahan yang disiapkan	Output	Keterangan
1.	Monitoring dan Evaluasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Realisasi APBN	DJA		Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Sejak awal tahun, atau bahkan akhir tahun sebelumnya bila ada percepatan
2.	Rapat koordinasi outlook asumsi dasar ekonomi makro 2013 dan realisasi APBN	DJA	Draft Postur	Draft postur	Minggu ke-1 s.d ke -4 Maret
3.	Rapat terkait perubahan kebijakan dan besaran yang akan diambil dalam APBN-P 2013	DJA	Draft usulan	Kesepakatan	Minggu ke-4 s.d ke-5 Maret
4.	Penyusunan <i>exercise</i> dan penetapan postur RAPBN-P 2013	DJA	Draft Postur	Draft Postur	Awal Maret s.d Minggu ke-4 April
5.	Rapat Koordinasi antar Unit Eselon II DJA	DJA	Paparan postur dan usulan perubahan	Draft Postur	Minggu ke-1 Mei
6.	Rapim DJA Koordinasi antar Unit Eselon I terkait Draft RUU RAPBNP	DJA, BKF, DJPK, DJPU.	Paparan postur dan usulan perubahan	Draft Postur	Minggu ke-1 s.d ke-2 Mei
7.	Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBNP 2013 beserta RUU nya	DJA	Bahan NK dan RUU APBNP	Draft NK dan RUU APBNP	Minggu ke-3 April s.d ke-3 Mei

8.	Rapim Kementerian Keuangan: ➤ Penyampaian Draft Nota Keuangan dan RUU APBN-P ke seluruh Eselon I Kementerian Keuangan.	DJA Ke Es 1 Kemkeu			Minggu ke-2 Mei
9.	Penyampaian Draft final Nota Keuangan dan RUU APBN-P dari unit Eselon I Kementerian Keuangan ke DJA .	Unit Eselon I Kementerian Keuangan ke DJA		Perbaikan Nota Keuangan dan RUU APBN-P mengakomodasi masukan dari unit Eselon I lain.	Minggu ke-2 Mei
10.	Penyampaian Draft final Nota Keuangan dan RUU APBN-P ke Menteri Keuangan	DJA		Hasil koreksi dari Menteri Keuangan	Minggu ke-2 Mei
11.	Hasil koreksi Menteri Keuangan atas draft final Nota Keuangan dan RUU APBN-P	Dari Menteri Keuangan ke DJA	Bahan paparan Menteri Keuangan dan draft kesimpulan	Draft final perbaikan setelah mengakomodasi koreksi dari Menteri Keuangan	Minggu ke-3 Mei
12.	Sidang Kabinet Pengambilan Keputusan postur dan kebijakan RAPBN-P 2013	Pushaka		Keputusan Sidang Kabinet	Minggu ke-3 Mei
13.	Penulisan NK dan RAPBN-P 2013 serta RUU APBN-P 2013	DJA		NK dan RAPBN-P 2013 serta RUU APBN-P 2013	Minggu ke-3 Mei

14.	Penyampaian RUU APBN-P 2013 ke Setneg sebagai lampiran untuk memperoleh Ampres dilanjutkan ke DPR	Setjend. Kementerian Keuangan		Dokumen RUU APBN-P	Minggu ke-3 Mei
15.	Penyampaian NK dan RAPBN-P 2013 ke DPR	Setjend. Kementerian Keuangan		Dokumen RUU APBN-P	Minggu ke-3 Mei

4.2. Pembahasan RUU Tentang Perubahan APBN

Setelah DPR menerima dokumen Nota Keuangan dan RUU APBN-P, maka pada pekan keempat bulan Mei, DPR menggelar rapat paripurna. Dalam rapat diumumkan tentang RUU Perubahan APBN tahun anggaran berjalan beserta Nota Perubahannya yang akan dibahas oleh Badan Anggaran dan komisi terkait. Kemudian dilanjutkan dengan rapat kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, dengan agenda:

1. Penyampaian Pokok-pokok RUU Perubahan APBN TA 2013
2. Pembentukan:
 - a. Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RUU Perubahan APBN TA 2013;
 - b. Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU APBN-P TA 2013;
 - c. Panja Belanja Transfer ke Daerah RUU APBN-P TA 2013; dan
 - d. Panja Perumus Draft RUU Perubahan APBN TA 2013.

Seperti halnya dalam penyusunan APBN dan laporan Semester I dan Prognosis Semester II, DPD yang memiliki peran pengawasan atas pelaksanaan APBN menyampaikan masukan kepada DPR hasil pengawasannya sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti dalam proses penyusunan RAPBN-P dan RUU APBN-P.

Selama pekan keempat sampai dengan kelima bulan Mei, dilaksanakan rapat kerja komisi dengan mitra kerjanya. Pembahasan asumsi dasar dalam RUU

Perubahan APBN TA 2013 dibahas dalam rapat kerja antara Komisi VII dan Komisi XI dengan mitra kerjanya. Sementara itu, pembahasan perubahan RKA K/L Perubahan APBN TA 2013 dibahas dalam rapat kerja Komisi I sampai dengan Komisi XI dengan mitra kerjanya. Hasil rapat kerja komisi dengan mitra kerja masing-masing mengenai pembahasan perubahan RKA-K/L dan asumsi dasar Perubahan APBN TA 2013 disampaikan pada pekan kelima bulan Mei.

Pembahasan dilanjutkan dengan rapat Panitia Kerja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan pada pekan kesatu sampai dengan pekan pertama bulan Juni. Sementara itu, Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dan Panitia Kerja Transfer ke Daerah mengadakan rapat pada pekan kedua bulan Juni. Sedangkan Tim Perumus Draft RUU Perubahan APBN TA 2013 mengadakan rapat untuk membahas draft RUU Perubahan APBN TA 2013 pada pekan kedua bulan Juni.

Untuk menyelaraskan RKA-K/L Perubahan dengan hasil sinkronisasi dalam pembahasan di Badan Anggaran, masing-masing Komisi kembali melakukan rapat kerja dengan mitra kerjanya setelah raker Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Rapat kerja ini dilakukan pada pekan kedua Juni dengan keluaran berupa penyempurnaan Perubahan RKA-K/L. Hasil penyempurnaan RKA-K/L yang dibahas dalam rapat kerja antara Komisi dengan Mitra Kerjanya, kemudian disampaikan kepada Badan Anggaran dan Menteri Keuangan untuk ditetapkan pada pekan kedua bulan Juni.

Setelah Panja-panja mengadakan rapat pembahasan dan rapat Tim Perumus, Badan Anggaran mengadakan rapat internal pada pekan kedua bulan Juni. Rapat ini dalam rangka melakukan sinkronisasi antara hasil kesepakatan yang dihasilkan dari rapat Panitia Kerja dengan Tim Perumus Draft RUU Perubahan APBN TA 2013.

Hasil dari rapat internal Badan Anggaran ini dijadikan bahan pertimbangan dalam rapat kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang juga dilaksanakan pada pekan kedua bulan Juni. Rapat kerja ini dengan agenda:

1. Penyampaian laporan & pengesahan hasil Panja-Panja dan Tim Perumus Draft RUU Perubahan APBN TA 2013;
2. Pendapat akhir mini Fraksi sbg sikap akhir;
3. Pendapat Pemerintah; dan
4. Pengambilan keputusan untuk dilanjutkan ke Tk.II ttg RUU Perubahan APBN TA 2013.

Tahap akhir pembahasan RAPBN-P dan RUU APBN-P antara pemerintah dengan DPR adalah rapat paripurna yang dijadwalkan pada pekan ketiga bulan Juni. Agenda rapat paripurna ini meliputi:

1. Penyampaian laporan hasil pembahasan Tk.I RUU Perubahan APBN TA 2013 di Badan Anggaran;
2. Pernyataan persetujuan/penolakan dari setiap Fraksi secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna; dan
3. Penyampaian pendapat akhir Pemerintah atas RUU Perubahan APBN TA 2013.

Tabel 4.2 mengilustrasikan siklus pembahasan Rancangan Undang-undang Perubahan APBN antara Pemerintah dan DPR dengan asumsi Perubahan APBN tidak mengalami percepatan. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa siklus pembahasan dan penetapan RUU Perubahan APBN tidak lebih dari satu bulan. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 161 UU No.27 tahun 2009 yang mengatur bahwa Pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang perubahan APBN dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran dan komisi terkait dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam masa sidang, setelah rancangan undang-undang tentang perubahan APBN diajukan oleh Pemerintah kepada DPR.

Tabel 4.2.
Jadwal pembahasan RAPBN-P serta RUU APBN-P

No.	Uraian	Penanggung Jawab	Output	Keterangan
1.	Penyampaian NK dan RAPBN-P 2013 ke DPR	Setjend. Kementerian Keuangan	Dokumen RUU APBN-P	Minggu ke-4 Mei

2.	Rapat Paripurna DPR RI	DJA	Pengumuman dalam Rapat Paripurna ttg RUU Perubahan APBN TA 2013 beserta Nota Perubahannya dan akan dibahas oleh Badan Anggaran dan komisi terkait	20 Mei 2013 (Minggu ke-4 Mei)
3.	Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia	DJA	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian Pokok-pokok RUU Perubahan APBN TA 2013 - Pembentukan: <ul style="list-style-type: none"> a. Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RUU Perubahan APBN TA 2013 b. Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU APBN-P TA 2013 c. Panja Belanja Transfer ke Daerah RUU APBN-P TA 2013 d. Tim Perumus Draft RUU Perubahan APBN TA 2013 	22 Mei 2013 (Minggu ke-4 Mei)

4.	DPD menyampaikan pengawasan atas pelaksanaan APBN kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak	Set Banggar	Laporan DPD	Minggu ke-4 Mei
5.	Raker Komisi VII dan Komisi XI dg Mitra Kerjanya tentang: 1. Asumsi dasar ekonomi makro: - Pertumbuhan ekonomi; - Inflasi; - Tingkat Suku Bunga SPN 2. Parameter: - Lifting minyak dan gas - ICP	Set Banggar	asumsi dasar dalam RUU Perubahan APBN TA 2013	23 Mei s.d 27 Mei (Minggu ke-4 s.d ke-5 Mei)
6.	Raker Komisi I dan Komisi IX dg Mitra Kerjanya	Set Banggar	Perubahan RKA K/L Perubahan APBN TA 2013	23 Mei s.d 29 Mei 2013 (Minggu ke-4 s.d ke-5 Mei)
7.	Komisi menyampaikan hasil rapat kerja Komisi dengan mitra kerjanya tentang pembahasan perubahan RKA-KL dan asumsi dasar Perubahan APBN TA 2013	Set Banggar	hasil rapat kerja Komisi dengan mitra kerjanya tentang pembahasan perubahan RKA-KL dan asumsi dasar Perubahan APBN	30/31 Mei 2013 (Minggu ke-5 Mei)
8.	Rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit & Pembiayaan dalam RUU Perubahan APBN TA 2013	BKF, DJA, DJPU	Hasil Panja	5 s.d 13 Juni 2013 (Minggu ke-1 s.d ke-2 Juni)
9.	Rapat Panja 1. Panja Belanja Pemerintah Pusat 2. Panja Transfer ke Daerah	BKF, DJA, DJPK	Hasil Panja	12 s.d 14 Juni 2013 (Minggu ke-2 Juni)

10.	Raker Komisi dg Mitra Kerjanya Penyempurnaan Perubahan RKA K/L 2013 sesuai hasil pembahasan di Badan Anggaran	Set Banggar Setjen Kemkeu	Perubahan RKA K/L 2013 sesuai hasil pembahasan di Badan Anggaran	12 Juni 2013 (Minggu ke-2 Juni)
11.	Rapat Panja Perumus Draft RUU Perubahan APBN TA 2013	DJA	Draft RUU Perubahan APBN TA 2013 hasil pembahasan	12 Juni 2013 (Minggu ke-2 Juni)
12.	Penyampaian hasil penyempurnaan RKA K/L oleh Komisi dg Mitra Kerjanya kepada Badan Anggaran & Menkeu untuk ditetapkan	DJA	hasil penyempurnaan RKA K/L oleh Komisi dg Mitra Kerjanya kepada Badan Anggaran & Menkeu untuk ditetapkan	13 Juni 2013 (Minggu ke-2 Juni)
13.	Rapat Internal Badan Anggaran Sinkronisasi hasil Panja-Panja dan Timus Draft RUU Perubahan APBN TA 2013	Set Banggar	Hasil Sinkronisasi	13 Juni 2013 (Minggu ke-2 Juni)
14.	Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah (Menteri Keuangan dan Bappenas), BPS dan Gubernur Bank Indonesia 1. Penyampaian laporan & pengesahan hasil Panja- Panja dan Tim Perumus Draft RUU Perubahan APBN TA 2013 2. Pendapat akhir mini Fraksi sbg sikap akhir 3. Pendapat Pemerintah 4. Pengambilan keputusan untuk dilanjutkan ke Tk.II ttg RUU Perubahan APBN TA 2013	Kemkeu, BI	Hasil Raker	14 Juni 2013 (Minggu ke-2 Juni)

15.	<p>Rapat Paripurna</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian laporan hasil pembahasan Tk.I RUU Perubahan APBN TA 2013 di Badan Anggaran 2. Pernyataan persetujuan/penolakan dari setiap Fraksi secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna 3. Penyampaian pendapat akhir Pemerintah atas RUU Perubahan APBN TA 2013 	DJA	RAPBN dan RUU APBN Perubahan	17 Juni 2013 (Minggu ke-3 Juni)
-----	--	-----	------------------------------	------------------------------------

BAB V

SIKLUS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBN atau APBN-P. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 30 ayat (1), Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012 mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan kementerian negara/lembaga (K/L), beserta jenjang struktural di bawahnya seperti eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan satuan kerja pengguna dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

LKPP dihasilkan melalui sistem akuntansi terintegrasi yang disebut Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) sesuai dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011.

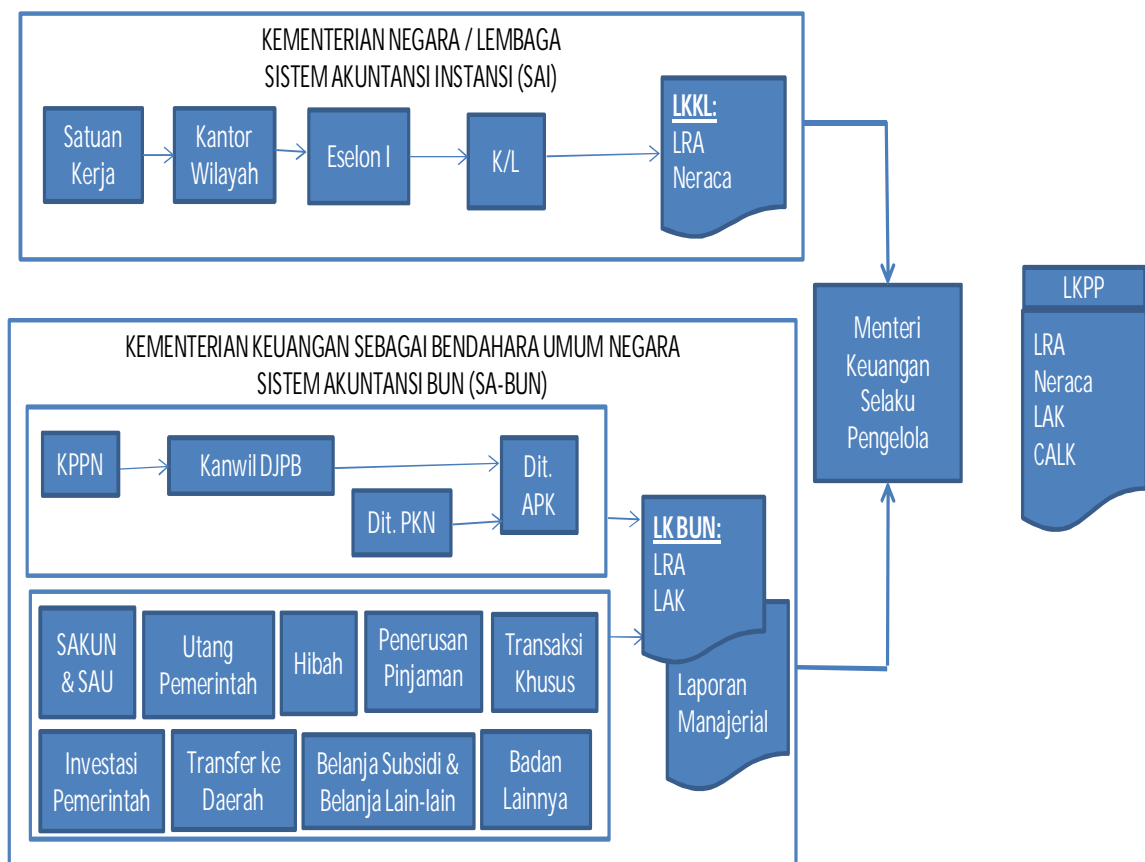
5.1. Alur Penyusunan LKPP Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat

SAPP, berdasarkan definisi dalam pasal 1 PMK Nomor 233/PMK.05/2011, merupakan serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi

keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PMK yang sama, SAPP terdiri dari: (i) Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan (ii) Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

Alur penyusunan LKPP berdasarkan SAPP dideskripsikan dalam **Gambar 5.1** berikut ini.

Gambar 5.1.
Alur Penyusunan LKPP



Dalam Gambar 5.1 dapat dilihat bahwa proses penyusunan LKPP merupakan muara dari proses Sistem Akuntansi Instansi yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara/Lembaga dan Sistem Akuntansi BUN yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara. Sistem Akuntansi Instansi ini dilaksanakan dari Satuan Kerja, Kantor Wilayah, Eselon I yang kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang

terdiri dari: (i) Laporan Realisasi Anggaran; (ii) Neraca; dan (iii) Catatan Atas Laporan Keuangan. Sementara itu, pertanggungjawaban yang dilaksanakan dengan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara meliputi: (i) Sistem Akuntansi Pusat (SiAP); (ii) Sistem Akuntansi Utang Pemerintah (SA-UP); (iii) Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH); (iv) Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP); (v) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman (SA-PPP); (vi) Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD); (vii) Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA-BSBL); (viii) Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK); dan (ix) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SA-PBL). Keseluruhan proses dalam SA-BUN ini menghasilkan Laporan Keuangan BUN yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Laporan Manajerial. Adapun Laporan Manajerial terdiri atas Laporan Posisi Kas, Laporan Posisi Utang, Laporan Posisi Penerusan Pinjaman, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya dan Laporan Posisi Investasi Pemerintah.

Selanjutnya, akan dibahas sekilas mengenai masing-masing sistem akuntansi yang merupakan komponen dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara.

a. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)

Berdasarkan definisi dalam pasal 1 PMK Nomor 233/PMK.05/2011, SiAP adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. SiAP ini meliputi Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN), yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca Kas Umum Negara (KUN), dan Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat dan Neraca. SiAP ini dilaksanakan oleh KPPN, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

KPPN menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tingkat Kuasa BUN KPPN. Laporan Keuangan ini beserta data transaksi disampaikan ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap bulan. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyusun LKPP tingkat BUN-Pusat dan mengirimkan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

b. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah (SA-UP) dan Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH)

Berdasarkan definisi dalam pasal 1 PMK Nomor 233/PMK.05/2011, SA-UP adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran serta pelaporan posisi utang, operasi utang pemerintah, penerimaan, dan pengeluaran pembiayaan terkait utang. Sementara itu, SIKUBAH didefinisikan sebagai serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran serta pelaporan posisi dan operasi hibah Pemerintah.

SA-UP&H menghasilkan Laporan realisasi Penerimaan Hibah, pembayaran bunga utang, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan serta Neraca. Sesuai dengan pasal 12 PMK Nomor 171/PMK.05/2007, SA-UP&H dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN). Kemudian, Laporan ini dikirimkan ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN).

c. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP)

Berdasarkan definisi dalam pasal 1 PMK Nomor 233/PMK.05/2011, SA-IP adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran serta pelaporan posisi investasi pemerintah, penerimaan dan pengeluaran terkait investasi. SA-IP dilaksanakan oleh unit yang menjalankan penatausahaan dan pelaporan

investasi Pemerintah, yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Selanjutnya, DJKN menyampaikan laporan beserta Arsip Data Komputer (ADK) kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Penatausahaan investasi Pemerintah ini menghasilkan laporan berupa: (i) Laporan Realisasi Anggaran; (ii) Neraca; (iii) Catatan atas Laporan Keuangan; dan (iv) Laporan Investasi Pemerintah (*managerial report*).

d. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman (SA-PPP)

Berdasarkan definisi dalam pasal 1 PMK Nomor 233/PMK.05/2011, SA-PPP adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran serta pelaporan penerusan pinjaman pemerintah. SA-PPP dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman serta menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Laporan ini kemudian dikirim kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai UABUN.

e. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD)

Berdasarkan definisi dalam pasal 1 PMK Nomor 233/PMK.05/2011, SA-TD adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran serta pelaporan posisi dan operasi keuangan atas transaksi transfer ke daerah. SA-TD dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Laporan ini juga kemudian dikirimkan kepada UABUN.

f. Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA-BSBL)

Berdasarkan definisi dalam pasal 1 PMK Nomor 233/PMK.05/2011, SA-BSBL adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi subsidi dan belanja lain-lain.

SA-BSBL menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan Pasal 17A ayat (3), SA-BSBL dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran selaku Pengguna Anggaran Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain. Selanjutnya ayat (4) pasal yang sama diatur bahwa Pengguna Anggaran dapat menunjuk pejabat pada Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

g. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK)

Berdasarkan definisi dalam pasal 1 PMK Nomor 233/PMK.05/2011, SA-TK adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan untuk seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran aset pemerintah yang terkait dengan fungsi Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, yang tidak tercakup dalam Sub Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara. Berdasarkan perubahan Huruf I Lampiran PMK Nomor 171/PMK.05/2007, transaksi bersifat khusus dimaksud antara lain: Pengeluaran Kerjasama Internasional, Pengeluaran Pernjanjian Hukum Internasional, PNBPN yang dikelola oleh DJA kecuali bagian laba BUMN, Aset pemerintah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pembayaran dan penerimaan setoran/potongan PFK, dan Pembayaran Belanja Pensiun.

SA-TK menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan Pasal 17B ayat (3) PMK Nomor 233/PMK.05/2011, disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan SA-TK, Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan membentuk unit akuntansi antara lain berupa Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (UAP BUN TK) yang berdasarkan ayat (4) pasal yang sama dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

h. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL)

Berdasarkan definisi dalam pasal 1 PMK Nomor 233/PMK.05/2011, SAPBL adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan ikhtisar laporan keuangan badan lainnya. SAPBL diterapkan untuk menyusun Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Badan Lainnya dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya. Berdasarkan perubahan Huruf J Bagian Kedua Lampiran PMK Nomor 171/PMK.05/2007, SA-PBL dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

5.2 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 55 ayat (1) UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden. Selanjutnya, dalam ayat (3) ketentuan yang sama, Laporan Keuangan tersebut disampaikan Presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (1) UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Ketentuan mengenai penyampaian rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN oleh Presiden kepada DPR juga diatur dalam Pasal 163 ayat (1) UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Selanjutnya, tahapan pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berdasarkan Pasal 158 Tata Tertib DPR RI adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah menyampaikan pokok-pokok Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dalam rapat paripurna kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Fraksi menyampaikan pandangannya terhadap materi Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN yang disampaikan oleh Pemerintah dalam rapat paripurna.
3. Pemerintah memberikan tanggapan terhadap pandangan fraksi dalam rapat paripurna. DJPB kementerian Keuangan menjadi koordinator dalam menyusun tanggapan pemerintah tersebut
4. BPK menyampaikan laporan keuangan Pemerintahan pusat pada rapat paripurna.
5. Badan Anggaran melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dengan mempertimbangkan pemandangan umum fraksi, tanggapan Pemerintah, saran dan pendapat Badan Musyawarah, keputusan rapat kerja komisi dengan Pemerintah serta laporan keuangan Pemerintahan pusat.
6. Pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah disampaikannya bahan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah oleh BPK ke DPR.
7. Badan Anggaran melakukan pembahasan rancangan undang-undang.
8. Sebelum penetapan rancangan undang-undang oleh Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dapat menyampaikan telaahannya terhadap laporan keuangan Pemerintah pusat yang telah diaudit oleh BPK kepada Badan Anggaran.
9. Untuk pengambilan keputusan dalam Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4) Tata Tertib DPR RI, yang mengatur bahwa pengambilan keputusan Rancangan Undang-

Undang tentang APBN antara Badan Anggaran dengan pemerintah pada akhir Pembicaraan Tingkat I, dilakukan dengan acara:

- a. Pengantar Ketua Badan Anggaran;
 - b. Laporan panitia kerja;
 - c. Pembacaan naskah Rancangan Undang-Undang tentang LKPP;
 - d. Pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi;
 - e. Pendapat pemerintah;
 - f. Penandatanganan naskah Rancangan Undang-Undang tentang APBN; dan
 - g. Pengambilan keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II.
10. Hasil pembahasan Pembicaraan Tingkat I kemudian disampaikan oleh Badan Anggaran dalam rapat paripurna.
11. Untuk acara rapat paripurna, berlaku ketentuan dalam Pasal 155 ayat (5) Tata Tertib DPR RI, yang mengatur bahwa hasil pembahasan dalam Pembicaraan Tingkat I dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan yang didahului dengan:
- a. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;
 - b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

Tabel 5.1.

Jadwal pembahasan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

No.	Uraian	Penanggung Jawab	Output	Keterangan
1.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)	DJPB	LKPP belum diaudit	

2.	Penyampaian LKPP oleh Menteri Keuangan kepada Presiden	DJPB	LKPP belum diaudit	
3.	Penyampaian LKPP oleh Presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit	DJPB	LKPP belum diaudit	3 bulan setelah tahun anggaran berakhir
4.	Audit atas LKPP	BPK	LKPP yang telah diaudit beserta opini	
5.	Penyampaian LKPP oleh Presiden kepada DPR	DJPB	LKPP yang telah diaudit beserta opini	6 bulan setelah tahun anggaran berakhir
6.	Rapat Paripurna Pemerintah menyampaikan pokok-pokok Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya	DJPB	- Pokok-pokok RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN - LKPP yang telah diaudit	6 bulan setelah tahun anggaran berakhir
7.	Rapat Paripurna Fraksi menyampaikan pandangannya terhadap materi Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN	DJPB	Pandangan Fraksi terhadap materi RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN	
8.	Rapat Paripurna Pemerintah memberikan tanggapan terhadap pandangan fraksi	DJPB	Tanggapan Pemerintah terhadap pandangan fraksi	

9.	Rapat Paripurna BPK menyampaikan LKPP	DJPB	LKPP yang telah diaudit	
10.	Pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dilakukan			dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah disampaikannya bahan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah oleh BPK ke DPR
11.	Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dapat menyampaikan telaahannya terhadap laporan keuangan Pemerintah pusat yang telah diaudit oleh BPK kepada Badan Anggaran	BAKN	Telaahan BAKN atas Banggar	
12.	Rapat Internal Badan Anggaran Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN oleh Badan Anggaran dengan mempertimbangkan pemandangan umum fraksi, tanggapan Pemerintah, saran dan pendapat Badan Musyawarah, keputusan rapat kerja komisi dengan Pemerintah serta laporan keuangan Pemerintahan pusat	DJPB	Hasil Pembahasan Badan Anggaran	
13.	Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN, dilakukan dengan acara: 1. Pengantar Ketua Badan		Hasil Pembicaraan Tingkat I	

	<p>Anggaran;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Laporan panitia kerja; 3. Pembacaan naskah Rancangan Undang-Undang tentang APBN; 4. Pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi; 5. Pendapat pemerintah; 6. Penandatanganan naskah Rancangan Undang-Undang tentang APBN; dan 7. Pengambilan keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II. 			
14.	<p>Rapat Paripurna</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi, dan hasil Pembicaraan Tingkat I; 2. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan 3. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. 	DJPB	UU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN	

REFERENSI

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
amandemen keempat
- Republik Indonesia. 2003 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
- Republik Indonesia. 2004 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia. 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah
- Republik Indonesia. 2009 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
- Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.02/2012 tentang Tata Cara
Perencanaan, Penetapan Alokasi, dan Pengesahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum
Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Surat Menteri Keuangan Kepada Presiden
tentang Arah dan Pokok-Pokok Kebijakan
Fiskal Dalam Mendukung Arah Kebijakan
dan Prioritas Pembangunan Nasional



8842/Ag/2013

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-101/MK.02/2013
Sifat : Sangat Segera
Hal : Arah dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam Mendukung
Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional 2014
Lampiran : 1 (satu) berkas

11 Februari 2013

Yth. Presiden Republik Indonesia
Di Jakarta

Sehubungan dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2014 serta sebagai tindak lanjut dari Sidang Kabinet Terbatas bidang Perekonomian dengan Pokok Bahasan RKP 2014 pada tanggal 29 Januari 2013, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan, sebagai pengelola fiskal akan ambil bagian dalam:
 - a. Memberikan masukan terkait dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2014, yang sangat terkait dengan proses penyusunan *resource envelope* RAPBN 2014, terutama terkait dengan penyusunan inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran oleh Kementerian Negara/Lembaga, yang harus selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.;
 - b. Merumuskan Arah dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam mendukung Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2014 yang akan menjadi dasar dalam penyusunan besaran-besaran dalam RAPBN 2014.
2. Dapat kami sampaikan, bahwa konsep Arah dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2014 disusun dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi domestik dan global terkini, tantangan ke depan, serta *review* pencapaian sasaran-sasaran utama dan indikator fiskal jangka menengah 2010-2014.
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir 2, maka rumusan tema kebijakan fiskal 2014 yang kami usulkan adalah: "Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas, dan Berkelanjutan melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal yang Sehat dan Efektif", dengan arah dan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai berikut:
 - a. Menyediakan Stimulasi Fiskal Secara Terukur dengan Tetap Menjaga Kestinambungan Fiskal
 - b. Memperkuat Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*)
 - c. Memperlebar Ruang Fiskal (*Fiscal Space*)

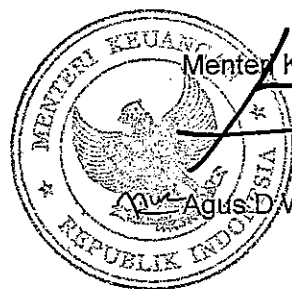


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- d. Meningkatkan Kualitas Belanja (*Spending Quality*)
 - e. Memperkuat Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Kerangka Desentralisasi Fiskal Tahun 2014
 - f. Memantapkan Pengelolaan Pembiayaan Anggaran
4. Arah dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam Mendukung Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional 2014 agar dapat ditetapkan, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal yang akan disampaikan ke DPR dan dibahas dalam Forum Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2014 untuk menjadi dasar bagi kebijakan umum dan prioritas anggaran.

Penjelasan lebih lengkap untuk masing-masing arah dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2014 adalah sebagaimana paparan terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Menteri Keuangan,

Agus D.W. Martowardojo

Tembusan Yth :

- 1. Wakil Presiden Republik Indonesia
- 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- 3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas
- 4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

LAMPIRAN II

Surat Menteri Keuangan Kepada Menteri
PPN/Kepala Bappenas tentang *Resource
Envelope* Pagu Indikatif Belanja K/L
RAPBN 2014



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-186/MK.02/2013
Sifat : Sangat Segera
Hal : *Resource envelope* Pagu Indikatif Belanja K/L RAPBN 2014
Lampiran : 1 (satu) berkas

13 Maret 2013

Yth. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudari Nomor 0066/M.PPN/01/2013 tanggal 20 Februari 2013 perihal Permintaan Ketersediaan Anggaran (*Resource Envelope*) Pagu Indikatif Tahun 2014, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah menyusun proyeksi *resource envelope* pagu indikatif belanja K/L RAPBN tahun 2014 dengan memperhatikan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro 2014, potensi sumber-sumber pendapatan negara dan hibah, kebutuhan belanja negara, serta kemampuan pembiayaan anggaran. *Resource envelope* pagu indikatif belanja K/L dalam RAPBN tahun 2014 tersebut direncanakan sebesar Rp547,1 triliun. Jumlah tersebut berarti lebih tinggi Rp5,6 triliun atau 1,0 persen dari *resource envelope* belanja K/L Tahun 2013 sebesar Rp541,4 triliun, terdiri dari:

Jenis Belanja	Baseline	Potensi New Initiatives	Jumlah
1. Belanja Pegawai	145,0	-	145,0
2. Belanja Barang	146,1	-	146,1
a. Operasional	42,4 ^{a)}	-	42,4
b. Non Operasional	103,6	-	103,6 ^{b)}
3. Belanja Modal	178,8 ^{c)}	32,3 ^{d)}	211,1
4. Bantuan Sosial	44,9	-	44,9 ^{e)}
Jumlah	514,8	32,3	547,1

- a) Belanja Barang Operasional Rupiah Murni
- b) Tidak termasuk belanja yang dipindahtanggankan ke pihak ke-3 sebesar Rp12,3 triliun, yang direalokasikan ke belanja modal.
- c) Termasuk realokasi belanja barang yang dipindahkan tangankan ke pihak ke-3 sebesar Rp12,3 triliun dan bantuan sosial yang dipindahtanggankan ke pihak ke-3 sebesar Rp12,0 triliun.
- d) Dicadangkan untuk belanja modal (termasuk anggaran pendidikan).
- e) Tidak termasuk *baseline* anggaran Jamkesmas sebesar Rp6,5 triliun yang ditampung dalam anggaran PBI pada BA BUN, dan belanja yang dipindahtanggankan ke pihak ke-3 sebesar Rp12,0 triliun.

2. Alokasi *baseline* belanja K/L 2014 sebesar Rp514,8 triliun tersebut telah menampung kebutuhan untuk:

P



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. Biaya operasional untuk:
- Belanja pegawai dengan alokasi setinggi-tingginya sebesar Rp145,0 triliun yang digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji (termasuk gaji ke-13), honor tetap, tunjangan lain terkait dengan belanja pegawai (termasuk tunjangan kinerja bagi K/L yang sampai dengan tahun 2012 telah mulai melaksanakan reformasi birokrasi), dan lembur.
 - Belanja barang operasional, yaitu antara lain untuk keperluan sehari-hari perkantoran, pengadaan bahan makanan, honor operasional satuan kerja, langganan daya dan jasa, serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
- b. Biaya non-operasional untuk:
- Kegiatan/*output* terkait pelaksanaan tugas fungsi unit, termasuk pemenuhan kebutuhan belanja operasional dan pemeliharaan untuk aset baru dan satuan kerja baru;.
 - Kegiatan/*output* terkait pelayanan kepada publik.
 - Kegiatan/*output* terkait pelaksanaan kebijakan prioritas pembangunan nasional, seperti:
 - Penyelesaian rehabilitasi SD/MI dan SMP/MTs yang rusak;
 - Penguatan Program Perlindungan Sosial dalam rangka mendukung MP3KI;
 - Mendukung program penguatan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - Mendukung program rumah sangat murah.
 - Kegiatan/*output* terkait penugasan sesuai kebijakan Pemerintah.
 - Kegiatan/*output* yang dilaksanakan secara *multiyears* (besarnya anggaran *multiyears* dapat dilihat pada Lampiran IX).
3. Ruang fiskal dalam *resource envelope* pagu indikatif belanja K/L tahun 2014 sebesar Rp32,3 triliun, diprioritaskan untuk: (1) memenuhi target RPJMN 2010-2014 yang belum tercapai (*filling the gap*), dan (2) inisiatif baru yang didasarkan pada direktif Presiden seperti hasil Sidang Kabinet atau memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Inpres/Keppres, serta kegiatan-kegiatan prioritas nasional/bidang/ K/L yang di antaranya terkait dengan:
- Pembangunan infrastruktur untuk mendukung *domestic connectivity* dan MP3EI, terutama untuk pembangunan jalan baru, termasuk rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jalan/jembatan, pelebaran dan peningkatan jalan, dan jalan strategis di beberapa wilayah; serta ketahanan energi;
 - Pembangunan dan pemeliharaan irigasi dan rawa dalam rangka mendukung ketahanan pangan untuk pencapaian surplus beras 10 juta ton;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

iii. Percepatan pencapaian *Minimum Essential Force*, sesuai RPJMN 2010-2014;

Data rinci dari alokasi belanja per K/L adalah sebagaimana tertuang dalam **lampiran III**.

Selanjutnya, pembahasan mengenai alokasi anggaran ke dalam program/kegiatan, agar dapat dilakukan bersama-sama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/ Bappenas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru, berdasarkan prioritas pembangunan serta analisis pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi kebutuhan dananya.

Dapat kami tambahkan, bahwa *resource envelope* belanja K/L Tahun 2014 tersebut tidak termasuk alokasi untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang SJSN melalui BPJS Kesehatan dan tahapan pelaksanaan Pemilu 2014.

4. Dalam rangka memenuhi amanat UUD 1945 untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD, *resource envelope* pagu indikatif belanja K/L RAPBN 2014, telah memperhitungkan alokasi anggaran pendidikan melalui belanja K/L sebesar Rp133,6 triliun.

Pagu indikatif anggaran pendidikan melalui belanja K/L sebesar Rp133,6 triliun tersebut, termasuk untuk mendukung program Pendidikan Menengah Universal (PMU), terutama untuk bantuan operasional sekolah bagi sekolah menengah (BOS SM) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.

5. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengalokasikan anggaran belanja K/L, agar mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional 2014 (Lampiran I), serta arah dan pokok kebijakan fiskal, yang meliputi:
 - a. **Alokasi Belanja Barang** maksimal sebesar Rp146,1 triliun, disesuaikan dengan upaya **efisiensi belanja perjalanan dinas**, seminar, konsinyering, *workshop*, dan honorarium tim, yang dialokasikan sesuai kebutuhan dan tugas fungsi masing-masing K/L;
 - b. **Alokasi Belanja Modal** agar dijaga pada kisaran Rp211,1 triliun, dengan indikasi proporsi alokasi untuk bidang Perekonomian sekitar 60 persen, bidang Kesejahteraan Rakyat sekitar 15 persen, serta bidang Politik Hukum dan Keamanan sekitar 25 persen, berdasarkan rencana pengembangan infrastruktur, termasuk upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai aset negara. Alokasi belanja modal sebesar itu agar dijaga dengan ketat dengan mengacu pada kriteria dalam **Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Bagan Akun Standar**.
 - c. **Alokasi Bantuan Sosial** difokuskan untuk pencapaian sasaran-sasaran prioritas bantuan sosial yang mengacu pada kegiatan-kegiatan dalam 4 klaster pengurangan kemiskinan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Dalam rangka menjaga konsistensi sumber pendanaan belanja K/L, agar diperhatikan:
 - a. **Pembatasan penggunaan Pinjaman Luar Negeri**, dalam mendanai berbagai kegiatan dengan mempertimbangkan posisi utang dan kesiapan proyeknya.
 - b. Alokasi belanja K/L yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri, termasuk di dalamnya alokasi untuk Rupiah Murni Pendamping (RMP), agar mengacu pada Lampiran V dan Lampiran VI sesuai hasil *trilateral meeting* khusus Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di Bappenas yang telah disempurnakan oleh Kementerian Keuangan.
 - c. Alokasi belanja K/L yang bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dan Surat Berharga Syariah Negara *Project Based Sukuk* (SBSN PBS) agar mengacu pada Lampiran VII sesuai hasil identifikasi Kementerian Keuangan.
 - d. Alokasi belanja K/L yang bersumber dari pagu penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) agar mengacu pada Lampiran VIII sesuai hasil identifikasi Kementerian Keuangan.
7. Terkait dengan upaya efisiensi anggaran, agar diperhatikan beberapa kegiatan yang harus dibatasi anggarannya, yang meliputi:
 - a. Perjalanan dinas dalam dan luar negeri;
 - b. Rapat dan konsinyering di luar kantor;
 - c. Honorarium tim;
 - d. Pembangunan gedung baru yang tidak langsung menunjang tugas dan fungsi K/L (mess, wisma, rumah dinas, rumah jabatan, gedung pertemuan);
 - e. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali:
 - i. Kendaraan fungsional (ambulans untuk rumah sakit, kendaraan untuk tahanan, kendaraan roda dua untuk penyuluh)
 - ii. Penggantian kendaraan yang rusak berat
 - f. Pemasangan iklan yang tidak terkait secara langsung dengan layanan K/L, pada media massa dan media elektronik;
 - g. Kegiatan lain yang sejenis atau serupa.
8. Apabila masih terdapat usul-usul baru, perubahan-perubahan prioritas, dan program-program atau kegiatan-kegiatan yang belum tersedia alokasi anggarannya, maka pendanaannya dilakukan melalui upaya penajaman prioritas, *refocusing*, dan realokasi dari program tertentu ke program yang lebih tinggi prioritasnya. Dengan demikian, total *resource envelope* pagu indikatif belanja K/L 2014 sebesar Rp547,1 triliun tersebut tetap



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

mencukupi, dan berbagai sasaran pembangunan yang telah disepakati tetap dapat dicapai.

9. Selanjutnya, untuk kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM) 2015-2017, sedang dalam proses penyiapan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudari, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Keuangan,

Agus D.W. Martowardojo

Tembusan Yth :

1. Wakil Menteri Keuangan I, Kementerian Keuangan
2. Wakil Menteri Keuangan II, Kementerian Keuangan
3. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
5. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2014

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi:
 - i. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Adil, Inklusif dan Berkelanjutan;
 - ii. Memperluas Penciptaan Lapangan Pekerjaan;
 - iii. Memantapkan Stabilitas Harga dan Meningkatkan Upaya Mengurangi Kemiskinan;
 - iv. Menjaga Ketersediaan dan Kepastian Harga Pangan;
 - v. Menjaga Ketersediaan dan Kepastian Energi
2. Mendukung Pengembangan Infrastruktur:
 - i. Pembangunan infrastruktur melalui MP3EI dalam rangka efisiensi logistik nasional
 - ii. Keterlibatan para investor dalam pendanaan pembangunan infrastruktur (khususnya yang bersifat komersial)
3. Mendukung Upaya Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran:
 - i. Integrasi MP3EI dan MP3KI, dengan memperhatikan elemen *non income poverty* (ditentukan oleh infrastruktur, *capacity building*, fasilitas, perbankan, dsb)
 - ii. Penyusunan *master plan* program rumah sangat rumah mulai tahun 2012-2014;
 - iii. Pengembangan Program kredit mikro atau KUR dan program Tabunganku
 - iv. Pelaksanaan kelanjutan Program PKH untuk rakyat sangat miskin dan Program Raskin untuk rakyat miskin
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pembangunan Pendidikan:
 - i. Pelaksanaan pendidikan yang berkualitas, mudah, dan murah (Implementasi Wajar 9 tahun hingga Pendidikan Menengah Universal (PMU)).
 - ii. Perbaikan infrastruktur gedung dan bangunan,
 - iii. Optimalisasi penyaluran BOS.
 - iv. Peningkatan kesejahteraan guru diikuti dengan peningkatan kompetensi guru.
 - v. Pembangunan akademi komunitas secara bertahap di setiap kabupaten/kota sesuai amanat UU Pendidikan Tinggi untuk mendukung MP3EI.
 - vi. Pemanfaatan hasil investasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) untuk pemberian beasiswa S2 dan S3, melakukan riset strategis nasional, dan melakukan rehabilitasi infrastruktur pendidikan akibat bencana
 - vii. Anggaran Kemendikbud agar digunakan untuk infrastruktur di bidang pendidikan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran:
 - i. *Flat policy* belanja operasional, antara lain melalui peningkatan disiplin anggaran dan mengontrol biaya perjalanan dinas (dalam maupun luar negeri)
 - ii. Alokasi belanja modal agar diutamakan
 - iii. Pengelolaan kegiatan *multiyears* agar dapat diperbaiki, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik, dan *output/outcome* yang dihasilkan lebih optimal
6. Mendukung Pelaksanaan Pemilu:
 - Menjaga situasi politik, hukum, dan keamanan dalam kaitannya dengan upaya menyukseskan pemilu dan pilkada 2014
7. Melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mulai 1 Januari 2014.
8. Mengendalikan Subsidi dan Mengembangkan Energi Terbarukan:
 - i. Mengurangi subsidi BBM untuk transportasi umum (jangka menengah dengan menggunakan *green car* dan jangka panjang *electric car*)
 - ii. Melanjutkan program konversi penggunaan energi dari BBM ke BBG
 - iii. Menyelesaikan hambatan dalam bidang industri energi gas bumi
 - iv. Mendukung Penyusunan dan Pelaksanaan pengembangan industri mobil listrik nasional, melalui pilar infrastruktur, pilar regulasi, dan pilar kendaraan listrik secara terintegrasi dan terkolaborasi.
 - v. Mendukung Upaya Penyiapan motor bebek listrik dan *Automatic Charging Station*,
 - vi. Mendukung Produksi listrik 5000 MW dari energi baru dan terbarukan agar dipastikan tercapai di tahun 2014;
9. Mendukung *green industry (pro environment)*:
 - i. Aturan limbah agar diperbaiki
 - ii. Merumuskan kegiatan untuk menjaga kualitas air tawar di Ibu Kota
 - iii. Merumuskan kegiatan untuk mengantisipasi dan pencegahan tenggelamnya Pulau Jawa
10. Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi:
 - i. Peningkatan pariwisata, produksi ternak, produksi padi, jagung, dan ikan, serta Industri tambang di Indonesia Timur;
 - ii. Meningkatkan kemandirian peternakan sapi di Indonesia (termasuk percepatan peternakan sapi di Indonesia Timur)
 - iii. Pengembangan hilirisasi usaha mineral, industri pupuk, petrokimia, industri baja, industri perkapalan domestik.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- iv. Merumuskan dan menghitung insentif fiskal
 - v. Meningkatkan kesempatan berinvestasi melalui pengelolaan lahan, izin lokasi, dan tata ruang
 - vi. Pengelolaan BUMN untuk berinvestasi (termasuk dalam rangka mendukung MP3EI)
11. Mendukung Upaya Pengendalian Harga Bahan Pokok di tingkat Konsumen:
- i. Peningkatan produksi dan produktivitas kedelai dan bahan pokok lainnya dalam negeri
 - ii. Optimalisasi peran Bulog dalam program "*Food Security*"
12. Mendukung Pengelolaan Pertahanan dan Keamanan serta Penanggulangan Korupsi:
- i. Penambahan jumlah personil polisi, untuk memperbaiki rasio polisi dengan rakyat,
 - ii. Penambahan pesawat angkut untuk penggerakan pasukan TNI dan Polri ke daerah manapun di Indonesia
 - iii. Pencegahan tindak korupsi, khususnya untuk 5 hal rawan korupsi : APBN atau APBD, pengadaan barang dan jasa, perpajakan, kepabeanan cukai, dan pertambangan.
13. Mendukung Pelaksanaan Reformasi Agraria melalui redistribusi tanah secara adil, tertib, damai, dan legal, dengan kebijakan nasional yang tepat, sedangkan plasma dan inti tetap dihidupkan.
14. Memperkuat Pengelolaan Utang:
- i. Menurunkan secara konsisten rasio utang terhadap PDB.
 - ii. Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan membatasi pemanfaatan pinjaman luar negeri yang dilakukan secara sangat selektif .
15. Mendukung Upaya Pengurangan Kesenjangan Pendapatan dan Pembangunan Antarwilayah:
- i. Melaksanakan redistribusi pendapatan melalui sistem perpajakan progresif.
 - ii. Meningkatkan sinergi pusat dan daerah dalam mengurangi kesenjangan antar daerah.
16. Mengurangi potensi terjadinya Banjir di DKI Jakarta:
- i. Membuat sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur.
 - ii. Melakukan penataan Kawasan Kumuh.

LAMPIRAN II
PROYEKSI RESOURCE ENVELOPE RAPBN 2014
(Miliar Rupiah)

Uraian	2013	2014
	APBN	Proyeksi RAPBN
A. BELANJA NEGARA		
I. Belanja K/L Menurut Jenis Belanja	594.597,6	547.103,3
a.l. a. Belanja Pegawai	139.890,1	145.047,0
b. Belanja Barang	200.735,2	146.093,4
- Operasional	36.004,5	42.445,2
- Non Operasional	164.730,7	103.648,3
c. Belanja Modal	184.363,5	211.058,5
d. Bantuan Sosial	69.608,8	44.904,4
II. Belanja K/L Menurut Sumber Dana	594.597,6	547.103,3
1. Rupiah Murni	526.024,0	471.334,8
2. Pinjaman LN	29.139,7	32.384,0
3. Pinjaman DN	750,0	1.250,0
4. Hibah	967,6	1.849,9
5. PNPB	16.015,0	17.164,5
6. BLU	20.901,3	21.549,1
7. SBSN <i>Project Based Sukuk</i>	800,0	1.571,0
III. Belanja Non K/L		
a.l. 1. Subsidi Non Energi	42.475,6	42.983,1
a. Pangan	17.197,9	15.058,0
b. Pupuk	16.228,8	18.048,9
c. Benih	1.454,2	1.564,8
d. PSO	1.521,1	1.881,1
- PT KAI	704,8	871,6
- PT Pelni	726,5	872,8
- LKBN Antara	89,8	136,7
e. Kredit Program	1.248,5	1.717,2
f. Subsidi Pajak / Pajak DTP	4.825,1	4.713,2
2. Belanja Lain-Lain	19.983,4	40.708,4
IV. Transfer ke Daerah	528.630,2	606.566,8
1. Dana Perimbangan	444.798,8	503.481,1
a. Dana Bagi Hasil	101.962,4	119.012,2
b. Dana Alokasi Umum	311.139,3	353.428,6
c. Dana Alokasi Khusus	31.697,1	31.040,3
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	83.831,5	103.085,8
B. PEMBIAYAAN ANGGARAN		
I. Pembiayaan Anggaran	153.338,0	122.492,2
a.l. Penerusan Pinjaman (SLA)	(6.968,3)	(6.994,9)

Catatan:

- *Resource envelope* belanja K/L dalam pagu indikatif 2013 adalah sebesar Rp541.393,2 miliar
- Belanja K/L dalam APBN 2013 sudah menampung dana optimalisasi, direktif presiden, dan anggaran infrastruktur dari penghematan subsidi listrik

LAMPIRAN III
BASELINE BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TA 2014 PER JENIS BELANJA

NO URUT	KODE BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PEGAJAWAI	BARANG			MODAL	BANSOS	JUMLAH
				OPS	NON OPS	TOTAL			
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	22,7	39,0	490,7	529,7	13,4	-	565,8
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	491,8	254,4	1.966,2	2.220,6	68,4	-	2.780,8
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	996,9	291,8	842,5	1.134,2	400,5	-	2.531,7
4	005	MAKAMAH AGUNG	5.303,6	413,3	566,0	979,3	888,7	-	7.141,7
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	1.974,1	476,2	1.320,2	1.296,4	-	-	3.770,4
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	404,1	919,6	422,4	1.342,0	397,8	-	2.143,9
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	371,2	263,4	4.241,6	4.505,0	235,6	8.279,5	13.391,2
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	1.965,0	1.199,5	1.587,3	2.786,9	406,2	-	5.058,1
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	35.022,2	11.439,7	2.186,6	13.626,4	31.049,4	-	80.498,0
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	3.346,1	1.240,2	1.362,7	2.602,9	196,4	-	6.145,4
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	9.369,0	3.781,0	3.251,3	7.032,3	508,8	-	16.910,1
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	1.955,7	408,7	3.034,4	3.443,1	8.778,2	1.207,9	15.384,9
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	559,0	118,4	994,0	1.112,4	721,7	-	2.393,1
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	327,3	332,6	972,7	1.305,3	11.368,1	-	13.000,7
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.581,7	1.439,1	3.793,4	5.232,5	26.494,7	-	33.308,8
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	10.093,8	2.038,8	23.706,9	25.745,7	10.418,9	18.363,7	64.622,1
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	4.284,2	1.146,8	8.066,1	9.212,9	6.819,6	-	20.316,7
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	24.950,6	1.293,4	6.433,4	7.726,8	3.449,7	9.461,4	45.588,5
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	285,5	1.901	1.250,4	1.440,5	2.240,6	50,2	4.016,8
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	249,7	103,8	1.268,0	1.371,8	177,4	3.169,9	4.968,8
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	951,8	387,4	2.879,0	3.256,4	608,6	150,9	4.977,8
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	565,8	345,8	389,2	735,0	3.883,1	296,3	5.480,3
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	1.291,9	572,0	6.400,9	6.972,8	53.613,1	3.000,0	64.877,8
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	49,5	43,4	239,6	283,0	180,9	-	513,4
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	36,7	18,7	149,9	168,6	5,4	-	210,7
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	35,9	18,5	138,6	157,1	14,6	-	207,6
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	237,6	134,2	1.020,5	1.154,7	95,1	65,1	1.552,5
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	188	22,4	69,3	91,6	20,3	-	130,8
29	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	69,0	53,6	313,7	367,3	103,7	-	540,0
30	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	58,9	47,0	662,7	709,7	111,3	-	879,9
31	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	53,8	53,6	797,5	851,1	345,3	44,7	1.295,0
32	047	KEMENTERIAN PEMERINTAHAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK	35,1	7,9	112,2	120,1	51,1	-	204,3
33	048	KEMENTERIAN PENYAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	36,0	12,2	99,7	111,9	-	-	147,9
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	84,9	65,1	931,1	996,3	468,9	-	1.550,1
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	75,4	74,7	88,1	162,7	1.106,3	-	1.344,5
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	7,0	4,8	18,9	23,8	0,1	-	30,8
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.360,5	174,0	2.003,6	2.177,6	-	-	3.538,1
38	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	158,0	28,9	1.764,0	1.792,8	-	-	1.950,8
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.220,2	241,4	2.146,5	2.387,9	534,8	-	4.142,9
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	45,0	27,8	144,3	172,1	216,1	-	433,2
41	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	214,6	380,3	2.562,6	2.942,9	416,1	-	3.573,6
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	28.330,3	9.108,4	-	9.108,4	2.175,3	-	39.614,0
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	346,7	63,4	513,0	576,4	124,2	-	1.047,4

(miliar rupiah)

(miliar rupiah)

NO URUT	KODE BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PEGAWAI	BARANG			MODAL	BANSOS	JUMLAH
				OPS	NON OPS	TOTAL			
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	53,9	26,1	85,9	112,0	165,9	-	331,9
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAHAN MODAL	67,7	37,7	47,6	512,3	27,7	-	607,7
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	163,0	72,9	528,7	601,6	26,5	-	791,1
47	067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	18,8	19,0	337,2	356,2	591,8	163,7	1.130,5
48	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	348,4	63,1	2.184,7	2.247,8	82,9	-	2.679,2
49	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	20,3	15,1	23,5	38,6	2,5	-	61,3
50	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	235,1	167,5	565,2	722,7	590,0	-	1.557,8
51	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	363,7	261,6	291,7	553,4	-	-	917,1
52	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	13,3	36,8	77,1	115,9	29,3	-	158,5
53	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	21,6	11,8	31,4	43,2	-	-	64,8
54	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	471,2	101,2	284,7	385,8	198,0	-	1.055,0
55	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	377,2	75,5	124,8	200,3	132,0	-	709,5
56	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	305,7	82,7	298,1	380,8	117,2	-	803,7
57	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	83,6	36,4	182,1	218,4	173,4	-	475,4
58	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	39,6	9,7	187,7	197,4	363,5	-	600,5
59	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	14,9	7,8	72,1	79,8	-	-	94,7
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	29,6	10,4	53,1	63,6	8,1	-	101,2
61	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	79,1	43,3	100,2	143,5	22,0	-	244,6
62	087	AKSIK NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	60,7	17,4	44,2	61,6	0,6	-	122,9
63	088	BADAN KEPENGAWAIAAN NEGARA	281,8	65,4	131,4	196,9	40,3	-	519,0
64	089	BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	652,0	86,9	415,8	502,6	21,6	-	1.176,2
65	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	213,7	227,5	982,0	1.209,5	712,3	-	2.135,5
66	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	50,7	68,4	824,6	893,0	3.298,7	-	4.242,4
67	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	37,5	49,6	963,6	1.013,3	220,3	608,7	1.879,7
68	093	KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI	222,6	29,0	230,3	259,2	110,1	-	592,0
69	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	189,7	163,2	192,6	355,8	6,1	-	551,6
70	100	KOMISI YUDISIAL RI	9,4	16,9	42,3	59,1	4,8	-	73,3
71	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	15,3	29,9	215,9	245,8	367,2	37,7	666,0
72	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	46,3	30,2	191,5	221,7	41,0	-	309,0
73	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	12,9	8,8	183,3	192,1	635,4	4,8	845,1
74	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	16,4	22,3	105,5	127,8	-	-	144,2
75	107	BADAN SAR NASIONAL	172,7	154,0	159,9	313,8	997,3	-	1.483,8
76	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	21,7	13,9	56,9	70,8	2,5	-	95,0
77	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SUPRAMADU	5,8	19,0	69,6	88,6	287,2	-	381,6
78	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	8,7	15,1	21,3	36,4	5,3	-	50,3
79	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	4,9	6,0	121,8	127,8	61,1	-	193,8
80	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	-	422,4	277,4	699,8	335,5	-	1.035,3
81	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	9,6	18,7	121,1	139,8	3,2	-	152,7
82	114	SEKRETARIAT KABINET	85,5	29,8	65,5	95,3	3,7	-	184,5
83	115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	117,0	168,3	534,3	702,6	42,3	-	861,9
84	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	338,9	237,3	204,7	442,0	2,1	-	783,0
85	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	231,1	156,3	374,7	533,0	0,9	-	765,0
86	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	31,0	13,8	44,8	347,4	-	392,2
J U M L A H			145.047,0	42.445,2	103.648,3	146.093,4	178.756,3	44.904,4	514.801,1

LAMPIRAN IV
PROYEKSI ANGGARAN PENDIDIKAN RAPBN 2014
(Miliar Rupiah)

Komponen Anggaran Pendidikan		APBN 2013	PROYEKSI RAPBN 2014
I.	Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat	117.776,7	133.615,7
II.	Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke daerah	214.072,3	239.282,6
III.	Anggaran Pendidikan Melalui Pengeluaran Pembiayaan (Dana Pengembangan Pendidikan Nasional)	5.000,0	2.500,0
IV.	Total Anggaran Pendidikan	336.849,0	375.398,3
V.	Total Belanja Negara	1.683.011,1	1.876.991,3
	Rasio Anggaran Pendidikan thd Total Belanja Negara (%)	20,01	20,00

LAMPIRAN V
Pinjaman Luar Negeri Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2014

(MILIAR RUPIAH)

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga (Nama Proyek)	Pemberi Pinjaman	Kode Pinjaman	Nomor Register	Jumlah	
						PLN	RMP
1	010	Kementerian Dalam Negeri				1.734,16	
		- <i>Proyek On Going</i>				106,51	
		- Integrated Citarum Water Resources Management (komponen Kem. PU)	ADB	2500-INO	10788801	4,85	
		- WISMP II (Komponen Kem. PU)	WORLD BANK	8027-ID	10837101	8,40	
		- Regional Infrastructure for Social Economic (komponen Kem. PU)	JICA	IP-543	21586401	-	
		- National Programme for Community Empowerment	IFAD	755-ID	10780201	31,86	
		- Fourth National Program for Community Empowerment in Rural Areas	WORLD BANK	8079-ID	10828801	61,40	
		- <i>Proyek Baru</i>				1.627,65	
		- Integrated Citarum Water Resources Management Phase II	ADB	2500-INO		5,11	
		- National Program for Community Empowerment in Rural 2012-2015	WORLD BANK		10780201	1.600,50	
2	012	Kementerian Pertahanan				13.007,23	
		- <i>Proyek On Going</i>				3.763,41	
		- Rehabilitasi RSAU DR. Hardjolutito	UniCredit Bank Austria AG, Austria		21658801	-	
		- Improvement of Aeromedical Hospital - Phase II	Austria		-	-	
		- Procurement of Maritime Medical Facilities Program (Mintohario)	Austria		-	-	
		- Sistem Komunikasi Satelit TNI	BNI Singapore Branch		40178801	-	
		- Mer. Kal 30 MM 7 Laras dgn sistem Kendali Senjata dan Perlengkapannya	BNI Tokyo Branch		40192601	35,37	
		- Munisi Kaliber Besar	Korea Eximbank, Korea		40107101	-	
		- Matsus Inteltek Bais TNI	BNP Paribas London Branch		40231901	-	
		- Peralatan Sandi Bais	Credit Suisse AG, Switzerland		40232601	-	
		- Kendaraan Taktis 2.5 Ton NPS71	BNI Tokyo Branch		40239501	-	
		- Panzer Kanon	Eximbank Korea		31361901	111,84	
		- P'latan Tambahan Heli Mi-17-V	BNI Hongkong Branch		40158801	-	
		- Rudal pengganti Rapier TD 2000	China Chitic Bank		31353301	-	
		- Meriam Armed 105 MM & Perlengkapannya			31359501	-	
		- Meriam 23 mm Giant Bow	Eximbank China		31358801	-	
		- Helikopter Angkut	BRI Cayman Island		40244001	535,76	
		- Alat Berat Zeni (Alberzi)	BNI Tokyo, Branch		40204001	-	
		- Munisi Meriam Armed 105 MM	Korea Eximbank Korea		40109501	-	
		- Helikopter Mi-2	BNI Hongkong Branch		40105701	2,81	
		- Pesawat Patroli Maritim CN 235	BRI Cayman Island		40119501	-	
		- Torpedo A 244S Mod-3	Societe Generale Paris		40098801	-	
		- Maritime Medical Facilities Program	Unicredit Bank Austria AG, Austria		21657101	-	
		- Sewaco Korvet Kelas Sigma	Fortis Bank Belanda		31330201	-	
		- ILS Sewaco Korvet Kelas Sigma	Ing Bank Nv Belanda		-	40,79	
		- Exocet Mistral Thp-2	BNP Paribas,		40104001	-	
		- Kapal Selam Diesel Elektrik	The Exim Bank of Korea		-	1.170,26	
		- Perusak Kawal Rudal (PKR)	Ing Bank		-	192,97	
		- Tank Amfibi BMP-3F	State Credit		21664001	219,12	
		- Pesawat Pengganti AS 202 & T-34C	AKA Ausfuhrkredit-GmbH		40200201	84,54	
		- Sucad Avionic F-16 dan F-5	BNI Singapore Branch		40181901	-	
		- Sucad Avionic F-16 dan F-5	BNI Singapore Branch		40183301	-	
		- Sucad Avionic C-130	BNI Singapore Branch		40184001	13,10	
		- Perbaikan Sucad AWP C-130	BNI Singapore Branch		40186401	-	
		- Up Grade Retrofit Pesawat C-130	BNI Singapore Branch		40230201	247,35	
		- Sucad & Perb. Engine Hawk 109/209	BNI Singapore Branch		40150201	-	
		- Sucad Pesawat Latih Dasar KT-1B	The Exim Bank of Korea		40185701	-	
		- Pswt Pengganti MK. 53 (T.50 Lift)	The Exim Bank of Korea		40205701	1.027,04	
		- P'daan & Perbaikan Sucad Engine Hawk 109/209	BNI Singapore Branch		40185701	-	
		- Sucad dan Perbaikan Avionic Hawk	BNP Paribas London		40086401	-	
		- Perbaikan Sucad Hawk 109/209	BNP Paribas London		40087101	-	
		- Pesawat Latih KT-1B Follow on support	BNP Paribas		31357101	-	
		- Tess Bench Radar	CIC France		40099501	-	
		- Sucad Radar	CIC France		40100201	-	
		- Pesawat Super Tucano Thp-1	BRI Cayman Island		40152601	-	
		- Persenjataan Pesawat	State Credit Rusia		21650201	-	
		- Sucad Avionik Sukhoi SU-27/30	State Credit Rusia		-	-	
		- Perbaikan Engine APU Propeller C-130	BNI Hongkong Branch		40144001	-	
		- Pswt. Super Tucano (p' ganti OV-10)	BRI Cayman Island		40236401	-	
		- Senjata Amunisi Sukhoi	Vnesheconomban, Rusia		40155701	-	
		- Sucad Air Frame Pesawat Hawk 109/209 dan MK. 53	Sofema Far East Pte Ltd		40193301	-	
		- Sucad Air Frame Pesawat Hawk 109/209 dan MK. 53	BNI Tokyo Branch		40194001	-	
		- P'baikan Sucad AWP pesawat C-130	BNI Tokyo Branch		40203301	-	
		- Perbaikan Engine, propeller, APU Compressor Case, ATM, FCU & Komp Kritis Pes C-130	BNI Tokyo Branch		40201901	-	
		- Perbaikan Engine, propeller, APU Compressor Case, ATM, FCU & Komp Kritis Pes C-130	BNI Tokyo Branch		40202601	82,45	
		- Sucad Air Frame Pesawat Hawk 109/209 dan MK. 53	BNI Tokyo Branch		40193301	-	
		- Sucad & perbaikan PLR Module Engine	Fortis Bank singapore		40045701	-	

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga (Nama Proyek)	Pembiyayaan	Kode Pinjaman	Nomor Register	Jumlah	
						PLN	RMP
		- Penangkis Serangan Udara (PSU)	UBS AG		40240201	-	
		- Pesawat Sukhoi (Restra 2010-2014)	Singapore Branch		40245701	-	
		- Pagu Reg Belum Efektif	Vnesheconombank		99992104	-	
		- Proyek Baru	Rusia			9.243,83	-
		- Procurement of Medical Equipment for Army Hospital				97,00	
		- Provision of Mobile Clean and Drinking Water Treatment System for Emergency				-	
		- Pesawat Tanpa Awak				59,36	
		- Alkomsus Bais, Denjaka & Denbravo				-	
		- Siskomsat TNI				-	
		- Alkom Pasrat Marinir, 2 BTP				-	
		- Alkom VVIP Ban III/Slw, V/Brw & IX/Udy				-	
		- Pernica PPRC TNI				-	
		- Monitoring dan Jammer Satkomlek TNI				-	
		- Radar Manpack				-	
		- Alkom GTA-60 W Kohanudnas				-	
		- Rantis 2,5 Ton				133,57	
		- Ran Angkut Munisi 5 Ton				133,57	
		- Day & Night Observasion system (Safire III)				-	
		- Thermal Imager				-	
		- Integrated Life Firing				-	
		- Rudal Pengganti Rapier				-	
		- Heli Serang beserta Persenjataan & Munisi				349,87	
		- Heli Serbu beserta Persenjataan dan Munisi	EDC Canada			280,33	
		- Sucad Helikopter				-	
		- Perlengkapan Helikopter Mi-17				-	
		- Perlengkapan Helikopter Mi-35				-	
		- Main Battle Tank (MBT)				461,72	
		- Perbaikan dan pengadaan Sucad Scorpion				-	
		- Senjata Sniper Kopasus				21,83	
		- Meriam 155 MM Howitzer				879,48	
		- Roket dengan perlengkapan dan Munisi/MLRS				801,36	
		- Rudal Arhanud/Shorad				551,48	
		- Rudal Arhanud Shorad (Startrak)				346,29	
		- Jembatan Standar (Militer)				109,22	
		- Alborzi				-	
		- Aljibandak				-	
		- Mukal Kal 105 HE				-	
		- Kapal Perusak Kawal Rudal (kapal-2)				816,26	
		- MLM KRI Kelasa Korvet Tahap-1				436,50	
		- Degausing Korvet Kelas Sigma				-	
		- Integrated Logistic Support (ILS) Korvet				-	
		- Kapal Multi Role Light Fregate (MRLF)				959,72	
		- Battery Kapal Selam				34,92	
		- Overhaul KRI Cakra				174,60	
		- Kapal Bantu Hidro Oseanografi				232,24	
		- Kapal Latih (Pengganti Dewaruci)				178,09	
		- Pesawat CN 235 MPA				222,62	
		- Heli AKS & sucad				437,81	
		- Panzer Amfibi BTR 80 A				28,28	
		- Meriam Rudal Arhanud Marinir dan Radar				-	
		- Test Bench Rudal C-705				-	
		- Modifikasi Test Bnch Exocet dan Radar				-	
		- Sewaco KCR Type 40				200,79	
		- Exocet MM-40 Blok 3 + Mistral 2				117,39	
		- Torpedo A244 S. Mod. 3				28,37	
		- Ranjau Laut				81,99	
		- Rudal C-705				32,74	
		- Munisi Tank Amfibi BMP-3F				-	
		- Mukal Meriam Kapal 76 mm PFF				-	
		- Meriam 30 mm 7 Barrel & Amunisi				-	
		- Meriam kal 40 MM				-	
		- Multi Launch Rocket System (MLRS)				64,56	
		- Shipborn AD 20 mm M71/08 Gun Sea				-	
		- Truck T-815-71				-	
		- Pengadaan Sucad Avionik				-	
		- Radar Warning Receiver (RWR)				12,94	
		- P'baikan Engine, Propeller Sucad PstCN-235 dan C-212				17,37	
		- Air Weapon Range (AWR) dan Air Weapon Scoring System (AWSS)				21,32	
		- P'daan dan perbaikan Avionic Hawk 109/209				13,10	
		- Mod Navkom 4 Pesawat dan Sucad Avionic				109,13	
		- Simulator Sukhoi				-	
		- Engine Pesawat Sukhoi				121,25	
		- Pesawat Terbang CN-295				307,15	
		- Pengadaan Heli Full Combat				282,17	
		- Pesawat Pengganti AS 202 & T-34C				-	
		- Radar GCI dan dukungannya				-	
		- Radar Approach (ATC) di Lanud Iswahyudi				-	
		- Pengkis Serangan Udara (PSU)				87,44	
		- Bomb MK 82 Live				-	
		- Bomb OFAB				-	
		- Spatial Disorienting Trainer				-	
3	015	Kementerian Keuangan				130,95	
		- Proyek On Going				130,95	-
		- Profesional Human Resources Development (PHRDP) III (komponen Bappenas)	JICA	IP-535	21572601	13,58	
		- GFMRAIP	WORLD BANK	4762-IND	10694001	49,47	
		- PINTAR (DJP)	WORLD BANK	7631-ID	10784001	-	
		- Scholarship Program for Strengthening the Reforming Institution	WORLD BANK	8010-IND	10818801	67,90	

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga (Nama Proyek)	Pemberi Pinjaman	Kode Pinjaman	Nomor Register	Jumlah	
						PLN	RMP
4	018	Kementerian Pertanian				334,32	74,89
		- <i>Proyek On Going</i>				334,32	74,89
		- Farmer's Empowerment through Agricultural Ext & Inf (FEATI)	World Bank	4260-IND	10753301	-	-
		- Rural Empowerment and Agricultural Development (READ)	IFAD	645-ID	10749501	11,64	7,76
		- Smallholder Livelihood Development Program in Eastern Indonesia (SOLID)	IFAD	835-ID	71697101	85,36	24,25
		- Water Resources and Irrigation Management Programme Phase II (WISMP II)	World Bank	8027-ID	10837101	50,34	14,84
5	022	Kementerian Perhubungan				3.035,08	-
		- <i>Proyek On Going</i>				2.974,41	-
		- Development of Belawan Port Project Phase I	IDB	IND-133	10801901	383,15	-
		- Track Maintenance Improvement Programme	JERMAN	2005 66 612	21628801	281,30	-
		- Railway Electrification and DD Tracking Project	JICA	IP-508	21500201	1.212,50	-
		- The Urgent Rehab. Project of Tanjung Priok Port	JICA	IP-521	21530201	236,10	-
		- E/S Railway DT on Java South Line III	JICA	IP-540	21583301	-	-
		- Railway DT on Java South Line III	JICA	IP-548	21602601	861,36	-
		- Indonesia Ship Reporting System	Denmark		21645701	-	-
		- Procurement of 1000 km Track Material and 200 Units Turn Out	China	PBC NO 2011	21649501	-	-
		- Procurement and Delivery of 30 units of Aircraft Rescue and Fire Fighting Vehicles	Belanda	ID 00264	49101901	-	-
		- <i>Proyek Baru</i>				60,67	-
		- Railway Double Tracking of Kroya - Kutoarjo on Java Southline - Phase II	JICA	-	-	-	-
		- Improvement and Development of Indonesian Aids to Navigation	EDCF Korea/ Spanyol	-	-	-	-
		- Bandung Urban Railway Transport Development, Electrification Padalarang - Cicalengka Line	Perancis	-	-	-	-
		- E/S Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) East West Line Phase I	JICA	-	-	6,69	-
		- Cilamaya New Port Development Project (Engineering Services)	JICA	-	-	-	-
		- Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I	JICA	-	-	-	-
		- Procurement of Track Material and Turn Out Phase II	CHINA	-	-	53,97	-
		- Railway Double Tracking and Signaling Improv't Solo Surabaya	CHINA	-	-	-	-
		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				1.973,06	-
		- <i>Proyek On Going</i>				1.667,40	-
		- Early Childhood Education & Development (ECED)	World Bank	IDA 4205-IND	10739501	-	-
		- Better Education Through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading Project (BERMUTU)	World Bank	IBRD-7476-IND	10760201	-	-
		- Indonesia Vocational Education Strengthening (INVEST)	ADB	2416-INO	10769501	-	-
		- Sustainable Economic Development Supported by Improving Technical and Vocational Education (SED-TVET)	KfW Jerman	-	21653301	27,16	-
		- The Development And Upgrading Of The State University Of Jakarta	IDB	IND-129/130	10783301 10782601	-	-
		- The North Sumatera University Hospital Of Sumatera Utara University Project*)	IDB	IND-114/115	10738801	-	-
		- The Development Of World Class University At University Of Indonesia	JICA	IP-549	21603301	110,25	-
		- Institute Teknologi Of Bandung Development Project	JICA	IP-553	21618801	342,28	-
		- Hasanuddin University Development Project (Faculty Teknikal)	JICA	IP-541	21584001	207,16	-
		- Health Professional Education Quality Project (Hpeq)	World Bank	7737-ID	10796401	72,79	-
		- The Quality Improvement Of Padjadjaran University (UNPAD) Bandung Project	IDB	IND-140/141	10820201 10821901	172,66	-
		- Development Of Universitas Negeri Semarang	IDB	IND-152/153	10829501 10830201	80,33	-
		- Rehabilitation, Reconstruction And Upgrading Of State University Of Padang	IDB	IND-155/156	10832601 10833301	114,43	-
		- The Development Of Medical Education And Research Center And Two University Hospitals Project In Indonesia	IDB	IND-137 IND-138 SFD B/526	10816401 10817101 21641901	540,34	-
		- <i>Proyek Baru</i>				305,66	-
		- Politechnics Education Development Sector Project	ADB	2928-INO	15858801	266,48	-
		- The Development And Upgrading Of Seven Universities In Improving The Quality And Relevance Of Higher Education In Indonesia	IDB	Pipeline	Pipeline	39,18	-
7	025	Kementerian Agama				480,57	87,02
		- <i>Proyek On Going</i>				183,22	10,21
		- The Development and Quality Improvement of IAIN Sunan Ampel Surabaya	IDB	IND-157 & IND 158	10834001 & 10835701	183,22	10,21
		- <i>Proyek Baru</i>				297,35	76,81
8	029	Kementerian Kesehatan				297,35	76,81
		- The Support to Quality Improvement of The Islamic Higher Education Project	IDB	-	-	-	-
		- <i>Proyek On Going</i>				13,84	0,01
		- The Improvement of the Moh. Hoesin Hospital	KfW Jerman	2002 70 413	21511901	10,48	-
		- Second Decentralized Health Services Project (DHS-2)	ADB	2074-INO	10692601	-	-

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga (Nama Proyek)	Pemberi Pinjaman	Kode Pinjaman	Nomor Register	Jumlah	
						PLN	RMP
		- Second Decentralized Health Services Project (DHS-2)	ADB	2075-INO	10693301	-	-
		- Strengthening of Teaching Hospitals in Indonesia	EDCF Korea	INA-10	21593301	-	-
		- WSLIC III-PAMSIMAS	World Bank	4204-IND	10764001	-	-
		- Improvement of H. Adam Malik Hospital in Medan	EDCF Korea	INA-15	21612601	2,13	-
		- Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program	ADB	2501-INO	10789501	1,23	0,01
9	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan				501,63	6,13
		- <i>Proyek On Going</i>				234,46	5,11
		- Sustainable Agriculture Development for Food Security and Poverty Reduction (SAFVER)	ADB	2285-INO	10752601	-	-
		- Development of Belawan and Sibolga Fishing Port	IDB	IND-122	10764401	63,33	-
		- Installation Services of an Infrastructure for Operational Oceanographic System in Indonesia (INDESO)	AFD	CID 10250 C	21656401	87,55	5,11
		- Coastal Community Development Program	IFAD	880-ID	10852601	57,45	-
		- Coastal Community Development Program	IFAD	16 ID	10853301	26,13	-
		- <i>Proyek Baru</i>				267,17	1,02
		- Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI)		-	-	238,07	-
		- COREMAP CTI	ADB	-	-	14,55	0,51
		- COREMAP CTI	World Bank	-	-	14,55	0,51
	033	Kementerian Pekerjaan Umum				8.391,55	1.244,08
		- <i>Proyek On Going</i>				6.105,93	742,05
		- Komerling Irrigation Project Stage II Phase II	JICA	IP-523	21540201	150,62	-
		- Urgent Disaster Reduction Project for Mt. Merapi/Progo & Bawakeraeng	JICA	IP-524	21541901	26,10	-
10		- Tanjung Priok Access Road Construction Project I (TPARCP I)	JICA	IP-529	21546401	329,98	-
		- Lower Solo River Improvement Project	JICA	IP-522	21539501	94,26	-
		- Urban Sector Development Reform Program (USDRP)	IBRD	7760-ID	10715701	-	-
		- Tanjung Priok Access Road Construction Project II (TPARCP II)	JICA	IP-531	21568801	141,80	-
		- Integrated Water resources & Flood Management Project for Semarang City	JICA	IP-534	21571901	84,66	-
		- Komponen C: Urban Drainage System Improvement and Water Supply Works for The Semarang Area of Semarang City (Integrated Water Resources and Flood Control Management Project for Semarang City)	JICA	IP-534	21571901	63,73	-
		- Regional Infrastructure for Social & Economic Development (RISE)/Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah	JICA	IP-543	21586401	-	-
		- Aceh Reconstruction Project	JICA	IP-545	21588801	100,03	5,26
		- Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP)	IBRD	4834-IND / 7786-ID	10757101	6,00	2,57
		- Construction of Jatigede Dam Project	CHINA	PBC No. (14) Total (35)	21595701	150,74	-
		- Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP)	AUSTRALIA	AIPRD-L002	21594001	152,76	19,08
		- Third Water Supply and Sanitation for Low Income Community Project (PAMSIMAS)	IBRD	4204-IND IDA Cr	10764001	-	-
		- Participatory Irrigation Rehabilitation and Improvement Management Project (PIRIMP)	JICA	IP-546	21600201	100,83	-
		- Decentralization Irrigation System Improvement Project II (DISIMP-II)	JICA	IP-547	21601901	72,20	-
		- Manado By Pass Project Phase II	EDCF	INA-11	21609501	0,10	-
		- Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program Project I (ICWRMIP-I)	ADB	2500-INO	10788801	96,95	26,66
		- Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program Project I (ICWRMIP-I)	ADB	2501-INO (SF)	10789501	161,51	44,42
		- Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP)	IBRD	7669-ID	1078571	68,97	25,29
		- Denpasar Sewerage Development Project II (DSDP II)	JICA	IP-550	21631901	10,52	-
		- Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir	JICA	IP-552	21617101	196,48	-
		- Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities	JICA	IP-551	2161641	71,38	-
		- Additional Financing for National Program for Community Empowerment in Urban Areas Project	IBRD	7664-ID	10790201	-	-
		- Urban Water Supply and Sanitation (UWSSP)	IBRD	7730-IND	SLA	-	-
		- Rural Infrastructure Support to PNPM Mandiri Project II (RIS PNPM II)	ADB	2575-INO	10798801	-	-
		- Third National Program for Community Empowerment in Urban Areas Project (PNPM MP-3)	IBRD	7866-ID	10805701	-	-
		- Regional Solid Waste Development for Mamminasata, South Sulawesi	JICA	IP-558	21631901	106,69	-
		- Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP)	ADB	2654-INO	10811901	45,18	-
		- Padang By Pass Project	EDCF	INA-17	21643301	50,00	-
		- The IDB PNPM Integrated Community Driven Development Project (Phase II)	IDB	IND-147	10824001	-	-
		- The IDB PNPM Integrated Community Driven Development Project (Phase II)	IDB	IND-148	10825701	-	-
		- The IDB PNPM Integrated Community Driven Development Project (Phase II)	IDB	IND-149	10826401	-	-
		- The IDB PNPM Integrated Community Driven Development Project (Phase II)	IDB	IND-150	10827101	-	-

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga (Nama Proyek)	Pemberi Pinjaman	Kode Pinjaman	Nomor Register	Jumlah	
						PLN	RMP
		- Water Resources & Irrigation Sector Management Project 2 (WISMP 2)	IBRD	8027-ID	10837101	168,99	61,96
		- Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Mandiri	ADB	2768-INO	10836401	319,23	-
		- The Construction of Karian Multi-Purpose Dam Project	KOREA	INA-19	21654001	67,62	-
		- Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP)	IBRD	8043-ID	10842601	104,50	153,67
		- Regional Road Development Project (RRDP)	ADB	2817-INO	10846401	553,11	352,75
		- Jakarta Urban Flood Mitigation Project/Jakarta Emergency Dredging Initiative (JUFMP/JEDI)	IBRD	8121-ID	10845701	183,21	50,38
		- Tayan Bridge	CHINA	CHINA	21660201	309,14	-
		- National Community Empowerment Program in Urban Areas for 2012-2015	IBRD	8213-ID	-	601,40	-
		- Regional Road Development Project (RRDP)	IDB	IND-0161	10848801	-	-
		- Cisumdawu Toll Road	CHINA	CHINA	-	617,31	-
		- Medan-Kualanamu Toll Road	CHINA	CHINA	-	764,75	-
		- Bridge Material Supply for Bridge Replacement Programme IV (Phase 2)	SPANYOL	SPANYOL	-	135,19	-
		- Proyek Baru				2.285,62	502,03
		- Urgent Disaster Reduction Project for Mt. Merapi Phase II	JICA	-	-	120,77	-
		- Rehab. Upper Citarum	JICA	-	-	74,20	-
		- Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (II)	JICA	-	-	101,98	-
		- Additional Loan for Jatigede	CHINA	-	-	724,80	100,00
		- Flood Management in Selected River Basin	ADB	-	-	-	-
		- SOLO-KERTOSONO	CHINA	-	-	1,00	184,30
		- Cisumdawu Toll Road II	CHINA	-	-	1,00	217,73
		- Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat II (PAMSIMAS II)	IBRD	-	-	232,32	-
		- Metropolitan Sanitation Management Investment Program (MSMIP)	ADB	-	-	0,97	-
		- Neighbourhood Upgrading and Shelter Sector Project Phase II (NUSSP II)	ADB	-	-	4,75	-
		- The IDB PNPM Integrated Community Driven Development Project Phase 3 (IDB PNPM Phase 3)	IDB	-	-	853,74	-
		- Community Based Sanitation Program (Sanimas) Islamic Development Bank (IDB)	IDB	-	-	95,64	-
		- Small Scale Water Treatment Plan for Emergency Relief	SPANYOL	-	-	60,00	-
		- Ibukota Kecamatan (IKK) Water Supply Program and Small Water Treatment Plant for Water Scarcity Area	Hungaria/ ADB	-	-	9,70	-
		- Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Areas Development (RISE II)	JICA	-	-	4,75	-
		- Program Emission Reduction in Cities-Solid Waste Management	KfW	-	-	-	-
11	042	Kementerian Riset dan Teknologi				126,20	14,07
		- Proyek Baru				126,20	14,07
		- Riset-Pro	World Bank	-	-	126,20	14,07
12	043	Kementerian Lingkungan Hidup				-	-
		- Proyek On Going				-	-
		- Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP)	ADB	2500-INO	10788801	-	-
		- Proyek Baru				-	-
		- Financing Scheme for Emission Reduction Investment	Jerman	-	-	-	-
13	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS				356,82	-
		- Proyek On Going				318,79	-
		- Scholarship Program for Strengthening the reforming institution (SPIRIT)	World Bank	8010-IND	10818801	196,93	-
		- Profesional Human Resources Development (PHRDP) III	JICA	IP-535	21572601	53,42	-
		- Water Irrigation Sector Management Program APL (WISMP) II (Komponen)	World Bank	8027-ID	10837101	2,87	-
		- Participatory Irrigation Rehabilitation & Improvement Management Project (PIRIMP)	JICA	IP-546	21600201	2,00	-
		- Decentralization Irrigation System Improvement Project II	JICA	IP-547	21601901	2,00	-
		- Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program	ADB	2501-INO (SF)	10789501	7,35	-
		- Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities	JICA	IP-551	21616401	2,47	-
		- Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP)	World Bank	7669-IND	10785701	0,80	-
		- Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP)	ADB	2264-INO (SF)	10742601	46,55	-
		- Regional Infrastructure for Social Economic Development (RISE)	JICA	IP-543	21586401	4,40	-
		- Proyek Baru				38,03	-
		- Regional Infrastructure for Social Economic Development (RISE) II	JICA	-	-	34,13	-
		- Professional Human Resource Development Project Phase IV	JICA	-	-	3,90	-
14	054	Badan Pusat Statistik				51,41	-
		- Proyek On Going				51,41	-
		- STATCAP-CERDAS	World Bank	-	10819501	51,41	-
15	060	Kepolisian Republik Indonesia				1.725,32	-
		- Proyek On Going				-	-
		- Allabfor wilayah Kalimantan Timur	BNI, Hongkong	09.02.2011	40156401	-	-
		- Alserse Penyelidikan	BNI, Singapore	12.01.2012	40180201	-	-
		- Alserse Penyelidikan	BNI, Singapore	12.01.2012	40179501	-	-
		- Alintel Kewilayahan	BNI, Singapore	12.01.2012	40182601	-	-

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga (Nama Proyek)	Pemberi Pinjaman	Kode Pinjaman	Nomor Register	Jumlah	
						PLN	RMP
		- Alintel Lanjutan	Exim Bank, Korea	12.01.2012	40188801	-	-
		- Siskomtabes Polda	Exim Bank, Korea	12.01.2012	40187101	-	-
		- Jarkom wilayah Perbatasan	Exim Bank, Korea	13.10.2012	40159501	-	-
		- Kapal Patroli Tipe C	ANZ	16.02.2011	40153301	-	-
		- Harsucad Pesawat	BNi, Singapore	17.07.2012	40229501	-	-
		- Aljihandak EOD/Mole Programmer	Deutsche Bank AG, London	22.08.2012	40234001	-	-
		- IRSMS-2 (Komponen SRIP)	World Bank	4834-IND / 7786-ID	10757101	-	-
		- Proyek Baru				1,725,32	-
		- Integrated Trunking Radio System (ITRS) for Kalimantan	Exim Bank, Korea	-	-	74,26	-
		- Fast Patrol Boats (FPB)	Exim Bank, Korea	-	-	30,54	-
		- National Criminal Identification Center (NCIC) Phase II	Exim Bank, Korea	-	-	54,58	-
		- Data Mining and Knowledge Management	-	-	-	49,47	-
		- Helikopter dengan Perlengkapan Pendukung	-	-	-	90,70	-
		- Allabfor Stasioner Polri (Jy pura & Pk baru)	-	-	-	49,47	-
		- Allabfor Khusus Polri	-	-	-	49,47	-
		- Police Backbone	-	-	-	148,82	-
		- Radio Trunking Polda Jabar	-	-	-	74,21	-
		- Radio Trunking Polda NTT	-	-	-	24,74	-
		- ATMS	-	-	-	41,23	-
		- Peralatan Nubika/KSR	-	-	-	61,84	-
		- Radio Trunking Polda Sumbang	-	-	-	47,41	-
		- Kapal Patroli Tipe C	-	-	-	61,84	-
		- Harsucad Kapal	-	-	-	12,37	-
		- Harsucad Pesawat	-	-	-	16,49	-
		- Alserse Penyelidikan	-	-	-	53,59	-
		- Alserse Penyidikan	-	-	-	90,70	-
		- Aljihandak EOD/Mole Programmer	-	-	-	28,86	-
		- Puslabfor Kewilayahan	-	-	-	74,21	-
		- Allabfor Stasioner Polri	-	-	-	24,74	-
		- Puslabfor Mabes Polri	-	-	-	61,84	-
		- Rantis	-	-	-	70,08	-
		- Kapal Patroli Polisi	-	-	-	34,01	-
		- Helikopter + Perlengkapan Pendukung	-	-	-	41,23	-
		- Pesawat Terbang/Helikopter	-	-	-	74,21	-
		- APC Multifungsi	-	-	-	20,61	-
		- Peralatan Puslabfor	-	-	-	-	-
		- Peralatan Pusedent	-	-	-	-	-
		- Peralatan DVI Dokpol	-	-	-	14,43	-
		- Armoured Water Canon	-	-	-	20,61	-
		- Peralatan Brimob	-	-	-	20,61	-
		- Peralatan Serse	-	-	-	-	-
		- Peralatan Intel	-	-	-	-	-
		- Peralatan Polair/AIS dan VTMS	-	-	-	-	-
		- Sarana Prasarana Komunikasi	-	-	-	123,68	-
		- Pengembangan Teknologi Kepolisian	-	-	-	41,23	-
		- Teknologi Pendidikan	-	-	-	30,92	-
		- Pengadaan Sucad Kapal	-	-	-	12,37	-
16	075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika				141,33	15,32
		- Proyek On Going				141,33	15,32
		- Strengthening the Climate and Weather Services Capacities of the Meteorologi, Climatology and Geophysics Agency of the Republic Indonesia (BMKG)	Natixis Banque	B.880 A 1	2164101	141,33	15,32
17	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia				3,88	1,94
		- Proyek Baru				3,88	1,94
		- WB IBRD COREMAP III - CTI	World Bank	-	-	1,94	0,97
		- ADB COREMAP III - CTI	ADB	-	-	1,94	0,97
18	083	Badan Informasi Geospasial				127,18	-
		- Proyek On Going				127,18	-
		- National Geospasial Data Infrastructure Project	JICA	IP-544	21587101	127,18	-
19	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan				112,04	6,40
		- Proyek On Going				112,04	6,40
		- State Accountability Revitalization	ADB	2927 INO	10859501	112,04	6,40
20	112	BPKPBP Batam				137,49	5,98
		- Proyek Baru				137,49	5,98
		- The Development sewerage System in Batam Island	EDCF Korea	-	-	137,49	5,98
		JUMLAH PROYEK ON GOING				16.265,18	853,99
		JUMLAH PROYEK BARU				16.118,85	601,85
		JUMLAH				32.384,03	1.455,84

LAMPIRAN VI
Rencana Penarikan Hibah Luar Negeri 2014

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga (Nama Proyek)	Pemberi Hibah	Nomor/ Kode Loan	Nomor Register	Rencana Penarikan TA 2014			
						Juta USD	Miliar Rp		
1	010	Kementerian Dalam Negeri				0,46	4,45		
		- Program Kelangsungan Hidup, Perkembangan, dan Perlindungan Ibu dan Anak	UNICEF		715533501	0,08	0,76		
		- National Program for Community	IFAD	1053-ID	70833301	0,10	0,97		
		- Paska Bencana	IBRD-WB	TF-098819	71490201	-	-		
		- Implementasi SIWASDANAS Bagi Pemda secara Nasional	WB			0,28	2,72		
		- Improving Access to Finance in Aceh and North Sumatera	ADB	TA ADB 8224-INO		-	-		
2	018	Kementerian Pertanian				0,36	3,46		
		- Rural Improvement and Agriculture Dev't (READ)	IFAD	726-ID	70702601	0,11	1,07		
		- Area Wide Management of Post Fruit Flies in an Indonesia Mango Production System	ACIAR/ Australia	HORT/2008/041	71111901	0,05	0,44		
		- IFAD to Support SOLID	IFAD	GIB35-ID	71697101	0,20	1,96		
3	022	Kementerian Perhubungan				16,39	158,98		
		- Maintenance and Replacement of Aids to Navigation in Malacca	ANF	IP-S20	21529501	4,39	42,58		
		- VTS Malacca and Singapore Straits Phase II	JICA	GA.07.11.2	70991901	12,00	116,40		
4	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				0,75	7,27		
		- Sustainable Economic Development Supported by Improving Technical and Vocational Education (SED-TVET)	Jerman-KFW	200766071	21653301	0,70	6,79		
		- AEP with Indonesia Contribution to ESSP	AusAID	60472	71864001	0,05	0,48		
5	029	Kementerian Kehutanan				5,29	51,31		
		- Forcime FC Module	KfW	200766089	71227101	4,81	46,66		
6	032	- Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)	World Bank	TF 997721	71671901	0,48	4,66		
		Kementerian Kelautan dan Perikanan				1,59	15,38		
		- COREMAP CTI	GEF			1,00	9,70		
		- Coastal Community Development Program/ Pembangunan Masyarakat Pesisir (CCD-IFAD)	IFAD	1392-ID	73089501	0,14	1,37		
		- Seleksi Strain untuk Peningkatan Pertumbuhan Budidaya Rumpuk Laut	ACIAR		71503300	0,01	0,10		
		- Pemanfaatan Rumpuk Laut Sebagai Bahan Pupuk Organik	ACIAR		71503301	0,01	0,11		
		- Sulu-Celebes Sea SFM National Coordinating Unit and National Coordinator - Indonesia	UNOPS		71634001	0,03	0,25		
		- Developing Research Capacity for Management of Indonesia's Pelagic Fisheries Resources	ACIAR	FIS/2009/059	72878801	0,09	0,89		
		- The Implementation of east Tarakan Kalimantan Demonstration Site of The SCS-SFM	UNOPS		72574001	0,03	0,27		
		- Kajian Sumberdaya Ikan yang termasuk "Highly Migratory Species" dan pengelolaan Perikanan di Perairan Samudera Pasifik Indonesia	WCPCFC		70783301	0,09	0,84		
		- Indonesia China Center for Ocean and Climate (ICCOG)	First Institut Oceanography (FIO) - State Oceanic Administration (SOA) of the People's Republic of China		71181901	0,04	0,40		
		- Kegiatan Utama: Pemantauan In Situ Upwelling di Samudera Hindia Selatan Jawa untuk Pemodelan Migrasi Ikan Tuna	FIO		72408801	0,14	1,36		
		- Adaptasi Lahan Basah di Indonesia Terhadap Proyeksi Kenaikan Muka Air Laut	National Academy of Sciences		72672601	0,01	0,10		
		7	033	Kementerian Pekerjaan Umum				41,05	398,19
				- DED of Jatigede Dam Project	CHINA	-	-	0,94	9,12
- National Community Program for Community Empowerment Support Facility/PFS Trust Fund	WORLD BANK			TF012192	-	20,10	194,97		
- Pelebaran Jalan Tebelian-Sintang	JICA					5,41	52,48		
- Support to PAMSIMAS II	WORLD BANK					12,89	125,03		
8	043	- Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GDFRR)	WORLD BANK			1,71	16,59		
		Kementerian Lingkungan Hidup				3,90	37,83		
		- HCFC Phase Out Management Plan (HPMP)	MLF-UNDP		70707101	2,30	22,31		
9	047	- Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Change Resilience of Rural Communities in NTT (SPARC)	GEF-UNDP		70752601	1,60	15,52		
		Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				0,20	1,94		
10	055	- Gender	UNFPA			0,20	1,94		
		Bappenas				119,24	1.156,67		
		- Strengthening Innovative Partnership for Development Cooperation (SIP-DC)	UNDP		73076401	0,13	1,24		
		- UNFPA Country Programme Eight 2011-2015 Program Cooperative Between The GOI-UNFPA	UNFPA		71509501	0,31	2,97		
		- Program Kerjasama RI-UNICEF (2011-2015)	UNICEF		71539501	0,32	3,11		
		- JFRP 9132-INO: Fortifikasi Beras Bagi Keluarga Miskin	ADB	IFR 9132-INO		0,29	2,83		
		- Program Compact (Sign Sept 2011)	MCC		72200201	116,89	1.133,84		
		- Preparatory Arrangement for the Indonesia Climate Change Trust Fund (Prep-ICCTF)	SIDA, AusAid, DFID-UK		71003301	0,35	3,36		
		- SAPOLA	World Bank			0,20	1,94		
		- Water and Sanitation Policy and Action Planning Facility	World Bank	TF-095502	71149501	0,66	6,37		
11	059	- IDF Change Management				0,11	1,02		
		Kementerian Komunikasi dan Informatika				0,32	3,07		
12	067	- BPOBA - Extending Telecommunication in Rural Indonesia	IBRD	TF 092629	7086191	0,32	3,07		
		Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal				0,14	1,34		
13	068	- Project Peace Through Development in Disadvantage Areas (PTDDA)	UNDP	00060770	72596401	0,14	1,34		
		BKKBN				0,67	6,50		
14	090	- BKKBN - UNFPA CP8 (IDN8-U101, IDN-U123, dan IDN8-U309)	UNFPA	IDN-8	71509501	0,67	6,50		
		Kementerian Perdagangan				0,23	2,20		
15	064	- Trade and Support Programme II (DCI-ASIE/2008/20069)	Uni Eropa		70941901	0,23	2,20		
		Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia				0,03	0,30		
16	079	- Capacity Building in International Topics at LEMHANNAS RI	NUFFIC	NICHE/IDN/ 143		0,03	0,30		
		LIPi				0,10	0,97		
		- WB GEF COREMAP III - CTI / Penelitian Terumbu Karang - CRITC	World Bank	-	-	0,10	0,97		
Jumlah						190,71	1.849,86		

* asumsi kurs USD1 =Rp9.700,-

LAMPIRAN VII

Surat Berharga Syariah Negara *Project Based Sukuk* (SBSN PBS) (Miliar Rupiah)

No.	Kementerian/Proyek	Proyeksi RAPBN 2014
1	Kementerian Perhubungan	1.371,0
	a. Jalur Ganda Cirebon-Kroya Segmen I (Cirebon-Larangan)	745,0
	b. <i>Railway Electrification and Double-Double Tracking of Java Main Line Project</i>	626,0
2	Kementerian Agama	200,0
	a. Revitalisasi Asrama Haji	200,0
Jumlah		1.571,0

Rencana Alokasi Pinjaman Dalam Negeri 2014 (Miliar Rupiah)

No.	Kementerian Negara/Lembaga	Proyeksi RAPBN 2014
1	Kementerian Pertahanan	1.000,0
2	Kepolisian Republik Indonesia	250,0
Jumlah		1.250,0

LAMPIRAN VIII

Pagu Penggunaan PNB/BLU Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2014

(Miliar Rupiah)

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah	
			PNBP	BLU
1	004	Badan Pemeriksa Keuangan	1,1	-
2	007	Sekretariat Negara	-	411,7
3	010	Kementerian Dalam Negeri	28,3	-
4	011	Kementerian Luar Negeri	448,6	-
5	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1.720,2	-
6	015	Kementerian Keuangan	-	152,2
7	018	Kementerian Pertanian	67,8	28,4
8	019	Kementerian Perindustrian	99,7	60,8
9	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1.820,4	85,3
10	022	Kementerian Perhubungan	644,0	252,1
11	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1.953,2	10.191,8
12	024	Kementerian Kesehatan	777,0	6.684,0
13	025	Kementerian Agama	265,5	508,4
14	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	571,0	-
15	027	Kementerian Sosial	4,1	-
16	029	Kementerian Kehutanan	1.532,0	22,2
17	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	59,3	-
18	033	Kementerian Pekerjaan Umum	26,6	25,0
19	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25,1	-
20	042	Kementerian Riset dan Teknologi	3,3	5,8
21	043	Kementerian Lingkungan Hidup	1,5	-
22	044	Kementerian Koperasi dan UKM	-	115,2
23	054	Badan Pusat Statistik	49,0	-
24	056	Badan Pertanahan Nasional	1.385,7	-
25	057	Perpustakaan Nasional	0,8	-
26	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	845,1	1.800,0
27	060	Kepolisian Republik Indonesia	4.464,6	273,7
28	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	43,1	-
29	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	47,2	-
30	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	47,4	-
31	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	23,0	-
32	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	61,2	50,0
33	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	-	5,5
34	083	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional	15,7	-
35	084	Badan Standarisasi Nasional	10,3	-
36	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	7,3	-
37	086	Lembaga Administrasi Negara	71,9	-
38	087	Arsip Nasional RI	5,1	-
39	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	5,0	-
40	090	Kementerian Perdagangan	33,4	-
41	091	Kementerian Perumahan Rakyat	-	179,2
42	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BLU)	-	697,8
		JUMLAH	17.164,5	21.549,1

LAMPIRAN IX
KONTRAK TAHUN JAMAK, 2014

(miliar rupiah)					
No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	MYC Sebelum 2013 Wajib disediakan 2014	MYC Baru 2013 Dalam Proses Persetujuan	Jumlah
1	005	MAHKAMAH AGUNG	-	74,3	74,3
2	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	409,7	235,8	645,5
3	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	779,0	779,0
4	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	247,0	778,2	1.025,2
5	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	-	52,0	52,0
6	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	159,4	-	159,4
7	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	4.839,2	5.679,0	10.518,2
8	041	KEMENTERIAN BUMN	-	6,9	6,9
9	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	51,1	51,1
10	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	-	37,4	37,4
11	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	19,9	-	19,9
12	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	-	110,1	110,1
13	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	204,6	-	204,6
14	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	37,9	-	37,9
15	114	BPKPBP BATAM	102,3	129,0	231,3
JUMLAH			6.019,9	7.932,8	13.952,7

LAMPIRAN III

Surat Menteri Keuangan Kepada Menteri
PPN/Kepala Bappenas tentang Pemutakhiran
Resource Envelope Pagu Indikatif Belanja K/L
RAPBN 2014



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-178/MK.02/2013 5 April 2013
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pemutakhiran *Resource envelope* Pagu Indikatif Belanja K/L RAPBN 2014
Lampiran : 1 (satu) berkas

**Yth. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Jakarta**

Menyusuli surat kami Nomor S-186/MK.02/2013 tanggal 13 Maret 2013 perihal *Resource envelope* Pagu Indikatif Belanja K/L RAPBN 2014, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat dimaksud, *Resource Envelope* pagu indikatif belanja K/L dalam RAPBN 2014 adalah sebesar Rp547,1 triliun, terdiri dari:

Jenis Belanja	Baseline	Potensi New Initiatives	Jumlah
1. Belanja Pegawai	145,0	-	145,0
2. Belanja Barang	146,1	-	146,1
a. Operasional	42,4 ^{a)}	-	42,4
b. Non Operasional	103,6	-	103,6 ^{b)}
3. Belanja Modal	178,8 ^{c)}	32,3 ^{d)}	211,1
4. Bantuan Sosial	44,9	-	44,9 ^{e)}
Jumlah	514,8	32,3	547,1

- a) Belanja Barang Operasional Rupiah Murni
b) Tidak termasuk belanja yang dipindahtangankan ke pihak ke-3 sebesar Rp12,3 triliun, yang direalokasikan ke belanja modal.
c) Termasuk realokasi belanja barang yang dipindahkan tangankan ke pihak ke-3 sebesar Rp12,3 triliun dan bantuan sosial yang dipindahtangankan ke pihak ke-3 sebesar Rp12,0 triliun.
d) Dicapangankan untuk belanja modal (termasuk anggaran pendidikan).
e) Tidak termasuk *baseline* anggaran Jamkesmas sebesar Rp6,5 triliun yang ditampung dalam anggaran PBI pada BA BUN, dan belanja yang dipindahtangankan ke pihak ke-3 sebesar Rp12,0 triliun.

Besaran *Resource Envelope* tersebut antara lain didasari oleh *exercise* kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp500/liter, dan defisit anggaran sebesar 1,2% terhadap PDB untuk menjaga agar *primary balance*-nya positif.

2. Wakil Presiden dalam rapat pada tanggal 21 Maret 2013 memberikan arahan agar defisit APBN dilonggarkan dari 1,2% terhadap PDB menjadi maksimum 1,5% terhadap PDB, guna menciptakan ruang fiskal baru untuk mendanai program-program prioritas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Dengan kebijakan pelonggaran defisit menjadi 1,5% terhadap PDB, maka tercipta tambahan ruang fiskal sebesar Rp19,96 triliun yang terdiri atas:
 - a. Ruang fiskal untuk non-pendidikan Rp15,44 triliun, dan
 - b. Ruang fiskal untuk pendidikan Rp4,52 triliun.
4. Pengalokasian tambahan ruang fiskal tersebut telah dibicarakan bersama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, dengan mengacu pada arahan Wakil Presiden pada rapat di Kantor Wakil Presiden tanggal 21 Maret 2013, dan Rapat Kabinet Terbatas di Bali tanggal 28 Maret 2013, serta rapat di Kantor Wakil Presiden tanggal 3 April 2013, yaitu antara lain untuk mendukung pendanaan bagi:
 - a. Program-program percepatan penurunan angka kemiskinan
 - b. Pemenuhan 15 isu strategis nasional
 - c. Pemenuhan isu-isu strategis lainnya (seperti Pemilu, Pelaksanaan SJSN, dan Irigasi)
5. Dengan demikian *resource envelope* pagu indikatif belanja K/L RAPBN 2014 naik menjadi Rp561,2 triliun (termasuk tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp4,5 triliun), karena dari perluasan ruang gerak sebesar Rp15,44 triliun tersebut, sebesar Rp5,8 triliun akan digunakan untuk tambahan subsidi Raskin yang dialokasikan melalui belanja Non-K/L
6. Pemanfaatan tambahan ruang fiskal untuk pendidikan akan dibahas dalam Forum Komite Pendidikan Nasional, sedangkan pengalokasian ruang fiskal baru tersebut harus dibicarakan bersama antara Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal dengan Kementerian PPN/Bappenas.
7. Hal-hal lain sesuai dengan surat Nomor S-186/MK.02/2013.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudari, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Keuangan,

Agus D.W. Martowardojo



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Tembusan Yth :

1. Wakil Menteri Keuangan I, Kementerian Keuangan
2. Wakil Menteri Keuangan II, Kementerian Keuangan
3. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
5. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas

PROYEKSI ANGGARAN PENDIDIKAN RAPBN 2014
(Miliar Rupiah)

Komponen Anggaran Pendidikan		2013	2014	
		APBN	Proyeksi RAPBN (Surat No. S-186/MK.02/2013)	Proyeksi RAPBN (Surat No. S-278/MK.02/2013)
I.	Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat (K/L)	117.776,7	133.615,7	140.200,8
II.	Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke daerah	214.072,3	239.282,6	239.122,1
III.	Anggaran Pendidikan Melalui Pengeluaran Pembiayaan (Dana Pengembangan Pendidikan Nasional)	5.000,0	2.500,0	1.500,0
	Total Anggaran Pendidikan	336.849,0	375.398,3	380.822,9
	Total Belanja Negara	1.683.011,1	1.876.991,3	1.904.114,5
	Rasio Anggaran Pendidikan thd Total Belanja Negara (%)	20,01	20,00	20,00

LAMPIRAN IV

Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan
Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif dan
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Tahun 2014



**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1949/M.PPN/04/2013

Jakarta, 5 April 2013

S- 279/MK.02/2013

Lampiran : 6 (enam) Berkas

Perihal : Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2014

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Jaksa Agung RI;
3. Kepala Kepolisian RI;
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

di-

Jakarta

Menindaklanjuti hasil Sidang Kabinet Terbatas tanggal 21 Maret 2013 dan 28 Maret 2013 serta Sidang Kabinet Paripurna tanggal 4 April 2013 yang antara lain membahas Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif Tahun 2014, serta dalam rangka pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), dengan ini disampaikan Pagu Indikatif Tahun 2014 sebagaimana tercantum pada **Lampiran I** yang merupakan **ancar-ancar** anggaran belanja untuk setiap Kementerian Negara/Lembaga guna menyusun Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja K/L).

Sehubungan dengan hal tersebut, setiap Kementerian Negara/Lembaga diminta menyusun Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2014, guna menyempurnakan Rancangan Awal RKP Tahun 2014 dengan mengacu dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Indikatif yang telah ditetapkan melalui Surat Bersama ini merupakan batas atas yang tidak dapat dilampaui, dan dapat berkurang berdasarkan hasil pembahasan dalam *trilateral meetings*.
2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang memuat isu dan langkah strategis pada tahun 2014 yang difokuskan pada:

Pemantapan Perekonomian Nasional:

- a. Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai, dan gula;

80

- b. Konektivitas untuk menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri dalam rangka dukungan MP3EI;
- c. Perkuatan kelembagaan hubungan industrial;
- d. Diversifikasi pemanfaatan energi;
- e. Peningkatan kemampuan Iptek dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan ekonomi nasional;
- f. Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat;

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat:

- a. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan;
- b. Penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- c. Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak;
- d. Perluasan Program Keluarga Harapan;
- e. Pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan (MP3KI);
- f. Mitigasi Bencana (infrastruktur *shelter* perlindungan dan penanganan banjir);

Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik:

- a. Percepatan pembangunan *Minimum Essential Force*;
- b. Pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme;
- c. Pelaksanaan Pemilu 2014.

3. Arah kebijakan fiskal yang dijabarkan dalam rencana tindak sebagai berikut:
 - a. Menetapkan *baseline* belanja pegawai dan menggunakan prinsip *flat policy* untuk penghitungan belanja barang operasional/pemeliharaan perkantoran yaitu:
 - 1) Belanja pegawai ditetapkan berdasarkan realisasi tahun 2012 yang diproyeksikan atas Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (RABPP) tahun 2013, dengan mempertimbangkan database pegawai, kenaikan gaji berkala, moratorium PNS, dan pemotongan belanja pegawai transit dan tunjangan kinerja bagi K/L yang sampai tahun 2012 telah melaksanakan reformasi birokrasi;
 - 2) Belanja barang operasional/pemeliharaan perkantoran ditetapkan turun dari alokasinya dalam RABPP tahun 2013, setelah memperhitungkan perkiraan kinerja daya serap anggaran di tahun 2013.
 - b. Kebutuhan *baseline* belanja non operasional (selain belanja pegawai dan barang operasional), ditetapkan berdasarkan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) 2014 yang tercantum dalam RABPP 2013, dengan memperhitungkan perkiraan kinerja daya serap anggaran di tahun 2013 serta efisiensi belanja perjalanan dinas, seminar, konsiyering, workshop, dan honorarium tim, yang dialokasikan sesuai kebutuhan dan tugas fungsi masing-masing K/L;
 - c. Mendukung upaya pengembangan infrastruktur, termasuk upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai aset negara, melalui peningkatan alokasi belanja modal (termasuk belanja barang dan bantuan sosial yang berkarakteristik belanja modal, yang akan dipindahtangankan ke pihak ke-3);
 - d. Alokasi bantuan sosial difokuskan untuk pencapaian sasaran-sasaran prioritas bantuan sosial yang mengacu pada kegiatan-kegiatan dalam 4 klaster pengurangan kemiskinan, dan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan;
 - e. Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri;
 - f. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (*multi-years*);
 - g. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; serta,

. D .

- h. Untuk menjaga kesesuaian dengan postur APBN, K/L diminta untuk memperhatikan rincian sumber dana dan jenis belanja sebagaimana tercantum pada **Lampiran I.A dan I.B.**
4. Prioritas-prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagaimana tersebut pada **Lampiran II** (Buku I Rancangan Awal RKP Tahun 2014). Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai **program dan kegiatan prioritas yang terkait dengan Prioritas Pembangunan Nasional** diminta untuk memberikan konfirmasi atau mengusulkan perubahan/penyempurnaan terhadap kegiatan prioritas dan/atau alokasi anggaran yang tercantum dalam Buku I Rancangan Awal RKP Tahun 2014, dengan memperhatikan komitmen pelaksanaan kegiatan prioritas yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Usulan perubahan atau konfirmasi tersebut agar dituangkan dalam masing-masing Renja K/L.
 5. Prioritas-prioritas pembangunan bidang yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagaimana tersebut pada **Lampiran III** (Buku II Rancangan Awal RKP Tahun 2014). Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai **program dan kegiatan prioritas yang terkait dengan prioritas pembangunan bidang** diminta untuk memberikan konfirmasi atau mengusulkan perubahan/penyempurnaan terhadap kegiatan prioritas dan/atau alokasi anggaran yang tercantum dalam Buku II Rancangan Awal RKP Tahun 2014, dengan memperhatikan komitmen pelaksanaan kegiatan prioritas yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Usulan perubahan atau konfirmasi tersebut agar dituangkan dalam masing-masing Renja K/L.
 6. Prioritas-prioritas pembangunan daerah (dimensi kewilayahan) yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagaimana tersebut pada **Lampiran IV** (Buku III Rancangan Awal RKP Tahun 2014). Kementerian Negara/ Lembaga yang mempunyai **program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan di daerah** diminta untuk memberikan rincian program dan kegiatan prioritas beserta alokasi anggaran sesuai dengan format yang tercantum dalam Buku III Rancangan Awal RKP Tahun 2014. Usulan tersebut agar dituangkan dalam masing-masing Renja K/L.
 7. Renja K/L disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan, termasuk untuk subsidi, *Public Service Obligation (PSO)*, dan belanja lain yang bersifat khusus yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari kebijakan K/L tersebut.
 8. Efektifitas dan efisiensi pencapaian sasaran pembangunan K/L antara lain melalui:
 - a. Mengkaji kembali kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) untuk lebih difokuskan (*refocusing*) pada kinerja utama Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. Mengkaji ulang pembangunan gedung kantor baru dan menundanya apabila tidak sangat mendesak. Apabila rencana pembangunan gedung baru tetap akan dilakukan, harus menggunakan spesifikasi dan standar sesuai Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
 - c. Membatasi/mengurangi komponen pendukung pencapaian *output* yang tidak terkait langsung dengan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, antara lain: (i) perjalanan dinas dalam dan luar negeri; (ii) rapat dan konsinyering di luar kantor; (iii) honorarium tim; (iv) pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga (mess, wisma, rumah dinas, rumah jabatan, gedung pertemuan); (v) pengadaan kendaraan bermotor (kecuali pengadaan kendaraan fungsional seperti ambulans).

80

untuk rumah sakit, kendaraan untuk tahanan, kendaraan roda dua untuk penyuluh, dan penggantian kendaraan rusak berat); (vi) pemasangan iklan yang tidak terkait secara langsung dengan layanan K/L pada media massa dan media elektronik; dan (vii) kegiatan lain yang sejenis atau serupa.

9. Sinergi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui:
 - a. memilih kegiatan yang akan didanai oleh K/L dengan berpedoman pada pembagian urusan dan kewenangan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. menentukan distribusi alokasi anggaran K/L untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dalam kerangka pencapaian prioritas nasional;
 - c. mengupayakan sinkronisasi kegiatan dalam Renja K/L dengan kegiatan-kegiatan daerah yang dibiayai dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus;
10. Dalam rangka klasifikasi belanja negara menurut fungsi, Kementerian Negara/Lembaga diminta melaksanakan pencatatan sesuai Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai contoh, Kementerian Negara/Lembaga yang **menyelenggarakan kegiatan pendidikan** diminta **mencantumkan** kegiatan pendidikan tersebut **dalam klasifikasi fungsi pendidikan**.
11. Dalam proses penyusunan Renja K/L, dilakukan Pertemuan Tiga Pihak antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diatur dalam **Lampiran V** tentang buku Petunjuk Pertemuan Tiga Pihak.
12. Terkait Inisiatif Baru Tahun Anggaran 2014:
 - a. Alokasi anggaran Inisiatif Baru yang sudah dialokasikan dalam surat ini tidak dapat berkurang dan pemanfaatannya tidak dapat digunakan (dialihkan) untuk membiayai kegiatan lainnya;
 - b. Dalam penilaian Inisiatif Baru yang telah mendapatkan alokasi dalam surat ini, diperlukan TOR dan RAB yang harus disiapkan oleh KL pengusul untuk dibahas dalam Pertemuan Tiga Pihak (*trilateral meeting*);
 - c. K/L yang tidak dapat memenuhi kelengkapan TOR dan RAB, maka alokasi anggaran K/L yang bersangkutan akan mengalami pengurangan;
 - d. K/L yang mendapatkan tambahan alokasi anggaran untuk Inisiatif Baru berdasarkan Direktif Presiden tetapi belum mengajukan proposal Inisiatif Baru, maka diharapkan dapat segera mengajukan proposal Inisiatif Baru sebelum ditetapkannya pagu anggaran K/L.
13. Acuan penyusunan Renja K/L yang diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Renja K/L 2014 dan program aplikasinya (*software*) sebagaimana tersebut pada **Lampiran VI**.

Selanjutnya, Renja K/L Tahun 2014 yang telah disusun agar disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan selambat-lambatnya **Rabu, 17 April 2013** untuk digunakan sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), penyempurnaan Rancangan Akhir RKP Tahun 2014, serta penyusunan dan penelaahan RKA-KL Tahun 2014.

Himpunan Renja K/L yang disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan

. D .

akan dijadikan salah satu acuan dalam penetapan pagu anggaran oleh Menteri Keuangan.

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan alokasi Pagu Indikatif Tahun 2014, akan disampaikan revisi Pagu Indikatif Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.

Atas perhatian Saudara/Saudari, kami ucapkan terima kasih.



Ka. Menteri PPN/ Kepala Bappenas,

Armida S. Alisjahbana



Menteri Keuangan,

Agus D.W. Martowardojo

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia

LAMPIRAN V

Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas
dan Menteri Keuangan tentang Revisi Pagu
Indikatif Tahun 2014



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S- 398/MK.02/2013
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan
tentang Revisi Pagu Indikatif Tahun 2014

12 Juni 2013

Yth. Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Revisi Pagu Indikatif Tahun 2014, disampaikan bahwa mengingat pagu belanja K/L sebesar Rp554.836,1 miliar telah disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam Rapat Terbatas Kabinet tanggal 14 Mei 2013 yang membahas Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Pagu Indikatif Tahun 2014, dan telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, maka kami telah menandatangani Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Revisi Pagu Indikatif Tahun 2014 tersebut, dengan catatan:

- Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan belum pernah mendapatkan informasi/konfirmasi dari K/L mengenai adanya perubahan rencana *disbursement* PHLN dengan penurunan (netto) PLN sebesar Rp1.287,6 miliar dan HLN sebesar Rp475,3 miliar,
- Penurunan (netto) PHLN yang disampaikan oleh Bappenas tidak diikuti dengan penurunan RMP, sehingga terdapat perubahan pemanfaatan dari RMP menjadi RM,
- Masih terdapat perbedaan hasil *trilateral meeting* dengan revisi pagu indikatif yang disampaikan oleh Bappenas, seperti perubahan PHLN dan tambahan anggaran terkait dengan kinerja K/L.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Keuangan

Muhamad Chatib Basri

Tembusan :

- Direktur Jenderal Anggaran
- Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas

LAMPIRAN VI

Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan
Menteri Keuangan tentang Revisi Pagu Indikatif
Tahun 2014



**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 0202 /M.PPN/06/2013
S- 399 /MK.02/2013

Jakarta, 14 Juni 2013

Lampiran : Satu Berkas

Perihal : Revisi Pagu Indikatif Tahun 2014

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Jaksa Agung RI;
3. Kepala Kepolisian RI;
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

di-

Jakarta

Mengacu kepada Sidang Kabinet Terbatas tanggal 14 Mei 2013 yang membahas finalisasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014; dan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No. 1949/M.PPN/04/2013 dan No. S-279/MK.02/2013 tanggal 5 April 2013 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014, bersama ini disampaikan Revisi Pagu Indikatif Tahun 2014 sebagaimana tercantum pada **Lampiran I** yang merupakan **ancar-ancar** anggaran belanja untuk setiap Kementerian Negara/Lembaga yang telah mengalami perubahan setelah dilaksanakannya proses penyusunan RKP Tahun 2014.

Revisi Pagu Indikatif Tahun 2014 merupakan perubahan Pagu Indikatif K/L terkait dengan pemenuhan tambahan kebutuhan belanja K/L yaitu untuk memenuhi isu strategis, hasil Musrenbangnas, tambahan kinerja K/L dan penyesuaian PHLN. Berdasarkan revisi tersebut, diminta kepada K/L yang mengalami revisi untuk segera menyusun kembali (merevisi) Rencana Kerja Kementerian Negara /Lembaga (Renja K/L) Tahun Anggaran 2014 yang telah disampaikan sebelumnya.

Dalam hal menyusun kembali Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja K/L), setiap Kementerian Negara/Lembaga agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Revisi Pagu Indikatif yang telah ditetapkan melalui Surat Bersama ini merupakan batas atas yang tidak dapat dilampaui.
2. Pemenuhan pendanaan isu strategis tahun anggaran 2014, serta hasil kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak, dan hasil kesepakatan rangkaian pelaksanaan Musrenbangnas.
3. - Prioritas-prioritas pembangunan nasional, bidang dan daerah (dimensi kewilayahan) yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 sebagaimana tersebut pada **Lampiran II** Surat Bersama ini (CD Perpres RKP Tahun 2014).

4. Terkait Inisiatif Baru kesempatan 1 (satu) dan kesempatan 2 (dua) Tahun Anggaran 2014:
 - a. Alokasi anggaran Inisiatif Baru yang sudah dialokasikan dalam surat ini tidak dapat berkurang dan pemanfaatannya tidak dapat digunakan (dialihkan) untuk membiayai kegiatan lainnya;
 - b. Inisiatif Baru yang telah mendapatkan alokasi sesuai dengan lampiran dalam surat ini, diperlukan TOR dan RAB yang harus disiapkan oleh K/L pengusul;
 - c. K/L yang tidak dapat memenuhi kelengkapan TOR dan RAB, maka alokasi anggaran K/L yang bersangkutan dapat mengalami pengurangan dalam pagu anggaran; .
5. Acuan penyusunan Renja K/L yang diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Renja K/L 2014 dan program aplikasinya (*software*).

Selanjutnya, Renja K/L Tahun 2014 yang telah disusun agar disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan selambat-lambatnya tanggal **21 Juni 2013**.

Himpunan Renja K/L yang disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan akan dijadikan salah satu acuan dalam penetapan pagu anggaran oleh Menteri Keuangan dan dalam penyusunan dokumen RKA-K/L.

Demikian disampaikan. Atas perhatian Saudara/Saudari, diucapkan terima kasih.

& Menteri PPN/Kepala Bappenas,



Armida S. Alisjahbana

Menteri Keuangan,



Muhamad Chatib Basri

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia

ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA

(miliar rupiah)

NO URUT	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	RAPBN TAHUN 2014									
			RUPIAH MURNI	PNNP	BADAN LAYANAN UMUM	PNNP/BLU	PINJAMAN LUAR NEGERI	HIBAH LUAR NEGERI	PHLN	PINJAMAN DALAM NEGERI	SBSN/PBS	JUMLAH
a	b	c	d	e	f	g = e + f	h	i	j = h + i	k	l	m = d + g + j + k + l
1	001	MAJELIS PERMUSAWARATAN RAKYAT	606,5	-	-	-	-	-	-	-	-	606,5
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	2.784,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2.784,2
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.694,6	1,1	-	1,1	-	-	-	-	-	2.695,7
4	005	MAHKAMAH AGUNG	7.225,1	-	-	-	-	-	-	-	-	7.225,1
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	3.862,9	-	-	-	-	-	-	-	-	3.862,9
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	1.763,9	0,1	215,9	216,0	-	-	-	-	-	1.979,9
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	12.868,5	28,3	-	28,3	1.497,0	409,2	1.906,2	-	-	14.803,1
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	4.614,0	448,2	-	448,2	-	-	-	-	-	5.062,2
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	69.420,4	-	-	-	13.007,3	-	13.007,3	1.000,0	-	83.427,7
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	5.572,9	1.709,4	-	1.709,4	-	-	-	-	-	7.282,3
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	17.923,1	-	657,7	657,7	131,0	-	131,0	-	-	18.711,7
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	15.029,4	728	30,6	103,4	334,3	3,5	337,8	-	-	15.470,6
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.447,8	101,4	62,0	163,4	11,1	-	11,1	-	-	2.622,3
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	14.509,7	1.668,2	85,3	1.753,5	-	-	-	-	-	16.263,2
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	33.677,0	660,1	249,5	909,6	3.035,1	159,0	3.194,1	-	1.371,0	39.151,7
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	68.260,9	2.041,2	10.461,0	12.502,3	1.973,2	7,3	1.980,4	-	-	82.743,6
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	37.807,8	355,7	6.640,6	6.996,3	13,9	41,1	54,9	-	-	44.859,0
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	47.932,9	390,6	578,5	969,1	480,5	-	480,5	-	200,0	49.582,5
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.657,7	244,1	-	244,1	9,0	-	9,0	-	-	3.910,8
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	7.634,7	4,1	-	4,1	-	-	-	-	-	7.638,8
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	3.614,6	1.573,9	22,2	1.596,1	-	51,3	51,3	-	-	5.262,0
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.028,4	56,1	-	56,1	501,6	15,4	517,0	-	-	5.601,5
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	67.168,0	24,4	25,0	49,4	7.315,0	375,7	7.690,7	-	-	74.908,1
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	514,3	-	-	-	-	-	-	-	-	514,3
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	317,5	-	-	-	-	-	-	-	-	317,5
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	218,4	-	-	-	-	-	-	-	-	218,4
27	040	KEMENTERIAN PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.679,2	25,7	-	25,7	-	-	-	-	-	1.704,9
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	131,6	-	-	-	-	-	-	-	-	131,6
29	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	481,1	4,1	6,2	10,3	126,2	-	126,2	-	-	617,7
30	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	883,1	1,5	-	1,5	6,0	13,5	19,5	-	-	904,2
31	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.307,3	-	128,0	128,0	-	-	-	-	-	1.435,4
32	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	212,8	-	-	-	-	1,9	1,9	-	-	214,7
33	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	159,8	-	-	-	-	-	-	-	-	159,8
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.303,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.303,8

NO URUT		KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	RAPBN TAHUN 2014									
				RUPIAH MURNI	PNBP	BADAN LAYANAN UMUM	PNBP/BLU	PINJAMAN LUAR NEGERI	HIBAH LUAR NEGERI	PHLN	PINJAMAN DALAM NEGERI	SBSN PBS	JUMLAH
a	b		c	d	e	f	g = e + f	h	i	j = h + i	k	l	m = d + g + j + k + l
35	051		LEMBAGA SANDI NEGARA	1.346,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.346,5
36	052		DEWAN KETAHANAN NASIONAL	31,0	-	-	-	-	-	-	-	-	31,0
37	054		BADAN PUSAT STATISTIK	3.475,2	52,3	-	52,3	51,2	-	51,2	-	-	3.578,7
38	055		KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /BAPPENAS	612,7	-	-	-	290,7	270,9	561,6	-	-	1.174,3
39	056		BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.812,0	1.426,6	-	1.426,6	-	-	-	-	-	4.238,6
40	057		PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	434,2	0,8	-	0,8	-	-	-	-	-	435,1
41	059		KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	934,7	846,5	1.800,0	2.646,5	6,0	-	6,0	-	-	3.587,2
42	060		KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	34.847,9	4.448,1	280,3	4.728,4	1.699,3	-	1.699,3	250,0	-	41.525,6
43	063		BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.077,1	56,1	-	56,1	-	-	-	-	-	1.133,1
44	064		LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	332,5	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	332,8
45	065		BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	609,1	-	-	-	-	-	-	-	-	609,1
46	066		BADAN NARKOTIKA NASIONAL	792,8	-	-	-	-	-	-	-	-	792,8
47	067		KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	1.330,0	-	-	-	-	1,3	1,3	-	-	1.331,3
48	068		BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.881,9	-	-	-	-	6,5	6,5	-	-	2.888,4
49	074		KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	68,7	-	-	-	-	-	-	-	-	68,7
50	075		BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.379,8	46,7	-	46,7	141,3	-	141,3	-	-	1.567,9
51	076		KOMISI PEMILIHAN UMUM	15.410,4	-	-	-	-	-	-	-	-	15.410,4
52	077		MAHKAMAH KONSTITUSI	189,0	-	-	-	-	-	-	-	-	189,0
53	078		PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-	65,0
54	079		LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.015,5	52,3	-	52,3	3,9	1,0	4,9	-	-	1.072,7
55	080		BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	695,4	23,1	-	23,1	-	-	-	-	-	718,5
56	081		BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	700,9	81,0	40,1	121,1	-	-	-	-	-	822,0
57	082		LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	783,3	-	6,0	6,0	-	-	-	-	-	789,2
58	083		BADAN INFORMASI GEOSPASIAL *)	659,4	16,0	-	16,0	127,2	-	127,2	-	-	802,6
59	084		BADAN STANDARDISASI NASIONAL	85,0	10,4	-	10,4	-	-	-	-	-	95,4
60	085		BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	94,9	5,8	-	5,8	-	-	-	-	-	100,7
61	086		LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	184,7	51,1	-	51,1	-	-	-	-	-	235,8
62	087		ARSP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	119,1	6,5	-	6,5	-	-	-	-	-	125,6
63	088		BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	543,0	-	-	-	-	-	-	-	-	543,0
64	089		BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.114,3	7,0	-	7,0	112,0	-	112,0	-	-	1.233,4
65	090		KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.196,9	42,3	-	42,3	-	2,2	2,2	-	-	2.241,4
66	091		KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	4.364,4	-	200,8	200,8	-	-	-	-	-	4.565,2
67	092		KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.881,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.881,2
68	093		KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	616,9	-	-	-	-	-	-	-	-	616,9
69	095		DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	721,3	-	-	-	-	-	-	-	-	721,3
70	100		KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA	83,5	-	-	-	-	-	-	-	-	83,5

RAPBN TAHUN 2014												
NO URUT	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	RUPIAH MURNI	PNBP	BADAN LAYANAN UMUM	PNBP/BLU	PINJAMAN LUAR NEGERI	HIBAH LUAR NEGERI	PHLN	PINJAMAN DALAM NEGERI	SBSN PBS	JUMLAH
a	b	c	d	e	f	g = e + f	h	i	j = h + i	k	l	m = d + g + j + k + l
71	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	931,3	-	-	-	-	-	-	-	-	931,3
72	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	329,1	-	-	-	-	-	-	-	-	329,1
73	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDAARIO (BPLS)	845,1	-	-	-	-	-	-	-	-	845,1
74	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	167,0	-	-	-	-	-	-	-	-	167,0
75	107	BADAN SAR NASIONAL	1.488,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1.488,7
76	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	95,0	-	-	-	-	-	-	-	-	95,0
77	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	381,6	-	-	-	-	-	-	-	-	381,6
78	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	67,0	-	-	-	-	-	-	-	-	67,0
79	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	194,1	-	-	-	-	-	-	-	-	194,1
80	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	200,0	-	697,8	697,8	108,0	-	108,0	-	-	1.005,9
81	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	302,8	-	-	-	-	-	-	-	-	302,8
82	114	SEKRETARIAT KABINET	185,6	-	-	-	-	-	-	-	-	185,6
83	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	3.261,9	-	-	-	-	-	-	-	-	3.261,9
84	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	998,0	-	-	-	-	-	-	-	-	998,0
85	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1.075,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.075,1
86	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	392,2	-	-	-	-	-	-	-	-	392,2
TOTAL			538.718,9	16.583,9	22.187,6	38.771,6	30.980,7	1.360,1	32.340,8	1.250,0	1.571,0	612.652,3

Rencana Penarikan Hibah Luar Negeri 2014

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga (Nama Proyek)	Pemberi Hibah	Nomor/ Kode Loan	Nomor Register	Rencana Penarikan TA 2014	
						Juta USD	Miliar Rp
1	010	Kementerian Dalam Negeri				42,19	409,20
		- National Program for Community	IFAD	1053-ID	70833301	-	-
		- Program Kelangsungan Hidup, Perkembangan, dan Perlindungan Ibu dan Anak	UNICEF		71533501	-	-
		- Fasilitas Pembinaan dan Pengendalian PNPM MPD Generasi		TF097410	71161901	42,19	409,20
2	018	Kementerian Pertanian				0,36	3,46
		- Area Wide Management of Post Fruit Flies in an Indonesia Mango Production System	ACIAR/AUSTRALIA	HORT/2008/041	71111901	0,05	0,44
		- IFAD to Support SOLID	IFAD	GI835-ID	71697101	0,20	1,96
		- Rural Improvement and Agriculture Dev't (READ)	IFAD	726-ID	70702601	0,11	1,07
3	022	Kementerian Perhubungan				16,39	158,98
		- Maintenance and Replacement of Aids to Navigation in Malacca	ANF	IP-520	21529501	1,64	15,89
		- VTS Selat Malacca - Singapore Tahap II	JICA	GA. 07.11.2	70991901	14,75	143,09
4	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				0,75	7,27
		- AEP contribution to Education Sector Support Program (ESSP)	AUSAID	CRIS/2009/021-060	71864001	0,05	0,48
		- Sustainable Economic Development Supported by Improving Technical and Vocational Education	JERMAN	2007 66 071	72160201	0,70	6,79
5	024	Kementerian Kesehatan				4,23	41,06
		- Water Supply and Sanitary for Low Income Comm Project (PAMSIMAS)	AusAid/World Bank	TF094792	70920201	4,23	41,06
6	029	Kementerian Kehutanan				5,29	51,31
		- Forclime FC Module	JERMAN	2007 66 089	71227101	4,81	46,66
		- Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)	WORLD BANK	TF 997721	71671901	0,02	
		- Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)	WORLD BANK	TF 997721	71671901	0,46	4,48
7	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan				1,59	15,38
		- Developing Research Capacity for Management of Indonesia's Pelagic Fisheries Resources	ACIAR	FIS/2009/059	72878801	0,08	0,79
		- Pemanfaatan Rumput Laut Sebagai Sumber Bahan Pupuk Organik	ACIAR	SMAR/ 2008/025	71503301	0,01	0,11
		- Seleksi Strain untuk Peningkatan Pertumbuhan Budidaya Rumput Laut	ACIAR		71503300	0,01	0,06
		- Kegiatan Utama: Pemantauan In Situ Upwelling di Samudera Hindia Selatan Jawa untuk Pemodelan Migrasi Ikan Tuna	FIO		72408801	0,21	1,99
		- Sub kegiatan:					
		- Java Upwelling Variations Observation (JUVO)					
		- The South China Sea-Indonesia Seas Transport/ Exchange (SITE)					
		- Coremap CTI	GEF		xxxxxxx03	0,04	0,41
		- Coremap CTI	GEF		xxxxxxx03	0,96	9,29
		- Coastal Community Development Program	IFAD	1392-ID	73089501	0,14	1,37
		- Adaptasi Lahan Basah di Indonesia Terhadap Proyeksi Kenaikan Muka Air Laut	NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES		72672601	0,01	0,10
		- Kajian Sumber Daya Ikan yang termasuk "Highly Migratory Species" dan Pengelolaan Perikanan di Perairan Samudera Pasifik Indonesia	UNOPS		70783301	0,09	0,84
		- Sulu-Celebes Sea SFM National Coordinating Unit and National Coordinator - Indonesia	UNOPS		71634001	0,02	0,16
		- The Implementation of East Tarakan Kalimantan Demonstration Site of the SCS-SFM	UNOPS		72574001	0,03	0,27
8	033	Kementerian Pekerjaan Umum				38,73	375,70
		- DED of Jatigede Dam Project	CHINA			0,94	9,11
		- Pelebaran Jalan Tebelian-Sintang	JICA			3,09	30,00
		- Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR)	WORLD BANK			1,71	16,59
		- National Community Program for Community Empowerment Support Facility/PSF Trust Fund	WORLD BANK	TF012192		20,10	194,97
		- Support to PAMSIMAS II	WORLD BANK			12,89	125,03
9	043	Kementerian Lingkungan Hidup				1,40	13,54
		- Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Change Resilience	GEF-UNDP		70752601	-	-
		- HCFC Phase Out Management Plan	MLF-UNDP		70707101	-	-
10	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				0,20	1,94
		- Gender	UNFPA			0,20	1,94
11	055	Bappenas				27,93	270,95
		- JFRP 9132-INO: Fortifikasi Beras Bagi Keluarga Miskin	ADB	IFR-9132--INO	0	0,29	2,77
		- Program Compact	MCC		72200201	25,77	250,00
		- IDG Grant for Preparing Bappenas for the Future: Strategic Management and Institutional Strengthening Project	World Bank	TF-099200	0	0,10	1,00
		- Preparatory Arrangement for the Indonesia Climate Change Trust Fund (Prep-ICCTF)	SIDA, AUSAID, DFID-UK		71003301	0,34	3,29
		- Strengthening Innovative Partnership for Development Cooperation (SIP-DC)	UNDP		73076401	0,13	1,21
		- UNFPA Country Programme Eight 2011-2015 Program Cooperative Between The GOI-UNFPA	UNFPA		71509501	0,15	1,50
		- Program Kerjasama RI-UNICEF Siklus 8 (2011-2015)	UNICEF		71539501	0,31	3,04
		- SAPOLA	World Bank		0	0,20	1,90
		- Water and Sanitation Policy and Action Planning Facility	World Bank	TF-095502	71149501	0,64	6,24

Rencana Penarikan Hibah Luar Negeri 2014

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga (Nama Proyek)	Pemberi Hibah	Nomor/ Kode Loan	Nomor Register	Rencana Penarikan TA 2014	
						Juta USD	Miliar Rp
12	059	Kementerian Komunikasi dan informatika				-	-
		- GPOBA - Extending Telecommunication in Rural Indonesia	IBRD	TF 092629	70861901	-	-
13	064	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia				0,03	0,30
		- Capacity Building in International Topics at Lemhanas RI	NUFFIC	NICHE/IDN/143		0,03	0,30
14	067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal				0,14	1,34
		- Project Peace Through Development in Disadvantage Areas (PTDDA)	UNDP	00060770	72596401	0,14	1,34
15	068	BKKBN				0,67	6,50
		- BKKBN - UNFPA CP8 (IDN8-U101, IDN-U123, dan IDN8-U309)	UNFPA	IDN-8	71509501	0,67	6,50
16	079	LIPi				0,10	0,97
		- Coremap III - CTI	World Bank GEF	-	-	0,10	0,97
17	090	Kementerian Perdagangan				0,23	2,20
		- Trade and Support Programme II (DCI-ASIE/2008/20069)	UNI EROPA		70941901	0,23	2,20
		JUMLAH				140,22	1.360,10

* asumsi kurs USD1 =Rp9.700,-

Pinjaman Luar Negeri Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2014

(miliar rupiah)

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga (Nama Proyek)	Pemberi Pinjaman	Kode Pinjaman	Nomor Register	Jumlah		
						PLN	PLN	RMP
1	010	Kementerian Dalam Negeri				153,54	1.497,01	
		- Proyek On Going				150,91	1.471,41	
		- ICWRMP	ADB	2500-INO	10788801	-	-	-
		- National Programme for Community Empowerment	IFAD	755-ID	10780201	1,49	14,54	-
		- Regional Infrastructure for Social Economic (Komponen Kem. PU)	JICA	IP-543	21586401	-	-	-
		- Fourth National Program for Community Empowerment in Rural Areas	World Bank	8079-ID	10828801	-	-	-
		- WISMP II (Komponen Kem. PU)	World Bank	8027-ID	10837101	0,88	8,55	-
		- National Program for Community Empowerment in Rural 2012-2015	World Bank	8217-ID	10780201	147,13	1.434,52	-
		- PAMSIMAS II (Komponen Ditjen Bina Bangsa dan PMD)	World Bank	8217-ID	0	1,42	13,80	-
		- Proyek Baru				2,62	25,59	
		- Integrated Citarum Water Resources Management Phase II	ADB	0	0	-	-	-
		- Regional Infrastructure for Social Economic Phase II (Komponen Ditjen Bina Bangsa dan PMD)	JICA	0	0	2,62	25,59	-
2	012	Kementerian Pertahanan				1.334,09	13.007,34	
		- Proyek On Going				922,20	8.991,49	-
		- Pesawat Pengganti AS 202 & T-34C	AKA Ausfuhrkredit-GMBH	0	40200201	13,59	132,48	-
		- Rudal MLRS	Bank Mandiri Cayman Island	0	40252601	60,77	592,48	-
		- Helikopter MI-2	BNI Hongkong Branch	0	40105701	-	-	-
		- Pengadaan Peralatan Tambahan Helikopter MI-17 V5	BNI Hongkong Branch	0	40158801	0,95	9,23	-
		- Radio Yonset, Kiset, Tonset, Ruset	BNI Singapore Branch	0	40237101	0,25	2,47	-
		- Siskomsat Mabes (APP 2005)	BNI Singapore Branch	0	40178801	0,30	2,88	-
		- Sucad Avionic C-130	BNI Singapore Branch	0	40184001	1,42	13,83	-
		- Sucad dan Perbaikan Hawk 109	BNI Singapore Branch	0	40150201	12,26	119,55	-
		- Sucad Engine Hawk (APP 2009)	BNI Singapore Branch	0	40185701	11,42	111,31	-
		- Sucad F16 dan F5 (APP 2008)	BNI Singapore Branch	0	40181901	4,38	42,68	-
		- Up Grade Retrofit Pesawat C-130	BNI Singapore Branch	0	40230201	25,61	249,65	-
		- Mer. Kal 30 MM 7 Laras dgn sistem Kendali Senjata dan Perlengkapan	BNI Tokyo Branch	0	40192601	9,78	95,31	-
		- Pengadaan Kendaraan Taktis	BNI Tokyo Branch	0	40239501	0,25	2,47	-
		- Perbaikan Engine, propeller dan pengadaan komponen kritis C-130	BNI Tokyo Branch	0	40201901	0,97	9,41	-
		- Sucad & Repair AWP Pesawat C-130	BNI Tokyo Branch	0	40203301	0,39	3,83	-
		- Sucad Avionic C-130	BNI Tokyo Branch	0	40225701	2,54	24,73	-
		- Sucad Pesawat Hawk 109/209	BNI Tokyo Branch	0	40194001	0,39	3,82	-
		- Sucad Pesawat Hawk 109/209 & MK53	BNI Tokyo Branch	0	40193301	1,04	10,17	-
		- Avionic Equipment Hawk MK.109/209	BNP Paribas London Branch	0	40086401	0,17	1,65	-
		- Komponen Sucad Hawk MK. 109/209	BNP Paribas London Branch	0	40087101	0,04	0,43	-
		- Exocet MM-40 Mistral 2 Missile	BNP Paribas, Paris	0	40104001	18,01	175,64	-
		- Supply of The Aircraft CN-295	BNP Paribas, Paris	0	40251901	85,31	831,78	-
		- Helikopter Angkut	BRI Cayman Island	0	40244001	54,95	535,76	-
		- Pesawat Pengganti OV-10F Tahap II (Super Tucano)	BRI Cayman Island	0	40236401	52,73	514,10	-
		- Artileri Howitzer 155 MM	Credit Agricole CIB	0	40255701	28,43	277,20	-
		- Kapal Bantu Hidro Oseanografi	Credit Agricole CIB	0	40253301	23,82	232,24	-
		- Pengadaan Heli Full Combat	Credit Agricole CIB	0	40254001	21,84	212,93	-
		- Pengadaan Heli Full Combat	Credit Agricole CIB	0	40256401	-	-	-
		- Pengadaan Engine Propeller, Sparepart CN-235 dan C-212	Deutsche Bank Hongkong Branch	0	40257101	3,37	32,81	-
		- Heli Serbu beserta Persenjataan dan Munisi	EDC Canada	0	0	146,72	1.430,55	-
		- Kapal Selam Diesel Elektrik	Exim Bank Korea	0	40206401	115,38	1.125,00	-
		- Panzer Kanon	Exim Bank Korea	0	31361901	6,47	63,07	-
		- Pswt Pengganti MK. 53 (T.50 Lift)	Exim Bank Korea	0	40205701	38,82	378,49	-
		- Sucad Pesawat Latih KT-1B	Exim Bank Korea	0	0	0,63	6,14	-
		- Perusak Kawal Rudal (PKR)	ING Bank	0	40235701	66,17	645,11	-
		- ILS Sewaco Korvet Kelas Sigma	ING Bank NV Belanda	0	40149501	-	-	-
		- Tank Amfibi BMP-3F	Rusia	0	21664001	96,40	939,93	-
		- Torpedo A244/S MOD 3	Societe Generale	0	40098801	10,73	104,63	-
		- Pengadaan Senjata Sukhoi	Vnesheconombank	0	40155701	5,92	57,71	-
		- Proyek Baru				411,88	4.015,85	-
		- Procurement of Medical Equipment for Army Hospital	Austria	0	0	-	-	-
		- Air Weapon Range (AWR) dan Air Weapon Scoring System (AWSS)	Pipeline	0	0	-	-	-
		- Battery Kapal Selam	Pipeline	0	0	-	-	-
		- Engine Pesawat Sukhoi	Pipeline	0	0	-	-	-
		- Exocet MM-40 Blok 3 + Mistral 2	Pipeline	0	0	-	-	-
		- Heli AKS & sucad	Pipeline	0	0	-	-	-
		- Heli Serang beserta Persenjataan & Munisi	Pipeline	0	0	10,11	98,62	-
		- Jembatan Standar (Militer)	Pipeline	0	0	-	-	-
		- Kapal Latih (Pengganti Dewaruci)	Pipeline	0	0	-	-	-
		- Kapal Multi Role Light Frigate (MRLF)	Pipeline	0	0	49,62	483,82	-
		- Kapal Perusak Kawal Rudal (kapal-2)	Pipeline	0	0	59,60	581,10	-
		- Main Battle Tank (MBT)	Pipeline	0	0	55,77	543,75	-
		- MLM KRI Kelas Korvet Tahap-1	Pipeline	0	0	17,41	169,75	-
		- Mod Navkom 4 Pesawat dan Sucad Avionic	Pipeline	0	0	-	-	-
		- Multi Launch Rocket System (MLRS) 122 MM	Pipeline	0	0	-	-	-
		- Overhaul KRI Cakra	Pipeline	0	0	-	-	-
		- Panzer Amfibi BTR 80 A (BTR-4)	Pipeline	0	0	-	-	-
		- P'daan dan perbaikan Avionic Hawk 109/209	Pipeline	0	0	2,51	24,45	-
		- Penangkis Serangan Udara (PSU)	Pipeline	0	0	58,84	573,72	-
		- Pesawat CN 235 MPA	Pipeline	0	0	14,89	145,21	-
		- Pesawat Tanpa Awak	Pipeline	0	0	13,53	131,92	-
		- Radar Warning Receiver (RWR)	Pipeline	0	0	-	-	-
		- Ran Angkut Munisi 5 Ton	Pipeline	0	0	25,37	247,35	-
		- Ranjau Laut	Pipeline	0	0	-	-	-
		- Rantis 2,5 Ton	Pipeline	0	0	42,28	412,25	-

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga (Nama Proyek)	Pemberi Pinjaman	Kode Pinjaman	Nomor Register	Jumlah		
						PLN	PLN	RMP
		- Rudal Arhanud Shorad (Starteak)	Pipeline	0	0	-	-	-
		- Rudal Arhanud/Shorad	Pipeline	0	0	47,14	459,61	-
		- Rudal C-705	Pipeline	0	0	-	-	-
		- Senjata Sniper Kopasus	Pipeline	0	0	-	-	-
		- Sewaco KCR Type 40	Pipeline	0	0	-	-	-
		- Torpedo A244 S. Mod. 3	Pipeline	0	0	-	-	-
		- Rudal Pengganti Rapier	Pipeline	0	0	14,80	144,29	-
		- Degausing Korvet Sigma Class	Pipeline	0	0	-	-	-
		- Meriam Arhanud Marinir dan Radar	Pipeline	0	0	-	-	-
		- Test Bench Rudal C-705	Pipeline	0	0	-	-	-
		- Modifikasi Test bench Exocet di Arsenal	Pipeline	0	0	-	-	-
		- Meriam 30 MM 7 Barrel dan Amunisi	Pipeline	0	0	-	-	-
		- Meriam Kal 40 MM	Pipeline	0	0	-	-	-
		- Shipborn AD 20 MM M71/08 Gun Sea	Pipeline	0	0	-	-	-
		- Muka Meriam Kapal 76 MM PFF	Pipeline	0	0	-	-	-
		- MLM KRI Kelas Korvet Tahap-1 (Lanjutan)	Pipeline	0	0	-	-	-
		- Siskomsat TNI	Pipeline	0	0	-	-	-
3	015	Kementerian Keuangan				13,43	130,95	
		- Proyek On Going				13,43	130,95	-
		- Profesional Human Resources Development (PHRDP) III (komponen Bappenas)	JICA	IP-535	21572601	1,39	13,58	-
		- GFM RAP	World Bank	4762-IND	10694001	5,07	49,47	-
		- Scholarship Program for Strengthening the Reforming Institution	World Bank	8010-IND	10818801	6,96	67,90	-
4	018	Kementerian Pertanian				34,29	334,32	35,55
		- Proyek On Going				34,29	334,32	35,55
		- Rural Empowerment and Agricultural Development (READ)	IFAD	645-ID	10749501	1,19	11,64	7,50
		- Smallholder Livelihood Development Program in Eastern Indonesia (SOLID)	IFAD	835-ID	10823301	8,75	85,36	-
		- Sustainable Management Agricultural Research and Technology (SMART-D)	World Bank	8188-ID	10850201	23,52	229,32	28,05
		- WISMP II (komponen Kem. PU)	World Bank	8027-ID	10837101	0,82	8,00	-
5	019	Kementerian Perindustrian				1,14	11,10	-
		- Proyek On Going				1,14	11,10	-
		- Sustainable Econ. Dev. Through Tech. and Vocational Educ. and Training (SED-TVET) / Komponen Kemdikbud	KfW Jerman	BLZ 500 204 00	21653301	1,14	11,10	-
6	022	Kementerian Perhubungan				311,29	3.035,07	-
		- Proyek On Going				297,55	2.901,07	-
		- Development of Belawan Phase I	IDB	IND-133	10801901	25,68	250,40	-
		- Track Maintenance Improvement Programme	Jerman	2005 66 612	21628801	25,71	250,69	-
		- Railway Double Tracking on Java Southline Project (III)	JICA	IP-548	21602601	82,53	804,64	-
		- Railway Electrification and DD Tracking Project	JICA	IP-508	21500201	124,36	1.212,50	-
		- The Urgent Rehab. Project of Tanjung Priok Port	JICA	IP-521	21530201	37,83	368,84	-
		- Regional Road Development Project (Komponen Bina Marga, KemenPU)	ADB	2817-INO	21233000	1,44	14,00	-
		- Proyek Baru				13,74	134,00	-
		- Procurement of Track Material and Turn Out Phase II	China	0	0	10,26	100,00	-
		- Railway Double Tracking and Signaling Improv't Solo Surabaya	China	0	0	0,51	5,00	-
		- E/S Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) East West Line Phase I	JICA	0	0	0,51	5,00	-
		- Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I	JICA	0	0	0,51	5,00	-
		- Bandung Urban Railway Transport Development, Electrification Padalarang - Cicalengka Line	Natixis Perancis	0	0	1,03	10,00	-
		- Bandung Urban Railway Transport Development, Electrification Padalarang - Cicalengka Line	AFD Perancis	CD 1029 01 G	0	0,92	9,00	-
7	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				202,38	1.973,17	-
		- Proyek On Going				200,16	1.951,60	-
		- Development and Quality Improvement of the Semarang State University	IDB	IND-152 IND-153	10829501 10830201	8,24	80,32	-
		- Development and Upgrading of the State University of Padang (UNP)	IDB	IND-155 IND-156	10832601 10833301	11,74	114,46	-
		- The Development of Medical Research Center and Two University Hospital	IDB	IND-137 IND-138	10816401 10817101	55,42	540,39	-
		- The Quality Improvement of Padjadjaran University (UNPAD) Bandung Project	IDB	IND-140 IND-141	10820201 10821901	17,71	172,66	-
		- Development of Bandung Institute of Technology (III)	JICA	IP-553	21618801	35,11	342,31	-
		- Development of World Class University of UI	JICA	IP-549	21603301	11,31	110,29	-
		- Hassanudin University Development Project	JICA	IP-541	21584001	21,25	207,19	-
		- Sustainable Economic Development Supported by Improving Technical and Vocational Education	KfW		21653301	4,59	44,77	-
		- Health Education Quality Improvement (HPEQ)	WORLD BANK	7737-ID	10796401	7,46	72,75	-
		- Polytechnics Education Development Project	ADB	2928-INO	10858801	27,33	266,46	-
		- Proyek Baru				2,21	21,58	-
		- The Development and Upgrading of Seven Universities in Improving the Quality and Relevance of Education in Indonesia	IDB	0	0	2,21	21,58	-
8	024	Kementerian Kesehatan				1,42	13,87	-
		- Proyek On Going				1,42	13,87	-
		- Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP)- (komponen Kem. PU)	ADB	2500-INO	10789501	0,13	1,26	-
		- Improv. Of H. Adam Malik Hospital in Medan	EDCF Korea	INA-14	21612601	0,22	2,16	-
		- Strengthening of Teaching Hospitals	EDCF Korea	INA-10	21593310	0,41	3,96	-
		- The Improvement of the Moh. Hoesin Hospital	KfW Jerman	2002 70 413	21511901	0,67	6,48	-
		- Third Water Supply and Sanitary for Low Income Comm Project (PAMSIMAS)	World Bank	4204-IND	21612601	-	-	-

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga (Nama Proyek)	Pemberi Pinjaman	Kode Pinjaman	Nomor Register	Jumlah		
						PLN	PLN	RMP
		- Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (Slice II)	JICA	0	0	6,75	65,79	-
		- Regional Infrastructure for Social and Economic Development Project – Phase II (RISE II)	JICA	0	0	51,63	503,42	-
		- Rehab. Of upper Citarum	JICA	0	0	2,26	22,00	-
		- Urgent Disaster Reduction Project for Mt. Merapi and Lower Progo River Area (Phase II)	JICA	0	0	17,95	175,00	-
		- Metropolitan Sanitation Management Investment Program	JICA & ADB	0	0	0,10	0,97	-
		- Program Emission Reduction in Cities-Solid Waste Management	KfW	0	0	0,92	9,00	-
		- Small Scale Water Treatment Plants for Emergency Relief	SPANYOL	0	0	6,16	60,04	-
		- Community Based Water Supply Program (PAMSIMAS II)	World Bank	0	0	23,83	232,32	-
		- Construction of Dams in East Nusa Tenggara : Including Raknamo Dam, Kolhua Dam, and Mbay Dam	CHINA	0	0	1,03	10,00	-
		- National Community Empowerment Program-Urban Areas	IDB	0	0	87,55	853,60	-
		- Construction of the West Java Regional Solid Waste Treatment and Final Disposal	JICA	0	0	0,10	1,00	-
		- Integrated Citarum Water Resource Management Project II (MFF, PFR2)	ADB	0	0	-	-	-
		- Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project for Western Region of Indonesia Phase I	ADB	0	0	-	-	-
		- Regional Roads Development Project (Phase II) Cof. IDB	ADB	0	0	-	-	-
		- Construction of Kendari Bridge	CHINA	0	0	-	-	-
		- Bandung Intra Urban Toll Road Project (BIUTR) Development Project Phase 1	JICA	0	0	-	-	-
		- Mamminasata Water Supply Development Project E/S	JICA	0	0	-	-	-
		- Metropolitan Arterial Road Network Improvement in Jabodetabek-Surabaya-Medan	JICA	0	0	-	-	-
11	042	Kementerian Riset dan Teknologi				12,94	126,20	-
		- Proyek Baru				12,94	126,20	-
		- Research and Innovation in Science and Technology	World Bank	8245-ID	10864001	12,94	126,20	-
12	043	Kementerian Lingkungan Hidup				0,62	6,00	-
		- Proyek On Going				0,62	6,00	-
		- ICWRMP (Komponen Kementerian PU)	ADB	2500-INO	10788801	0,62	6,00	-
		- Proyek Baru				-	-	-
		- Financing Scheme for Emission Reduction Investment	KfW Jerman	0	0	-	-	-
14	054	Badan Pusat Statistik				5,25	51,22	2,50
		- Proyek On Going				5,25	51,22	2,50
		- Statistical Capacity Building: Change and Reform for the Development of Statistics (Statcap-Cerdas)	World Bank	8038-IND	10819501	5,25	51,22	2,50
13	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS				29,81	290,68	-
		- Proyek On Going				27,21	265,35	-
		- Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP)	ADB	2264-INO (SF)	10742601	4,77	46,55	-
		- Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program	ADB	2501-INO	10789501	0,75	7,35	-
		- Decentralization Irrigation System Improvement Project II	JICA	IP-547	21601901	0,21	2,00	-
		- Participatory Irrigation Rehabilitation & Improvement Management Project	JICA	IP-546	21600201	0,21	2,00	-
		- Profesional Human Resources Development (PHRDP) III	JICA	IP-535	21572601	5,79	56,50	-
		- Regional Infrastructure for Social Economic (Consultant Support for Central Cor-Team for RISE)	JICA	IP-543	21586401	0,45	4,40	-
		- Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities	JICA	IP-551	21616401	0,25	2,47	-
		- Dam Operational Improve and Safety	World Bank	7669-IND	10785701	0,08	0,80	-
		- Scholarship Program for Strengthening the reforming institution (SPIRIT)	World Bank	8010-IND	10818801	14,40	140,41	-
		- WISMP II (Komponen)	World Bank	8027-ID	10837101	0,29	2,87	-
		- Proyek Baru				2,60	25,34	-
		- Regional Infrastructure for Social Economic (Consultant Support for Central Cor-Team for RISE) II	JICA	0	0	0,60	5,84	-
		- Profesional Human Resources Development (PHRDP) IV	JICA	0	0	2,00	19,49	-
7	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika				0,62	6,00	-
		- Proyek On Going				0,10	1,00	-
		- ICT Utilization Project for Educational Quality and Enhancement in Yogyakarta Province	JICA			0,10	1,00	-
		- Proyek Baru				0,51	5,00	-
		- Improvement on TV Transmitting Station Phase II (ITTS II)	0			0,51	5,00	-
15	060	Kepolisian Republik Indonesia				174,28	1.699,27	-
		- Proyek On Going				27,42	267,32	-
		- Regional Roads Development Project (Paralel Financing dengan IDB, Komponen Kementerian PU)	ADB	2817-INO	21233000	1,03	10,00	-
		- Alintel kewilayahan	BNI Singapura	0	0	1,54	15,00	-
		- Harsucad Pesawat	BNI Singapura	0	0	3,38	33,00	-
		- Aljihandak EOD/Mole	Deutsche Bank London	0	0	5,95	58,00	-
		- Fast Patrol Boat for the Indonesian National Police	Korea	0	0	6,69	65,18	-
		- Integrated Trunking Radio Communication for Indonesian National Police - Phase I	Korea	0	0	8,83	86,14	-
		- Proyek Baru				146,87	1.431,95	-

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga (Nama Proyek)	Pemberi Pinjaman	Kode Pinjaman	Nomor Register	Jumlah				
						PLN	PLN	RMP		
16	075	- National Criminal Information Center for Indonesian National Police Phase II	Korea	0	0	-	-	-		
		- Aljihandak EOD/Mole Programmer	Pipeline	0	0	2,96	28,86	-		
		- Allabfor Khusus Polri	Pipeline	0	0	5,07	49,47	-		
		- Allabfor Stasioner Polri	Pipeline	0	0	2,54	24,74	-		
		- Allabfor Stasioner Polri (Jy.pura & Pk.baru)	Pipeline	0	0	5,07	49,47	-		
		- Alserse Penyelidikan	Pipeline	0	0	5,50	53,59	-		
		- Alserse Penyidikan	Pipeline	0	0	9,30	90,70	-		
		- APC Multifungsi	Pipeline	0	0	2,11	20,61	-		
		- Armoured Water Canon	Pipeline	0	0	2,11	20,61	-		
		- ATMS	Pipeline	0	0	-	-	-		
		- Data Mining and Knowledge Management	Pipeline	0	0	5,07	49,47	-		
		- Harsucad Kapal	Pipeline	0	0	1,27	12,37	-		
		- Harsucad Pesawat	Pipeline	0	0	1,69	16,49	-		
		- Helikopter + Perlengkapan Pendukung	Pipeline	0	0	4,23	41,23	-		
		- Helikopter dengan Perlengkapan Pendukung	Pipeline	0	0	9,30	90,70	-		
		- Kapal Patroli Polisi	Pipeline	0	0	3,49	34,01	-		
		- Kapal Patroli Type C	Pipeline	0	0	6,34	61,84	-		
		- Pengadaan Sucad Kapal	Pipeline	0	0	1,27	12,37	-		
		- Pengembangan Teknologi Kepolisian	Pipeline	0	0	4,23	41,23	-		
		- Peralatan Brimob	Pipeline	0	0	2,11	20,61	-		
		- Peralatan DVI Dokpol	Pipeline	0	0	-	-	-		
		- Peralatan Intel	Pipeline	0	0	1,69	16,49	-		
		- Peralatan Nubika/KBR	Pipeline	0	0	6,34	61,84	-		
		- Peralatan Polair/AIS dan VTMS	Pipeline	0	0	-	-	-		
		- Peralatan Pusident	Pipeline	0	0	2,11	20,61	-		
		- Peralatan Puslabfor	Pipeline	0	0	-	-	-		
		- Peralatan Serse	Pipeline	0	0	3,38	32,98	-		
		- Pesawat Terbang/Helikopter	Pipeline	0	0	7,61	74,21	-		
		- Police Backbone	Pipeline	0	0	15,26	148,82	-		
		- Puslabfor Kewilayahan	Pipeline	0	0	7,61	74,21	-		
		- Puslabfor Mabes Polri	Pipeline	0	0	6,34	61,84	-		
		- Radio Trunking Polda Jabar	Pipeline	0	0	7,61	74,21	-		
		- Radio Trunking Polda NTT	Pipeline	0	0	-	-	-		
		- Radio Trunking Polda Sumbang	Pipeline	0	0	4,86	47,41	-		
		- Rantis	Pipeline	0	0	7,19	70,08	-		
		- Sarana Prasarana Komunikasi	Pipeline	0	0	-	-	-		
		- Teknologi Pendidikan	Pipeline	0	0	3,17	30,92	-		
				Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika				14,50	141,33	-
				- Proyek On Going				14,50	141,33	-
				- Strengthening BMKG Climate and Weather Services Capacity	Natixis Banque	B 88 0 A1	21647101	14,50	141,33	-
17	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia				0,40	3,88	-		
		- Proyek Baru				0,40	3,88	-		
		- Coremap CTI (komponen Kem. KP)	ADB		0	0,20	1,94	-		
		- Coremap CTI (komponen Kem. KP)	World Bank		0	0,20	1,94	-		
18	083	Badan Informasi Geospasial				13,04	127,17	-		
		- Proyek On Going				13,04	127,17	-		
		- Development of National Geo-spatial Data Infrastructure	JICA	IP-544	21587101	13,04	127,17	-		
19	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan				11,49	112,04	-		
		- Proyek On Going				11,49	112,04	-		
		- State Accountability Revitalization (STAR)	ADB	2927-INO	10859501	11,49	112,04	-		
20	112	BPKPBP Batam				11,08	108,01	63,61		
		- Proyek Baru				11,08	108,01	63,61		
		- The Development of Sewerage System in Batam Island	Korea Selatan	0	0	11,08	108,01	63,61		
		JUMLAH PROYEK ON GOING				2.217,16	21.617,35	38,05		
		JUMLAH PROYEK BARU				960,35	9.363,37	63,61		
		JUMLAH				3.177,51	30.980,72	101,65		

Surat Berharga Syariah Negara *Project Based Sukuk* (SBSN PBS)
(Miliar Rupiah)

No.	Kementerian/Proyek	RAPBN 2014
1	Kementerian Perhubungan	1.371,0
	a. Jalur Ganda Cirebon-Kroya Segmen I (Cirebon-Larangan)	745,0
	b. <i>Railway Electrification and Double-Double Tracking of Java Main Line Project</i>	626,0
2	Kementerian Agama	200,0
	a. Revitalisasi Asrama Haji	200,0
Jumlah		1.571,0

Rencana Alokasi Pinjaman Dalam Negeri 2014
(Miliar Rupiah)

No.	Kementerian Negara/Lembaga	RAPBN 2014
1	Kementerian Pertahanan	1.000,0
2	Kepolisian Republik Indonesia	250,0
Jumlah		1.250,0



KERANGKA EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN FISKAL, DAN *RESOURCE ENVELOPE* PAGU INDIKATIF BELANJA K/L TAHUN 2014

Paparan Menteri Keuangan
pada Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat
Jakarta, 8 April 2013



Agenda Pembahasan:



1. Pendahuluan
2. Perkembangan Terkini, Prospek Perekonomian Global dan Domestik dan Tantangan ke Depan
3. Kerangka Ekonomi Makro RKP 2014
4. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
5. Evaluasi Pelaksanaan APBNP 2012 dan *Spending Review* Belanja 20 K/L Terbesar Tahun 2012
6. *Resource Envelope* Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun 2014
7. Langkah-langkah Tindak Lanjut



1. Pendahuluan



- Kebijakan fiskal dan perencanaan anggaran Tahun 2014 untuk melaksanakan berbagai program dan sasaran pembangunan sektor pemerintah, disusun dengan mengacu kepada RKP Tahun 2014.
- Formulasi kebijakan fiskal dan perencanaan anggaran Tahun 2014 tidak dapat dilepaskan dari tantangan dan masalah yang dihadapi.
- Adanya deviasi dan/atau ketidaksesuaian antara rencana dengan perkembangan realisasi berbagai indikator makroekonomi, parameter pelbagai komponen APBN, dan langkah-langkah kebijakan fiskal pada pelaksanaan APBN 2013, akan berpengaruh baik pada kinerja *outlook* (proyeksi) APBN 2013, dan maupun terhadap perumusan kebijakan fiskal dan perencanaan anggaran Tahun 2014.

3



2

**Perkembangan Terkini dan Prospek
Perekonomian Global Dan Domestik
dan Tantangan ke Depan**

4



IMF telah melakukan revisi pertumbuhan ekonomi 2013 terkait ketidakpastian pemulihan global ...

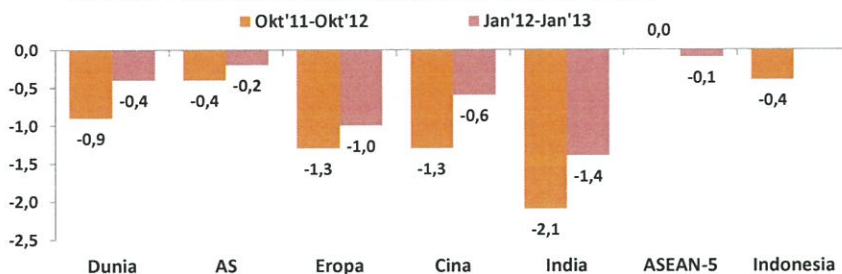


Proyeksi Indikator Perekonomian Global (%)

WEO-IMF		2009	2010	2011	2012		2013					
					Oct'12	Jan'13	Oct'11	Jan'12	Apr'12	July'12	Oct'12	Jan'13
GDP	World	-0.6	5.1	3.8	3.3	3.2	4.5	3.9	4.1	3.9	3.6	3.5
	US	-3.1	2.4	1.8	2.2	2.3	2.5	2.2	2.4	2.3	2.1	2.0
	Europe	-4.4	2.0	1.4	-0.4	-0.4	1.5	0.8	0.9	0.7	0.2	-0.2
	China	9.2	10.5	9.2	7.8	7.8	9.5	8.8	8.8	8.5	8.2	8.2
	India	5.9	10.1	6.8	4.9	4.5	8.1	7.3	7.3	6.5	6.0	5.9
	ASEAN-5	1.7	7.0	4.5	5.4	5.7	5.8	5.6	6.2	6.1	5.8	5.5
	Indonesia	4.6	6.2	6.5	6.0	n.a.	6.7	n.a.	6.1	6.6	6.3	n.a.
Trade Vol.												
	World	-10.4	12.6	5.8	3.2	2.8	6.4	5.4	5.6	5.1	4.5	3.8

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013 diperkirakan pada rentang 3.5-6.5%, dengan rata-rata konsensus 6.1%.

Deviasi Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi 2013



Deviasi perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif rendah dibandingkan kawasan/ negara lainnya

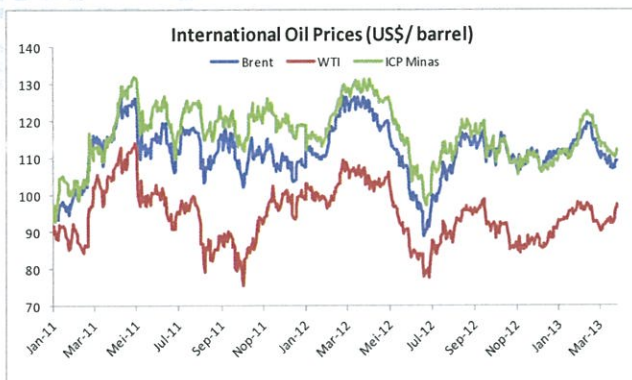
Economic Forecasters	2013
ING	6,5
Credit Suisse	5,6
Danareksa Securities	6,5
Bank Danamon	6,3
BBVA	6,4
Citigroup	6,3
OCBC Bank	6,5
Nomura	6,3
HSBC Economics	6,1
BofA-Merrill Lynch	6,0
Standard Chartered	6,5
Goldman Sachs Asia	6,4
Econ Intelligence Unit	6,3
JP Morgan Chase	3,5
Consensus (Rata2)	6,1
IMF	6,3
WorldBank	6,3
ADB	6,6
OECD	6,2
Bank Indonesia	6,3-6,7

5

5



Tekanan Harga minyak dunia diperkirakan masih akan berlanjut

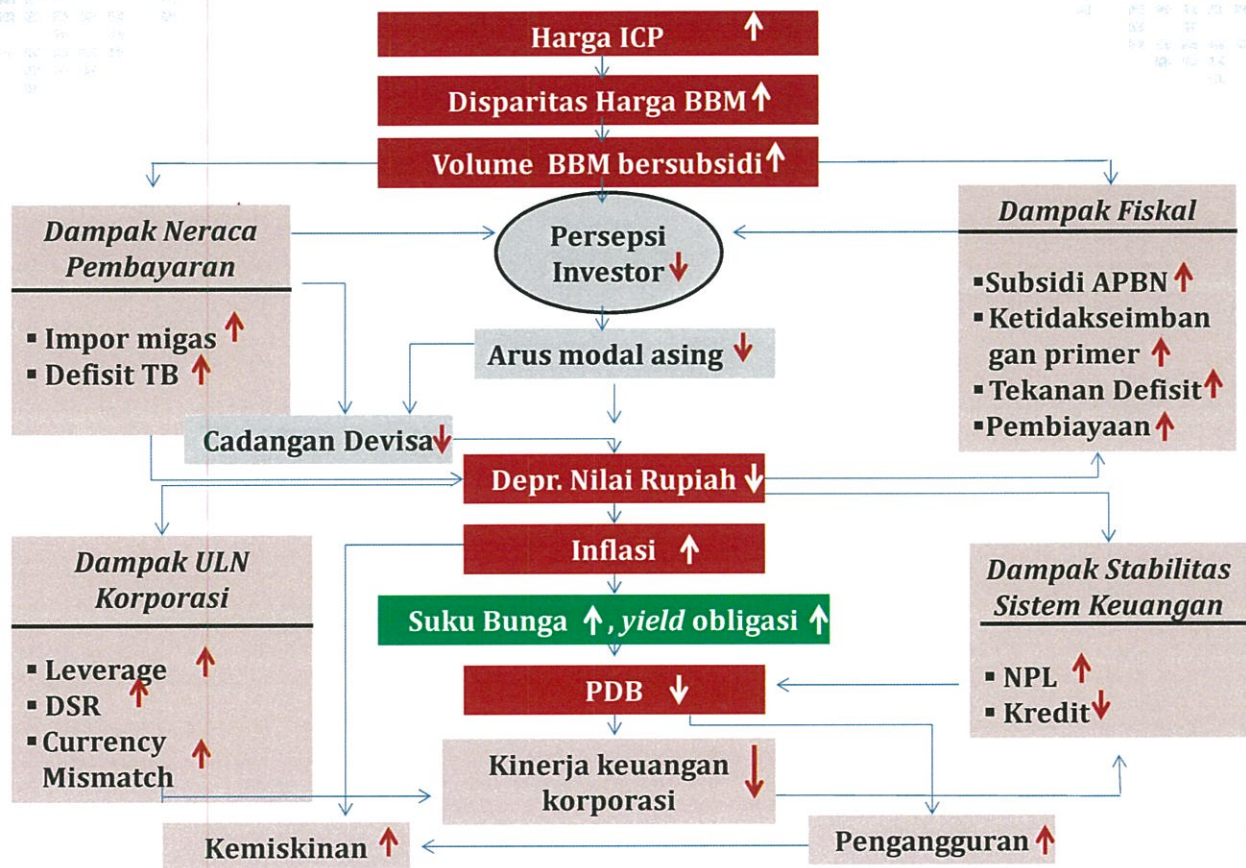


	WTI	Brent	Minas	ICP
Jan-12	98,5	110,8	115,7	115,9
Feb-12	107,1	123,9	128,4	122,2
Mar-12	103	123,8	128,1	128,1
Apr-12	104,9	119,7	125,9	124,6
May-12	86,5	102,1	111,6	113,8
Jun-12	84,9	97	100,6	99,1
Jul-12	88,1	105,9	113,7	102,9
Agust-12	94,2	113	116,2	111,7
Sep-12	94,6	113,4	115,9	111
Okt-12	85,6	110,3	109,1	109,9
Nov-12	88,9	112	110,8	106,7
Dec-12	91,8	111,9	109,2	106,9
Jan-13	97,5	116,5	114,7	111,1
Feb-13	92	111,7	115,9	114,9
Mar-13	92,96	109,54	112,2	107,42

- Rata-rata ICP sepanjang tahun 2012 sebesar US\$112,7 per barrel.
- Rata-rata ICP sampai dengan Maret 2013 ICP mencapai US\$111,1 per barrel.
- Faktor yang meningkatkan harga :
 - ✓ Meningkatnya konsumsi minyak akibat musim dingin yang ekstrim di AS dan Eropa.
 - ✓ Respon positif atas membaiknya kondisi perekonomian global.

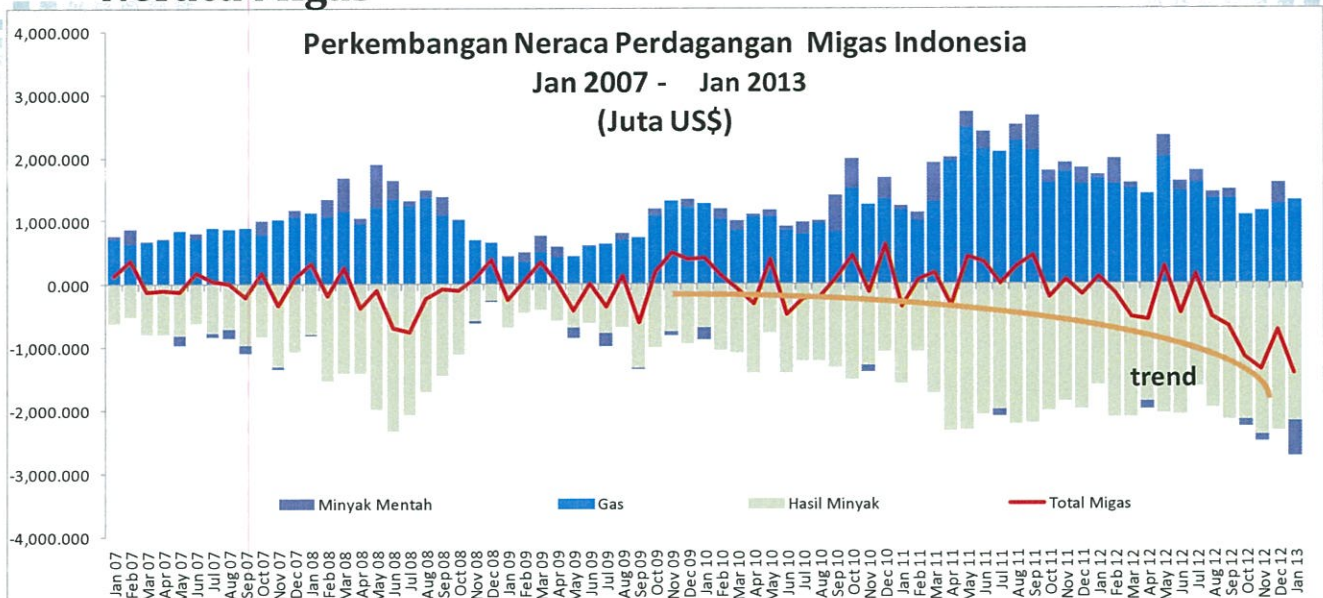
6

Defisit Ganda dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Perekonomian



7

Neraca Perdagangan mengalami Defisit akibat Tekanan Neraca Migas



- Indonesia terbebani dengan melonjaknya kebutuhan impor minyak mentah (dan produk BBM) serta menurunnya produksi minyak → mulainya Era defisit neraca perdagangan minyak dan gas bumi di tahun 2012.
- Pada 2011, neraca perdagangan minyak dan gas bumi hanya mencatatkan surplus senilai US\$ 7 juta, merosot jauh dibanding 2010 senilai US\$ 3 miliar. Di tahun 2012, neraca perdagangan minyak dan gas bumi mencatat defisit US\$5.6 miliar

8



Asumsi Makro dan Outlook : 2012 – 2013



Indikator	APBN-P	Realisasi	APBN	Outlook 2013 *)	
	2012	2012	2013	range	point
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,5	6,2	6,8	6.2 - 6,6	6,5
Nilai Tukar (Rp/US\$)	9000	9384	9300	9300 - 9700	9700
Inflasi (%)	6,8	4,3	4,9	4.9 - 5,3	5,0
Suku Bunga SBI/SPN 3 Bulan (%)	5,0	3,2	5,0	3.2 - 5,0	5,0
Harga Minyak ICP (US\$/barel)	105	112,7	100	100 - 110	110
Lifting Minyak (rb barel/hari)	930	860	900	840 - 900	840
Lifting Gas (rb barel/hari setara minyak)	-	-	1360	1240 - 1360	1240

*) *Assesment Outlook* asumsi 2013 per Maret 2013 (Kesepakatan Kemen ESDM, Bappenas, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan)

9



Dampak Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Terhadap Postur APBN 2013



Perkembangan beberapa indikator ekonomi makro tahun 2013 diperkirakan menjauh dari asumsi semula dalam APBN. Hal ini akan berdampak pada perubahan proyeksi pendapatan dan belanja negara pada postur *outlook* APBN 2013:

- Defisit APBN 2013 lebih tinggi dari target awal, dan terjadi kekurangan pembiayaan yang cukup besar, karena:
 - Penerimaan perpajakan diperkirakan lebih rendah dari target APBN, berkaitan dengan dampak resesi global yang mulai di rasakan di sektor industri, dan perubahan asumsi ekonomi makro;
 - Penerimaan PNB, terutama SDA Migas, lebih rendah dari target APBN karena lebih rendahnya *lifting* minyak dan gas;
 - Beban subsidi BBM membengkak berkenaan dengan lebih tingginya perkiraan volume konsumsi BBM bersubsidi (melampaui kuota APBN), dan lebih tingginya harga minyak mentah Indonesia (ICP);
- Perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan pelaksanaan APBN 2013 baik dalam bentuk optimalisasi pendapatan dan pembiayaan, maupun efisiensi dari sisi belanja.

10

50



3

Kerangka Ekonomi Makro RKP 2014



Pencapaian dan Sasaran RPJM 2010 – 2014



	2010	2011	2012		2013	2014
	Realisasi	Realisasi	Sasaran	Realisasi	Sasaran	RPJMN
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,2	6,5	6,5	6,2	6,8	7,0 - 7,7
Angka Kemiskinan (%)	13,33	12,6	10,5 - 11,5	11,45 (sept '12)	9,5 - 10,5	8,0 - 10,0
Tingkat Pengangguran (%)	7,14	6,56	6,0 - 6,4	6,14 (Ags '12)	5,8 - 6,1	5,0 - 6,0

Tabel Asumsi Makro Realisasi, APBN, dan RPJM (2010 – 2014)

	2010	2011	2012	2013	2014
	LKPP	LKPP	Realisasi	APBN	RPJM
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,2	6,5	6.3 *	6,8	7,0 - 7,6
Nilai Tukar (Rp/US\$)	9.087	8.779	9384	9.300	8.700 - 9.300
Inflasi (%)	6,96	3,79	4.3	4,9	3,5 - 5,5
Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	6,6	4,8	3.2	5,0	4,5 - 5,5
Harga Minyak ICP (US\$/bareil)	79.4	111.5	112.7	100	100 - 120
Lifting Minyak (rb bareil/hari)	954	899	861	900	970 - 1.000
Lifting Gas (rb bareil setara minyak/hari)	N/A	N/A	N/A	1360	

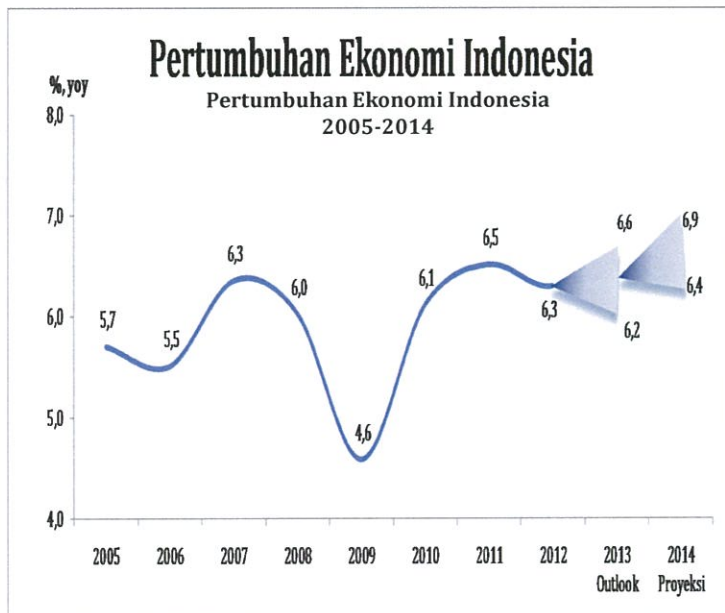
*) perkiraan



Pertumbuhan Ekonomi 2014 diperkirakan dapat mencapai kisaran 6,4% sd 6,9%



Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi 2014 dalam RPJMN (7,0%-7,6%) mendapat tantangan. Krisis ekonomi global yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi 2012 dan 2013 tidak mencapai target dalam RPJMN, sehingga baseline di revisi ke bawah.



Tahun 2014:

- Pertumbuhan konsumsi RT dan Pemerintah masih mendapat dorongan dari faktor Demografi, Pelaksanaan Pemilu
- Perbaikan iklim usaha dan investasi, pembangunan infrastruktur, stabilitas ekonomi diharapkan menjadi pendorong laju pertumbuhan investasi
- Kinerja ekspor perlu ditingkatkan terutama melalui perbaikan daya saing produk manufaktur dan yang bernilai tambah lebih tinggi (termasuk produk jasa kreatif)

13



Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2014



Indikator Ekonomi	2013		2014	
	APBN	Outlook	Range	Titik
a. Pertumbuhan ekonomi (%) y-o-y	6,8	6,5	6,4 - 6,9	6,8
b. Inflasi (% yoy)	4,9	5,0	3,5 - 5,5	4,5
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	5,0	5,0	4,5 - 5,5	5,0
d. Nilai tukar (Rp/US\$)	9.300	9.700	9.600 - 9.800	9.700
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	100,0	110	100 - 120	110
f. Lifting Minyak (ribu barel per hari)	900	840	900 - 930	915
g. Lifting Gas (ribu barel per hari setara minyak)	1.360	1.240	1.240 - 1.325	1.240

14



4

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal



Tema Kebijakan Fiskal 2014



TEMA RKP 2014:

MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG LEBIH BERKEADILAN



TEMA KEBIJAKAN FISKAL 2014:

MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN MELALUI PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL YANG SEHAT DAN EFEKTIF



STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL 2014:

MENYEDIAKAN STIMULASI FISKAL SECARA TERUKUR DENGAN TETAP MENJAGA KESINAMBUNGAN FISKAL



Menyediakan Stimulasi Fiskal Secara Terukur :



A. Stimulus Fiskal Sisi Belanja:

- Meningkatkan Alokasi Belanja Modal Secara Signifikan, khususnya untuk Infrastruktur;
- Meningkatkan kualitas belanja untuk memperlebar ruang fiskal melalui pengendalian subsidi, khususnya subsidi energi, dan memperbesar alokasi anggaran Non-Subsidi;

B. Stimulus Fiskal Sisi Penerimaan:

- Mengimplementasikan kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), mulai Januari 2013;
- Memberikan Insentif Fiskal dalam bentuk:
 - Pajak ditanggung Pemerintah (DTP);
 - Pembebasan Bea Masuk;
- Mendukung Pengembangan BUMN melalui Penjaminan Utang BUMN (antara lain PT PLN dan PDAM);
- *Reprofiling* Utang untuk menambah Ruang Fiskal (*fiscal space*) bagi belanja produktif;

NO	URAIAN	2010		2011		2012		2013
		APBNP	LKPP	APBNP	LKPP	APBNP	Real 31 Des	APBN
1	Belanja Modal	95,0	80,3	141,0	117,9	176,1	140,2	184,4
2	Kewajiban Penjaminan	1,1	-	0,9	-	0,6	-	0,7
3	Subsidi Pajak (DTP)	18,4	14,8	4,0	3,4	4,3	3,7	4,8
4	Reprofiling SBN*		3,9		0,7		11,9	-

17



Menjaga Kestinambungan Fiskal:



18



PROYEKSI RAPBN 2014 (Triliun Rupiah)



Uraian	2013	2014
	APBN	Proyeksi RAPBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1.529,7	1.749,9
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.525,2	1.748,0
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.193,0	1.364,3
<i>Tax Ratio</i>	<i>12,87</i>	<i>13,26</i>
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	332,2	383,7
II. PENERIMAAN HIBAH	4,5	1,8
B. BELANJA NEGARA	1.683,0	1.904,1
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.154,4	1.300,2
1. Belanja K/L	594,6	561,2
2. Belanja Non KL	559,8	739,0
II. TRANSFER KE DAERAH	528,6	603,9
1. Dana Perimbangan	444,8	500,9
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	83,8	103,0
Total Anggaran Pendidikan	336,6	380,8
Rasio Anggaran Pendidikan Total (%)	20,0	20,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(40,1)	(30,0)
D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(153,3)	(154,2)
% Defisit terhadap PDB	(1,65)	(1,50)
E. PEMBIAYAAN (I + II)	153,3	154,2
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	172,8	176,9
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	(19,5)	(22,7)
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN	(0,0)	0,0
Total Outstanding Utang Pemerintah	2.143,5	2.321,6
% terhadap PDB	23,1	22,6
Volume konsumsi BBM bersubsidi (juta KL)	46,0	53,0

19



4.1

Kebijakan Pendapatan Negara, RAPBN 2014



Pokok-Pokok Kebijakan Perpajakan 2014



1. **Penyempurnaan Peraturan Perpajakan untuk lebih memberi kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan wajar**, khususnya untuk bidang usaha pertambangan, panas bumi, bidang usaha berbasis syariah, dan jasa keuangan.
2. **Penyempurnaan Kebijakan Insentif Perpajakan untuk Mendukung Iklim Usaha dan Investasi**, antara lain:
 - Evaluasi bidang usaha tertentu dan daerah tertentu yang menjadi prioritas pembangunan skala nasional yang mendapatkan fasilitas PPh dalam rangka penanaman modal berupa *investment allowance*;
 - Penyusunan kebijakan insentif fiskal untuk mendukung:
 - pengembangan industri *intermediate* dan substitusi impor;
 - kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
 - hilirisasi pertambangan melalui kebijakan disinsentif fiskal bea keluar untuk ekspor barang tambang mentah, dan insentif fiskal untuk penanaman modal bagi industri hilir pertambangan.
3. **Penyempurnaan Sistem Administrasi dan Pengawasan Perpajakan untuk Lebih Menyederhanakan dan Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak**, antara lain:
 - Penyempurnaan dan perluasan pengguna *E-SPT* dan *E-Filling* untuk pajak dan sistem elektronik persediaan (*E-Inventory*) untuk kepabeanan;
 - Pemeriksaan pajak secara random dengan tetap berdasarkan *risk based audit*;
 - Meneruskan modernisasi Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai;
 - *Joint audit* antara pemeriksaan pajak dan pemeriksaan kepabeanan dan cukai.
4. **Perluasan Basis Pajak**, antara lain:
 - Ekstensifikasi kepada usaha kecil dan menengah dengan fokus pada peningkatan kepatuhan sukarela melalui penyederhanaan administrasi perpajakan;
 - Optimalisasi pemanfaatan data hasil Sensus Pajak Nasional;
 - Optimalisasi pemanfaatan kewajiban penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari institusi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain untuk intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan; dan
 - Ekstensifikasi Barang Kena Cukai.

21



Pokok – Pokok Kebijakan PNBP 2014



1. **Peningkatan PNBP Migas melalui:**
 - Optimalisasi produksi pada lapangan yang saat ini ada;
 - Percepatan pengembangan lapangan baru;
 - *Term and Condition* yang lebih menarik untuk wilayah kerja yang berada di *remote area* dan/atau laut dalam;
 - Efisiensi *cost recovery* dan penurunan rasio *cost recovery* terhadap *gross revenue*; serta
 - Penagihan atas penjualan hasil migas bagian pemerintah secara intensif.
2. **Optimalisasi PNBP SDA Nonmigas**, khususnya pertambangan umum melalui:
 - Negosiasi ulang (renegosiasi) kontrak kerjasama;
 - Reviu tarif royalti batubara pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam PP No. 9 Tahun 2012 (menjadi 13,5 persen);
 - Penyempurnaan peraturan tentang tata cara pemungutan, penagihan, pembayaran dan penyetoran PNBP sektor pertambangan mineral dan batubara.
3. **Optimalisasi Penerimaan Laba BUMN** melalui:
 - Penyehatan dan peningkatan kinerja BUMN; dan
 - Efisiensi biaya operasional BUMN.
 - Kementerian BUMN akan berkonsultasi/berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam Pelaksanaan RUPS bagi BUMN-BUMN yang menerima subsidi/PSO.
4. **Optimalisasi PNBP Lainnya**, melalui:
 - Inventarisasi potensi PNBP di K/L;
 - Pembangunan sistem aplikasi Billing PNBP *Online*;
 - Percepatan penyusunan peraturan terkait jenis dan tarif PNBP;
 - Peningkatan pengawasan pengelolaan PNBP melalui peningkatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
5. **Optimalisasi Pendapatan BLU** melalui intensifikasi dan ekstensifikasi layanan dalam rangka peningkatan pendapatan

22



4.2

Kebijakan Belanja Negara, RAPBN 2014



Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal di Bidang Belanja Pemerintah Pusat (1)

1. Mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien antara lain melalui:
 - a. Meneruskan pemberian gaji dan pensiun ke-13, penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri sebesar rata-rata 6 persen dan pensiun pokok rata-rata 4 persen, serta memberikan THR;
 - b. Menuntaskan program Reformasi Birokrasi pada K/L
 - c. Menerapkan *flat policy* pada belanja barang operasional perkantoran dan pengendalian biaya perjalanan dinas;
2. Mendukung pelaksanaan program-program pembangunan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, antara lain melalui:
 - a. Mengarahkan peningkatan anggaran infrastruktur dalam rangka mendukung MP3EI untuk pembangunan infrastruktur pada 6 (enam) koridor ekonomi, *domestic connectivity*, serta ketahanan energi dan ketahanan pangan;
 - b. Memperkuat program perlindungan sosial dan sinergi 4 klaster penanggulangan kemiskinan dalam rangka mendukung MP3KI;
 - c. Mengutamakan peningkatan alokasi belanja produktif (belanja modal);
 - d. Mendukung pelaksanaan Direktif Presiden, seperti Surplus beras 10 juta ton dan Program rumah sangat murah



Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal di Bidang Belanja Pemerintah Pusat (2)



3. Mendukung peningkatan Pertahanan dan Keamanan, melalui Peningkatan rasio polisi dengan rakyat, penambahan perangkat TNI/Polri dan mendorong pencapaian *minimum essential forces* (MEF) sesuai dengan kemampuan keuangan negara;
4. Melanjutkan kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran;
5. Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (*climate change*) melalui dukungan anggaran untuk konservasi lingkungan (*pro environment*), pengembangan energi terbarukan, dan memitigasi potensi bencana banjir;
6. Melaksanakan pendidikan yang berkualitas, mudah, dan murah;
7. Melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional;
8. Mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global melalui dukungan cadangan risiko fiskal;
9. Mendukung tahapan pelaksanaan Pemilu 2014 untuk menciptakan Pemilu yang sehat, terencana dan demokratis serta menjaga stabilitas nasional;

25



Pokok-Pokok Penguatan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Kerangka Desentralisasi Fiskal Tahun 2014 (1)



1. Memperkuat Kapasitas Keuangan Daerah serta mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal antardaerah;
2. Meningkatkan kualitas Belanja Daerah dalam pengelolaan APBD, antara lain melalui moratorium penerimaan PNS baru bagi daerah yang alokasi belanja pegawainya melebihi 50 persen dari APBD-nya;
3. Meningkatkan keberpihakan Kepada Daerah Tertinggal melalui DAK;
4. Mempercepat pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2):
 - Daerah yang sudah menerima pengalihan PBB-P2 agar menjaga kapasitas pengelolaannya sehingga kinerja penerimaan PBB tidak turun.
5. Mempercepat penyelesaian petunjuk teknis penggunaan DAK oleh masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (K/L) terkait, agar pelaksanaan kegiatan DAK dapat dilakukan dalam waktu yang cukup dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran;
6. Mempercepat penetapan daerah penghasil SDA sebagai dasar penetapan alokasi DBH SDA, agar penetapan alokasi tersebut dapat digunakan oleh daerah dalam penyusunan APBD.

26



Pokok-Pokok Penguatan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Kerangka Desentralisasi Fiskal Tahun 2014 (2)



7. Mempercepat pengalihan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan atas program/kegiatan yang menjadi urusan daerah menjadi DAK, melalui:
 - Identifikasi atas program/kegiatan yang menjadi urusan daerah namun masih didanai oleh DIPA K/L melalui dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - Penyampaian informasi pendanaan program/kegiatan yang telah menjadi urusan daerah oleh K/L kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas;
 - Pengalihan Dana Dekon dan TP menjadi DAK pada TA 2014;
8. Mendorong Pemerintah Daerah Provinsi untuk ikut berperan dalam pengendalian subsidi BBM, dengan memberlakukan tarif PBB-KB maksimum 5%.

Pada tingkat tarif dimaksud daerah masih tetap dapat meningkatkan PAD, sementara daya beli masyarakat tidak menurun dan stabilitas harga tetap terjaga, sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial di daerah;
9. Mempercepat Penetapan APBD, agar APBD dapat dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran penuh sehingga dapat menghasilkan *output/outcome* yang maksimal;
10. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administratif APBD dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik;
11. Memperbaiki penganggaran dan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi Guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), agar dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di daerah.

27



4.3

Kebijakan Pembiayaan Anggaran, RAPBN 2014



Kebijakan Pengelolaan Defisit dan Pembiayaan Anggaran (1)



- ❑ Mengupayakan tercapainya kondisi fiskal yang sehat, dengan menjaga kondisi *Primary Balance* dan mengendalikan Defisit Anggaran;
- ❑ Mengupayakan tercapainya penurunan rasio utang terhadap PDB menjadi sebesar 22 – 23 persen;
- ❑ Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap;
- ❑ Melakukan pengembangan instrumen dan perluasan basis investor utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih sumber utang yang lebih sesuai kebutuhan dengan biaya yang minimal dan risiko terkendali;
- ❑ Melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka *Asset Liability Management* (ALM) Negara;
- ❑ Meningkatkan transparansi pengelolaan utang melalui penerbitan informasi publik secara berkala;
- ❑ Meningkatkan kualitas perencanaan investasi pemerintah dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi BUMN, mendukung pembangunan infrastruktur, serta mendukung pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM), antara lain melalui PMN untuk penjaminan program KUR dan dana bergulir;

29



5

Evaluasi Pelaksanaan APBNP 2012 dan *Spending Review* Belanja 20 K/L Terbesar APBN 2012



RINGKASAN POSTUR APBN-P 2011-2012

(triliun rupiah)



URAIAN	2011			2012		
	APBNP	LKPP (Audited)	% thd APBNP	APBNP	LKPP Unaudited	% thd APBNP
A. PENDAPATAN NEGARA	1.169,9	1.210,6	103,5	1.358,2	1.338,3	98,5
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	1.165,3	1.205,3	103,4	1.357,4	1.332,6	98,2
1. Penerimaan Perpajakan	878,7	873,9	99,5	1.016,2	980,2	96,5
<i>Tax Ratio (% thd PDB)</i>	<i>12,16</i>	<i>11,77</i>	-	<i>11,90</i>	<i>11,90</i>	-
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	286,6	331,5	115,7	341,1	352,4	103,3
II. PENERIMAAN HIBAH	4,7	5,3	112,7	0,8	5,7	696,9
B. BELANJA NEGARA	1.320,8	1.295,0	98,1	1.548,3	1.489,7	96,2
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	908,2	883,7	97,3	1.069,5	1.009,2	94,4
A. Belanja K/L	461,5	417,6	90,5	547,9	488,1	89,1
B. Belanja Non-K/L	446,7	466,1	104,3	521,6	521,1	99,9
II. TRANSFER KE DAERAH	412,5	411,3	99,7	478,8	480,6	100,4
1. Dana Perimbangan	347,5	347,2	99,9	408,4	411,3	100,7
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	65,0	64,1	98,6	70,4	69,4	98,5
III. SUSPEND	0,0	(0,0)	-	0,0	(0,1)	-
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(44,3)	8,9	(20,0)	(72,3)	(50,9)	70,4
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(150,8)	(84,4)	56,0	(190,1)	(151,4)	79,6
<i>% Defisit Terhadap PDB</i>	<i>(2,09)</i>	<i>(1,14)</i>	-	<i>(2,23)</i>	<i>(1,84)</i>	-
E. PEMBIAYAAN (I + II)	150,8	130,9	86,8	190,1	173,3	91,2
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	153,6	148,7	96,8	194,5	198,4	102,0
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	(2,8)	(17,8)	641,0	(4,4)	(25,1)	566,8
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN	(0,0)	46,5	-	0,0	21,9	-

- Realisasi pendapatan negara sedikit lebih rendah dari target APBNP (98,5%). Realisasi belanja negara juga sedikit lebih rendah dari pagu APBNP (96,2%). Konsekuensinya, realisasi Defisit Anggaran 2012 mencapai Rp151,4 T (1,84% PDB), lebih rendah dari target APBNP Rp190,1 T (2,23% dari PDB).
- Realisasi keseimbangan primer negatif (pertama kali): sinyal perlunya meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga *fiscal sustainability*.
- Realisasi Pembiayaan Anggaran lebih besar dari Realisasi Defisit → terdapat SilPA sekitar Rp21,9 T.

31



Perkembangan Belanja K/L, 2010-2013:

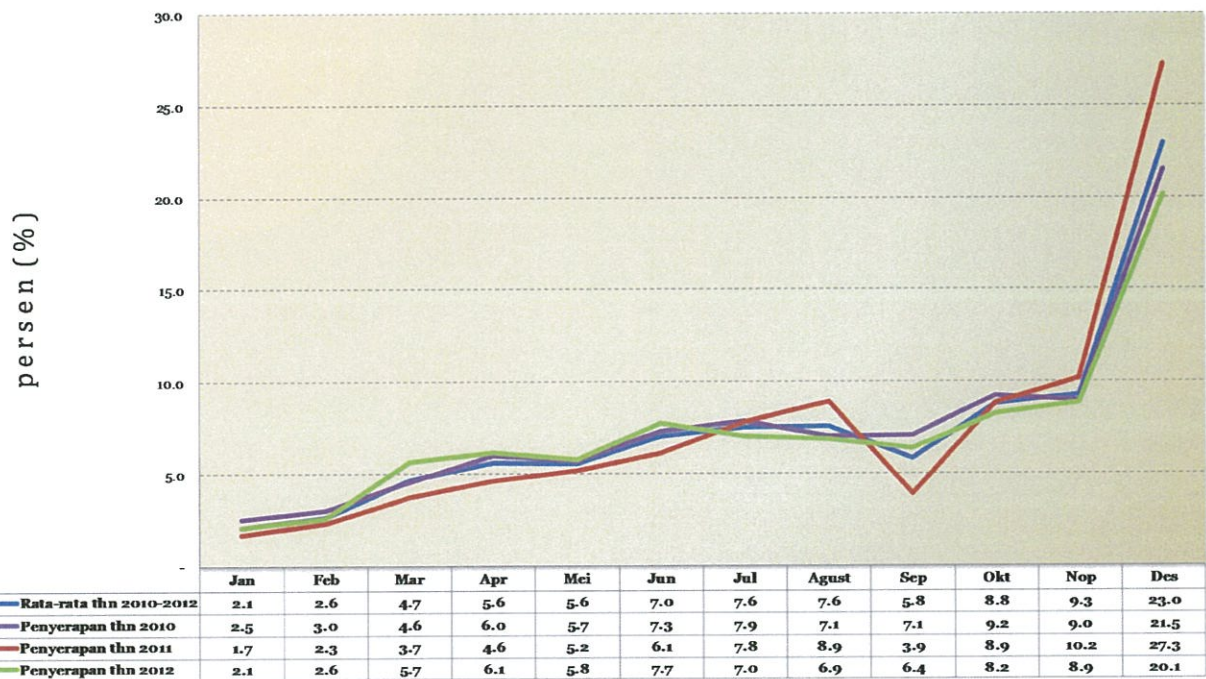
(Triliun Rupiah)



**) Realisasi s.d 31 Desember 2012 (LKPP Unaudited)



Rata-rata Penyerapan Belanja K/L 2010-2012



- Pola penyerapan anggaran masih perlu diperbaiki, sebagian besar (>37% di TA 2012), anggaran belanja K/L terserap di triwulan IV tahun anggaran berjalan (menumpuk di akhir tahun anggaran)

33



REALISASI BELANJA K/L TA 2012



- Realisasi (sementara) penyerapan belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dalam tahun 2012 mencapai **89,1%** thd pagu APBN-P, sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 (**90,5%** dari pagu APBNP).
- Walaupun penyerapan anggaran belanja K/L pada tahun 2012 secara umum lebih rendah dari tahun 2011, namun terdapat beberapa K/L yang tingkat penyerapan anggarannya meningkat tinggi lebih dari 10% dibandingkan dengan tingkat penyerapan anggaran tahun 2011 dan capaian penyerapannya di atas 90% pada tahun 2012.
- Kementerian Negara/Lembaga tersebut antara lain:
 - Badan SAR Nasional
 - Mahkamah Agung
 - Kementerian Dalam Negeri
 - Kementerian Perindustrian
 - Mahkamah Konstitusi RI
 - Badan Narkotika Nasional
 - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia



SPENDING REVIEW BELANJA 20 KL TERBESAR APBN 2012



- Kementerian Keuangan telah melakukan *Spending Review* terhadap 20 Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki pagu dana terbesar. Proporsi pagu dana 20 Kementerian Negara/Lembaga tersebut terhadap pagu total adalah sebesar 76,26 %.
- *Spending Review* bertujuan untuk mengetahui potensi ruang fiskal pada tahun anggaran berikutnya sehingga potensi tersebut dapat dipergunakan untuk menambah alokasi dana prioritas nasional seperti infrastruktur.
- *Spending Review* dilakukan terhadap alokasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP BPK)
- Dari reviu dan analisis terhadap alokasi anggaran dalam RKA-KL, terdapat alokasi anggaran sekitar **Rp71,2 triliun**, yang ditengarai bersifat inefisien, duplikasi dan einmalig.

35



Hasil *Spending Review* (Rupiah)



No	Jenis Review	Hasil Review	Potensi Ruang Fiskal
1	Reviu Alokasi	61.089.764.343.976	61.089.764.343.976
	a. In-Efisiensi dan Duplikasi	39.035.285.538.976	
	b. Einmalig	18.577.223.722.000	
	c. Dana Cadangan dan Sisa Dana Hasil Penelaahan	3.477.255.083.000	
2	Reviu Pelaksanaan Anggaran	9.749.792.220.463	9.749.792.220.462
	a. Tolok Ukur Target	1.645.019.640.813	
	b. Tolok Ukur Kinerja Terbaik	8.104.772.579.650	
3	Reviu Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	432.851.839.414	432.851.839.414
	a. Inefisiensi Alokasi	282.157.134.966	
	b. Inefisiensi Pelaksanaan	31.995.437.972	
Jumlah			71.272.408.403.852



Spending Review : Alokasi Anggaran TA 2012 Pada 20 K/L



No	Kementerian Negara/Lembaga	Inefisiensi (Rp)	Duplikasi (Rp)	Einmalig (Rp)	Cadangan (Rp)
1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	7.490.149.833.000	38.611.963.000	1.981.645.103.000	534.588.685.000
2	Kementerian Pekerjaan Umum	6.219.948.310.025	1.748.770.000	536.953.001.000	297.694.185.000
3	Kepolisian RI	1.727.038.749.215	-	4.048.727.277.000	1.350.196.897.000
4	Kementerian Agama	5.595.632.495.892	2.796.351.000	1.157.604.818.000	22.870.971.000
5	Kementerian Perhubungan	1.737.295.413.179	2.500.000.000	3.174.119.662.000	8.794.804.000
6	Kementerian Kesehatan	2.246.130.560.631	-	233.488.182.000	52.795.561.000
7	Kementerian Pertanian	991.801.626.715	4.335.607.000	739.078.628.000	80.134.583.000
8	Kementerian Dalam Negeri	208.828.598.553	-	564.353.413.000	165.003.000
9	Kementerian Keuangan	1.313.197.131.671	3.492.882.000	343.954.149.000	54.370.383.000
10	Kementerian ESDM	1.581.017.055.480	2.688.870.000	74.498.536.000	506.172.572.000
11	Kementerian Hukum dan HAM	2.748.535.957.785	-	1.041.171.836.000	54.617.592.000
12	Kementerian Kelautan dan Perikanan	643.274.957.656	6.239.580.000	745.568.336.000	200.992.000
13	Kementerian Perumahan Rakyat	1.295.849.460.659	5.298.222.000	1.302.672.864.000	216.923.513.000
14	Kementerian Kehutanan	1.003.525.634.000	5.611.464.000	239.236.683.000	289.466.217.000
15	Kementerian Luar Negeri	1.024.934.755.058	4.381.515.000	601.403.000	3.000.000.000
16	Mahkamah Agung	1.558.066.523.537	4.881.350.000	136.501.115.000	2.299.491.000
17	Kementerian Sosial	231.230.309.000	3.006.206.000	42.023.644.000	
18	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	431.854.335.292	2.911.860.000	1.858.776.440.000	2.947.266.000
19	Badan Pertanahan Nasional	689.915.142.627	-	249.533.136.000	16.368.000
20	Kejaksaan Agung	208.554.049.000	-	106.715.496.000	
Total		38.946.780.898.976	88.504.640.000	18.577.223.722.000	3.477.255.083.000

31



6

**Resource Envelope Pagu Indikatif
Belanja K/L Tahun 2014**



Resource Envelope Belanja K/L (Rp Miliar)



No	Uraian	2013		2014
		Resource Envelope	RABPP	Resource Envelope
1	Bel. Pegawai	130.786,5	139.899,0	145.047,0
2	Bel Barang	178.932,9	200.740,2	146.093,4
	- Operasional	33.871,6	37.001,0	42.445,2 ^{a)}
	- Non Operasional	145.061,3	163.739,2	103.648,3 ^{b)}
3	Bel. Modal	180.241,7	184.363,7	178.756,3 ^{c)}
4	Bantuan Sosial	51.461,6	69.594,8	44.904,4 ^{d)}
JUMLAH		541.422,7	594.597,6	514.801,1
Inisiatif Baru		-	-	46.412,8 ^{e)}
TOTAL		541.422,7	594.597,6	561.213,9

a) Belanja Barang Operasional Rupiah Murni, Pagu Penggunaan PNPB dan BLU

b) Tidak termasuk belanja yang dipindahtangankan ke pihak ke-3 sebesar Rp12,3 triliun.

c) Termasuk realokasi belanja barang dan bantuan sosial yang dipindahkan tangankan ke pihak ke-3

d) Tidak termasuk *baseline* anggaran Jamkesmas sebesar Rp6,5 triliun yang ditampung dalam anggaran PBI pada BA BUN, dan belanja yang dipindahtangankan ke pihak ke-3 sebesar Rp12,0 triliun.

e) Dicapangkan untuk belanja modal dan program penanggulangan kemiskinan (termasuk anggaran pendidikan). ³⁹



Alokasi Belanja K/L Tahun 2014 (1)



Resource Envelope belanja K/L Tahun 2014 direncanakan Rp561,2 triliun, terdiri dari:

- Alokasi belanja K/L *baseline*: Rp514,8 triliun; dan
- Potensi ruang gerak fiskal untuk Inisiatif Baru: Rp46,4 triliun.

Alokasi Belanja K/L *baseline* menampung kebutuhan untuk:

a) Biaya Operasional:

- Belanja pegawai yang meliputi pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji (termasuk gaji ke-13), honor tetap, tunjangan lain terkait dengan belanja pegawai (termasuk tunjangan kinerja bagi K/L yang sampai dengan tahun 2012 telah melaksanakan reformasi birokrasi), dan lembur.
- Belanja barang operasional, yaitu antara lain untuk keperluan sehari-hari perkantoran, pengadaan bahan makanan, honor operasional satuan kerja, langganan daya dan jasa, serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.



Alokasi Belanja K/L Tahun 2014 (2)



b) Biaya Non-Operasional:

- i. Kegiatan/*output* terkait pelaksanaan tugas fungsi unit, termasuk pemenuhan kebutuhan belanja operasional dan pemeliharaan untuk aset baru dan satuan kerja baru;
- ii. Kegiatan/*output* terkait pelayanan kepada publik.
- iii. Kegiatan/*output* terkait pelaksanaan kebijakan prioritas pembangunan nasional, seperti:
 - Penyelesaian rehabilitasi SD/MI dan SMP/MTs yang rusak;
 - Penguatan Program Perlindungan Sosial dalam rangka mendukung MP3KI;
 - Mendukung program penguatan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - Mendukung program rumah sangat murah.
- iv. Kegiatan/*output* terkait penugasan sesuai kebijakan Pemerintah.
- v. Kegiatan/*output* yang dilaksanakan secara *multiyears*.

41



New Initiatives Resource Envelope RAPBN 2014



☐ Ruang fiskal diprioritaskan untuk:

- 1) Memenuhi target RPJMN 2010-2014 yang belum tercapai (*filling the gap*),
- 2) Direktif Presiden, Amanat ketentuan peraturan perundang-undangan (Inpres/Keppres), serta kegiatan prioritas nasional/bidang/ K/L:
 - a) Pembangunan infrastruktur untuk mendukung *domestic connectivity* dan MP3EI, terutama untuk pembangunan jalan baru, termasuk rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jalan/jembatan, pelebaran dan peningkatan jalan, dan jalan strategis di beberapa wilayah; serta ketahanan energi;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi dan rawa dalam rangka mendukung ketahanan pangan untuk pencapaian surplus beras 10 juta ton;
 - c) Percepatan pencapaian *Minimum Essential Force*, sesuai RPJMN 2010-2014.

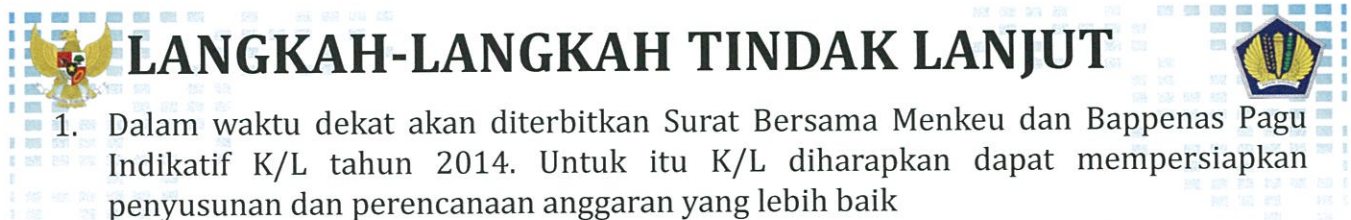
☐ Alokasi anggaran ke dalam program/kegiatan, dilakukan bersama-sama Kemenkeu dan Bappenas → Permen PPN No. 1/2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru

42



7

Langkah-langkah Tindak Lanjut



1. Dalam waktu dekat akan diterbitkan Surat Bersama Menkeu dan Bappenas Pagu Indikatif K/L tahun 2014. Untuk itu K/L diharapkan dapat mempersiapkan penyusunan dan perencanaan anggaran yang lebih baik
2. Rencana Kerja dan Anggaran K/L harus sejalan dengan prioritas pembangunan dan tugas pokok masing-masing K/L untuk mencapai sasaran pembangunan Tahun 2014
3. Penyusunan dan Perencanaan Anggaran yang lebih baik akan membantu memperbaiki penyerapan anggaran belanja K/L di Tahun 2014 (minimal mencapai 95%)
4. Penyelesaian proses penyusunan anggaran harus tepat waktu dan disiplin, baik dalam pembahasan intern Pemerintah maupun dengan DPR (Komisi)
5. Pengajuan usulan anggaran K/L harus satu pintu melalui Pemerintah (c.q. Kementerian Keuangan dan BAPPENAS);
6. K/L mempersiapkan dokumen pendukung (TOR dan RAB) dalam proses perencanaan dan penganggaran seperti untuk pengusulan inisiatif baru dan mencegah adanya blokir anggaran (pembintangan).
7. **Dalam Pembahasan Anggaran dengan DPR (Pagu Alokasi Anggaran K/L):**
K/L memperhatikan jadwal pembahasan dengan Komisi DPR (mitra kerjanya) agar tidak terjadi keterlambatan atau adanya blokir anggaran (pembintangan) karena anggaran belum dibahas/disetujui oleh DPR.
8. **Ketika APBN disahkan (akhir Oktober) agar semua pembahasan anggaran K/L dengan Komisi terkait sudah selesai.**

RINGKASAN POSTUR RAPBN 2014
(miliar rupiah)

URAIAN	2014
	RAPBN
A. Pendapatan Negara	1.662.508,5
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.661.148,4
1. Penerimaan Perpajakan	1.310.218,9
<i>Tax Ratio (% thd PDB)</i>	12,6
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.256.304,1
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	53.914,8
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	350.929,5
II. Penerimaan Hibah	1.360,1
B. Belanja Negara	1.816.734,7
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.230.303,4
1. K/L	612.652,3
2. Non K/L	617.651,1
1. Belanja Pegawai	274.367,8
2. Belanja Barang	173.292,4
3. Belanja Modal	209.684,9
4. Pembayaran Bunga Utang	119.533,4
5. Subsidi	336.241,8
a. Subsidi Energi	284.659,5
1. Subsidi BBM	194.893,0
2. Subsidi Listrik	89.766,5
b. Subsidi Non-Energi	51.582,3
6. Belanja Hibah	3.542,7
7. Bantuan Sosial	84.693,8
8. Belanja Lainnya	28.946,5
II. Transfer Ke Daerah	586.431,3
1. Dana Perimbangan	481.802,4
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	104.628,9
III. Suspen	0,0
C. Keseimbangan Primer	(34.692,7)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(154.226,2)
<i>% terhadap PDB</i>	(1,49)
E. Pembiayaan	154.226,2
I. Pembiayaan Dalam Negeri	173.224,2
II. Pembiayaan Luar negeri (neto)	(18.998,0)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	0,0
a. Pertumbuhan ekonomi (%)	6,4
b. Inflasi (%)	4,5
c. Nilai tukar (Rp/US\$1)	9.750,0
d. Suku Bunga SPN-3 bulan, rata-rata (%)	5,5
e. Harga minyak (US\$/barell)	106,0
f. Lifting Minyak (MBCD)	870
g. Lifting gas (MBCD)	1.240

LAMPIRAN VII

Amanat Presiden Tentang RUU APBN 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 AGUSTUS 2013

Nomor : R-37/Pres/08/2013
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Rancangan Undang-Undang
tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2014

Kepada Yth.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

di

Jakarta

Dengan ini kami menyampaikan:

-----Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2014-----

untuk dibicarakan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, guna mendapatkan
persetujuan dengan prioritas utama.

Selanjutnya, untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-
Undang tersebut, kami menugaskan Menteri Keuangan untuk mewakili kami.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Tembusan Yth. :

1. Wakil Presiden RI;
2. Ketua DPD RI;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Polhukam;
6. Menteri Koordinator Bidang Kesra;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Pokok-Pokok Siklus APBN di Indonesia

Penyusunan Konsep Kebijakan dan Kapasitas Fiskal Sebagai Langkah Awal



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DIREKTORAT PENYUSUNAN APBN**

**Gedung Sutikno Slamet Lt. 18
Jalan Dr. Wahidin No.1
Jakarta Pusat 10710
Telp (021) 3505663 Fax (021) 3505659
Email: penyusunan.apbn@anggaran.depkeu.go.id**

ISBN 978-602-17675-2-8

